

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET						TARGET
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Lancarnya pelayanan internal dan eksternal dinas	1 Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor	1. $\frac{\text{Kebutuhan Administrasi Pelayanan}}{\text{Pemenuhan}} \times 100\%$	Sekretariat DPU - PR	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		2 Presentase Pemenuhan Kebutuhan SDM ke PU an	$\frac{\text{Jumlah SDM yang dibutuhkan}}{\text{Jumlah SDM yang tersedia}} \times 100\%$	Sekretariat DPU - PR	70,00%	70,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%
2	Meningkatnya ketersediaan peralatan dan Sarana Penunjang	1 Tingkat ketersediaan alat berat dan sarana / prasarana ke PU an	1. $\frac{\text{Jumlah Alat berat yang dibutuhkan}}{\text{Jumlah ketersediaan}} \times 100\%$	Sekretariat DPU - PR	35,00%	45,00%	50,00%	65,00%	80,00%	90,00%	95,00%
3	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan	1 Presentase tingkat jalan dan jembatan dengan dengan kondisi baik / sedang	1. $\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut}} \times 100\%$	Bidang JJI pada DPU-PR	85,60%	85,60%	87,50%	89,00%	92,00%	94,00%	95,00%
4	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	1 Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	1. $\frac{\text{Jumlah Genangan Saat ini}}{\text{Jumlah Total Titik Genangan}} \times 100\%$	Bidang JJI pada DPU-PR	100,00%	85,00%	85,00%	70,00%	55,00%	40,00%	25%
5	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	1 Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	1. $\frac{\text{Daerah Irigasi Teknis}}{\text{Total Jumlah Daerah Irigasi}} \times 100\%$	Bidang JJI pada DPU-PR	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	97,00%	100,00%
6	Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah	1 Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	1. $\frac{\text{Jumlah Gedung Negara yang Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Kebutuhan Gedung Negara}} \times 100\%$	Bidang CK pada DPU-PR	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	40,00%
	Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	1. $\frac{\text{Sistim Informasi Jasa Konstruksi yang dibangun}}{\text{Kebutuhan SIM JAKON}} \times 100\%$	Bidang CK pada DPU-PR	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%	60,00%	75,00%	75,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET						TARGET
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
7	Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	1 Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	1. $\frac{\text{Jumlah Penduduk RT yang terlayani}}{\text{Total Jumlah Penduduk RT}} \times 100\%$	Bidang CK pada DPU-PR	93,00%	95,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Pemenuhan drainase layak	2 Presentase drainase perkotaan yang layak	1. $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Terlayani}}{\text{Total Jumlah Penduduk (RT)}} \times 100\%$	Bidang CK pada DPU-PR	40,00%	40,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	100,00%
9	Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	1 Kesesuaian pemanfaatan Ruang Kota	1. $\frac{\text{Jumlah Dokumen Tata Ruang}}{\text{Jumlah Kebutuhan Dokumen Tata Ruang}} \times 100\%$	Bidang TARU pada DPU-PR	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%
		2 Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	1. $\frac{\text{Pelanggaran yang ditangani}}{\text{Jumlah Total Pelanggaran}} \times 100\%$	Bidang TARU pada DPU-PR	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%
10	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	1 Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	$\frac{\text{Luas Lahan Bersertifikat di Suatu daerah}}{\text{Luas Lahan yang seharusnya bersertifikat}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan pada DPU-PR	0,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%
	Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	2 Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah tanah negara}}{\text{Jumlah kasus tanah negara}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan pada DPU-PR	0,00%	35,00%	40,00%	45,00%	55,00%	60,00%	60,00%

Bukittinggi, 2017

Diketahui Oleh:
WALIKOTA BUKITTINGGI
KOTA BUKITTINGGI

M. RAMLAN NURMATIAS, SH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI



Ir. OKTAVIANUS, MT
NIP. 196310301992021001

ctt : pelajari RPJMD : sasarn, indikator sasaran, strategi & kegiatan

analisis penyelenggaraan urusan si SKPD

Analisis

ctt : pelajari RPJMD : sasarn, indikator sasaran, strategi & kegiatan

analisis penyelenggaraan urusan si SKPD

16	170,7	56,9	34,14		
	242	80,666667	48,4		
	174,75	58,25	34,95		
	176,8	58,933333	35,36		
	178,85	59,616667	35,77	460	92
	177,85	59,283333	35,57		

PERJANJIAN KINERJA 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KEPALA DINAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Lancarnya pelayanan internal dan eksternal dinas	1 Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor	100,00%
		2 Presentase Pemenuhan Kebutuhan SDM ke PU an	70,00%
2	Meningkatnya ketersediaan peralatan dan Sarana Penunjang	1 Tingkat ketersediaan alat berat dan sarana / prasarana ke PU an	30,00%
3	Meningkatnya ketersediaan (kuantitas) serta kualitas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnnya	1 Presentase tingkat kondisi jalan dengan kondisi baik / sedang	85,67%
4	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan (> 30 cm), bahaya banjir dan dampak bencana alam lainnya (longsor)	1 Penurunan jumlah wilayah / titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	85,00%
5	Meningkatnya cakupan air irigasi untuk pertanian rakyat	1 Presentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	98,00%
6	Meningkatnya penyediaan bangunan / gedung pemerintah yang tertib	1 Jumlah gedung negara yang dibangun	60,00%
		2 Jumlah gedung yang layak fungsi	0,00%
7	Meningkatnya ketersediaan informasi informasi dan perizinan jasa konstruksi serta keterpaduan pelaku usaha konstruksi	1 Presentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI)	10,00%

8	Tersedianya dokumen perencanaan, infrastruktur yang berkualitas berbasis data dan informasi yang akurat dan inovatif	2 Dokumen perencanaan infrastruktur (Non DED) yang disusun / diupdate	12,50%
9	Pemenuhan target universal akses (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	1 Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	95,00%
		2 Presentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	40,00%
		3 Presentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan (100% = 128,11 Hektar)	100,00%
10	Tersedianyan Dokumen dan Regulasi Penataan Ruang Daerah	1 Persentase Penyediaan Informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah	50,00%
11	Meningkatnya ketaatan terhadap dokumen tata ruang	1 Presentase Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang yang dapat ditertibkan	50,00%
12	Meningkatnya Presentase Luas Lahan Bersertifikat dan terselesaikannya Kasus Tanah Negara	1 Presentase Luas Lahan Bersertifikat dan Penyelesaian Kasus Tanah Negara	80,00%

Bukittinggi, Februari 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
KOTA BUKITTINGGI**

SYAHRIZAL, ST
NIP. 19611212 198602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran	65 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100 %
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %

Diketahui oleh :
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

SEKRETARIS
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT
NIP. 19630301 1992021001

DEDI SYAFRIZAL, ST
NIP. 197009071997031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Penyediaan jasa surat - menyurat	Jenis surat menyurat	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik/Komunikasi yang dibayar	100%
3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatandan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan kantor di pelihara	100%
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan	100%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	100%
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli	100%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggndaan	Jumlah Cetak/ penggandaan yang dilaksanakan	100%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik terbeli	100%
9	Penyediaan Makan dan Minum	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	100%
10	Rapat - rapat Kordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Keluar Kota Bukittinggi	Presentasi Rapat/Koordinasi yang diikuti dan dihadiri	100%
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS yang dibayar	100%
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa Pengamanan Kantor yang dilaksanakan	100%
13	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Paket yang diproses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100%
14	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Kegiatan Proyek	Jumlah Paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	100%
15	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%
16	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	100%
17	Pemeliharaan Alat Berat	Jumlah Alat Berat yang di Pelihara	100%
18	Pembayaran Listrk Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang Dibayar	100%
19	Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencanaan Peneliti	Kapasitas Aparatur perencanaan peneliti	100%
20	Pengadaan Alat Berat	Jumlah alat berat yang diadakan / beli	100%
21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor dan Lanscape	100%

Diketahui oleh :
SEKRETARIS
DINAS PU DAN PENATAAN
RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bukittinggi

DEDI SYAFRIZAL, ST
NIP. 19700907 1997031004

E M M I, S.Pd
NIP. 196608081991082001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD yang disusun	2 Dokumen
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
3	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen Renstra yang direvisi	1 Dokumen
4	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	2 laporan

Diketahui oleh :
SEKRETARIS

DPUPR KOTA BUKITTINGGI

DEDI SYAFRIZAL, ST
NIP. 197009071997031004

KEPALA SUB.BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

DPUPR KOTA BUKITTINGGI

EVI RATNA SETIA, SE, MM
NIP.19730910 2006042020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BIDANG JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

No	Program	Indikator Program	Target
I.	TUGAS POKOK		
1	Mengkoordinir rencana kegiatan Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi, membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, mengawasi pelaksanaan tugas, menilai hasil kerja bawahan, menyusun langkah Kegiatan, dan Pembuatan Laporan Kegiatan berdasarkan Prosedur agar Terselenggaranya tugas Bidang jalan, jembatan dan Irigasi dengan Optimal	Terselenggaranya tugas Bidang jalan, jembatan dan Irigasi dengan Optimal	1 dokumen
2	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan Kota yang berkondisi Baik	88,00%
3	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dan Jembatan yang berkondisi baik	88,00%
4	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya	Persentase DI yang Beririgasi teknis dengan kondisi baik	98%
5	Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan Informasi / Data Base Jalan	40%
6	Pengembangan , Pengelolaan & Konsevasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	Persentase sungai yang terpelihara / Normalisasi	55%
7	Pembangunan Turap/Talut/Bronjong	Persentase Pengamanan Titik bahaya longsor	50%
II	TUGAS TAMBAHAN		
1	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase Wilayah / Jalan dengan Penerangan Jalan secara bertahap	99%
2	Pengelolaan Normalisasi Sungai (wewenang Propinsi dan Pusat)	Terlaksananya Pemeliharaan sungai secara bertahap	99%

Diketahui oleh :

KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BUKITTINGGI

KEPALA BIDANG JALAN JEMBATAN DAN IRIGASI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT

NIP. 19630301 1992021001

SYAFRIYALDI, ST, MT

NIP. 196307011983031004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
I	TUGAS POKOK		
1	Menyiapkan dan Meyusun Rencana Keg. Perencanaan Jalan, Jembatan dan Irigasi sesuai dengan rencana strategis & Rencana Kerja di Bid. Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2017	Terkumpulnya data yang terkait dengan Kegiatan Jalan, Jembatan dan Irigasi	1 Dokument
2	Menyusun bahan kebijakan pelaksanaan desain Perencanaan dan Pengawasan Bidang Jalan,Jembatan dan Irigasi TA. 2017	Terkumpulnya data terkait dengan kebijakan Perencanaan & Pengawasan Bid. Jalan, Jembatan & Irigasi	1 Dokument
3	Membagi tugas Bidang Perencanaan dan Pengawasan kepada Seksi-seksi yang sesuai dengan Tupoksi yang bersangkutan pada Bid. Jalan, Jembatan dan Irigasi TA, 2017	Terciptanya Perencanaan dan Pengawasan sesuai dengan aturan / juknis yang berlaku	1 Dokument
4	Memberikan Bantuan Teknis kepada Kasi-Kasi di Bid. Jalan, Jembatan, Irigasi terhadap Perencanaan dan Pengawasan baik proyek Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan	Terciptanya Perencanaan & Pengawasan sesuai dengan juknis yang diharapkan	1 Dokument
5	Meneliti Konsep rencana Kegiatan dan Perencanaan Anggaran pada Bid. Jalan, Jembatan dan Irigasi agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Terkumpulnya data hasil Survey di Bid. Jalan, Jembatan dan Irigasi	20 Kegiatan
6	Mengawasi & Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi sesuai dengan DPA TA. 2017	Terciptanya pengawasan pelaksanaan Kegiatan dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan secara kontiniu	20 Kegiatan
7	Database Jalan dan Jembatan berbasis GIS	Database Jalan dan jembatan Berbasis GIS	1 Dokumen
II	TUGAS TAMBAHAN		
1	Perencanaan dan pengawasan Pemeliharaan Rutin Lampu PJU	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Pemeiharaan Rutin Lampu PJU	1 Paket
2	Perencanaan dan Pengawasan Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Revitalisasi PJU	1 Paket
3	Perencanaan dan Pengawasan Penambahan Jaringan PJU	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Penambahan Jaringan PJU	1 Paket
4	Perencanaan dan Pengawasan Normalisasi Bt Tambuo	Terlaksananya Normalisasi Batang tambuo	1 Paket

Diketahui oleh :
KEPALA BIDANG JALAN JEMBATAN DAN IRIGASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

KASI PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN
JEMBATAN DAN IRIGASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

SYAFRIYALDI, ST, MT

NIP. 196307011983031004

DONI. M, ST

NIP. 198206112006041007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
I	TUGAS POKOK		
1	DAK bidang Infrastruktur Jalan (sisa DAK 2010-2015)	Terlaksananya DAK Bidang Inftrastruktur Jalan (sisa DAK 2010-2015)	1 Paket
2	DAK Penugasan Bidang Jalan-Pendukung Konektivitas (DAK 2017)	Terlaksananya DAK Penugasan Bidang Jalan-Pendukung Konektivitas (DAK 2017)	1 Paket
3	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Kota yang direhabilitasi/Pemeliharaan Rutin	194,11 Km
4	Pemeliharaan Rutin jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang direhabiitasi /Pemeliharaan	236 M Jembatan, 35,506 M Saluran Irigasi
5	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Trotoar yang direhabilitasi / Pemeliharaan Rutin	68,858 Km
6	Rehab / peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang Saluran irigasi yang direhab / peningkatan	1000 M'
II	TUGAS TAMBAHAN		
1	Pemeliharaan Rutin lampu Penerangan jalan Umum	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum yang dipeliharani	2,951 Unit
2	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan jalan Umum yang Ditambah	6 Paket
3	Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum direvitalisasi	2 Paket

KEPALA BIDANG JALAN JEMBATAN DAN
 IRIGASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG
 KOTA BUKITTINGGI

SYAFRIYALDI, ST, MT
 NIP. 196307011983031004

KASI PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN
 DAN IRIGASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 KOTA BUKITTINGGI

E L F I, ST
 NIP. 19680503 199202 2001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN JEMBATAN DAN IRIGASI

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
I	TUGAS POKOK		
1	Peningkatan Trotoar	Jumlah Trotoar yang ditingkatkan	10 Ruas
2	Pembangunan Trotoar	Jumlah Trotoar yang dibangun	6 Ruas
3	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Jalan yang ditingkatkan	7 Paket
4	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	1 Paket
5	Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang dibangun	1 Paket
6	Pembangunan Saluran Irigasi	Jumlah Saluran Irigasi dan Pintu Air yang dibangun	1 Sal Irigasi, 2 Unit Pintu Air
7	DAK Bidang infrastruktur Irigasi (sis a DAK 2010-2015)	terlaksananya DAK Bidang infrastruktur Irigasi (sis a DAK 2010-2015)	1 Paket
8	DAK Penugasan Bidang Irigasi - Pendukung Kedaulatan pangan (DAK 2017)	terlaksananya DAK Penugasan Bidang Irigasi - Pendukung Kedaulatan pangan (DAK 2017)	1 Paket
9	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong /Dam Jalan	2350 M'
II	TUGAS TAMBAHAN		
1	Normalisasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi	300 M

Diketahui :
 KEPALA BIDANG JALAN JEMBATAN DAN
 IRIGASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG
 KOTA BUKITTINGGI

KASI PENINGKATAN DAN
 PEMBANGUNAN JALAN
 JEMBATAN DAN IRIGASI
 DPUPR KOTA BUKITTINGGI

SYAFRIYALDI, ST, MT
 NIP. 196307011983031004

DENOVIA JAMAL, ST
 NIP. 197811082011011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	80%
2	Program Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong	Persentase Pengamanan titik Bahaya longsor	50%
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	55%
4	Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan	6 titik
5	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	70%
6	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase Gedung negara dan swasta yang laik fungsi	5%
7	Program Presentase tersedianya layanan informasi Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	20%
8	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	20%

Diketahui oleh :
 KEPALA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT
 NIP. 19630301 1992021001

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA BUKITTINGGI

DONNY BOY F. DARAN, ST.
 NIP. 197306192002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI JASA KONSTRUKSI DAN PENATAAN BANGUNAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun	1 Paket
2	Event-Event Daerah Dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan	5 event
3	Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun	8 unit
4	Rehab Kantor Lurah	Kantor Lurah yang direhab	4 unit
5	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	1 unit (tahap 1)
6	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Rumah Dinas yang dibangun kembali	1 unit
7	Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Rumah Dinas yang dikembangkan	1 unit
8	Rehab Gedung Parkir Eks Gloria	Gedung yang parkir direhab	1 unit
9	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Panjang Pagar Lintasan	200 M'
10	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	9 kali sidang, 18 SLF
11	Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	2 lokakarya
12	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Tersedianya dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	44 paket
13	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	4 dokumen
14	RTBL Kawasan Strategis	Jumlah dokumen RTBL Kawasan Strategis yang tersusun	1 dokumen RTBL

Diketahui :

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

DONNY BOY F. DARAN, ST.
NIP. 197306192002121001

KASI JASA KONSTRUKSI DAN
PENATAAN BANGUNAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

BAMBANG RIWANTO, ST.
NIP. 19790302 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI DRAINASE PERKOTAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	80%
2	Pemeliharaan rutin drainase dalam kota	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dipelihara	80%
3	Peningkatan drainase	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan	80%
4	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Panjang pengerukan sungai dan kali	80%
5	Pembuatan sumur resapan	Jumlah sumur resapan yang dibangun	80%

Diketahui :
KEPALA BIDANG CIPTA
KARYA
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

KASI DRAINASE PERKOTAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

DONNY BOY F. DARAN, ST.
NIP. 197306192002121001

RAHMAT, BE
NIP. 196504241986031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI AIR MINUM DAN SANITASI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Pemipaan (SR) Masyarakat	Pemipaan (SR) masyarakat	300 SR
2.	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	1 SPAM
3.	Pembangunan/Peningkatan SPAM Regional	Pembangunan/Peningkatan SPAM Regional	1unit
4.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010-2015)	Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Insfrastruktur Air Minum	1 paket
5.	Pembuatan Sumur Bor	Terlaksananya pembuatan sumur bor	1 unit sumur
6.	Infrastruktur Sanitasi Perkotaan (sisa DAK 2010-2015)	Tersedianya infrastruktur perkotaan	1 paket
7.	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Panjang Pagar Lintasan	200 meter

Diketahui oleh :
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

DONNY BOY.F.DARAN,ST
NIP. 19730619 2002121001

KASI AIR MINUM DAN SANITASI
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

YOPI ZULFIKAR, ST
NIP. 197605092005011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BIDANG TATA RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	2	3	4
1	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR Tersusun	1 Buah Perda RDTR
2	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Tersedianya Peta Tata Ruang	40 Unit Peta Tata Ruang
3	Pendataan Bangunan	Terlaksananya Pendataan Bangunan	1 Buah Dokumen Pendataan Bangunan dalam Kota Bukittinggi
4	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan kelengkapan studio Tata Ruang	12 Jenis perlengkapan studio
5	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya Pembuatan Keterangan Rencana Kota	350 Dokumen KRK
6	Perubahan Sertifikat Tanah Yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	60 Buah Sertifikat
7	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	1 Tahun Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan
8	Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah Audit Pemanfaatan Ruang yang disusun	1 Kegiatan
9	Pembuatan Biboard Dilarang Membangun Tanpa IMB	Jumlah Bilboard yang dibuat	1 Kegiatan

Diketahui oleh :
 KEPALA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA BUKITTINGGI

KEPALA BIDANG TATA RUANG
 DPUPR KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT
 NIP. 19630301 1992021001

JENNERI FAISAL, ST, MT
 NIP. 197802282002121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PEMETAAN)

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Pendataan Bangunan	Terlaksananya Pendataan Bangunan	1 Buah Dokumen Pendataan Bangunan dalam Kota Bukittinggi
2	Perubahan Sertifikat Tanah Yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	60 Buah Sertifikat

Diketahui oleh :
KEPALA BIDANG TATA RUANG
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PEMETAAN
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

JENNERI FAISAL,ST,MT
NIP. 19780228 2002 121006

Ir. LISDA
NIP. 196406091994032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG)

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR Tersusun	1 Buah Perda RDTR
2	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Tersedianya Peta Tata Ruang	40 Unit Peta Tata Ruang
3	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan kelengkapan studio Tata Ruang	12 Jenis perlengkapan studio
4	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya Pembuatan Keterangan Rencana Kota	350 Dokumen KRK

Diketahui oleh :
KEPALA BIDANG TATA RUANG
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

KEPALA SEKSI PENATAAN RUANG
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

JENNERI FAISAL,ST,MT
NIP. 19780228 2002 121006

ANDREAS MAYJAYA SAPUTRA, ST, M.Si
NIP. 197605092005011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
(KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN)

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Jumlah Audit Pemanfaatan	1 Tahun Pengawasan/Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan
2	Audit Pemanfaatan Ruang	Ruang yang disusun	1 Kegiatan
3	Pembuatan Biboard Dilarang Membangun Tanpa IMB	Jumlah Bilboard yang dibuat	1 Kegiatan

Diketahui oleh :
KEPALA BIDANG TATA RUANG
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
DPUPR KOTA BUKITTINGGI

JENNERI FAISAL,ST,MT
NIP. 19780228 2002 121006

FAUZAN
NIP. 196701051991031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KABID PERTANAHAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	
1	2	3	4	
1	Program Pengembangan Sistim Informasi Pertanahan	Tingkat ketersediaan informasi pertanahan	40	%
2	Program Penataan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kepastian hukum atas tanah asset daerah	85	%
3	Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan	Persentase Optimalisasi penataan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah	81	%

Diketahui oleh :
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN
RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT
NIP. 19630301
1992021001

KABID PERTANAHAN
DINAS PU DAN PENATAAN
RUANG
KOTA BUKITTINGGI

MUSPIDA, S.AP
NIP. 19680318 199303 1003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI INVENTARISASI TANAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	1 Tersedianya Arsip Elektronik Pertanahan	100 Arsip

Diketahui :
KEPALA BIDANG PERTANAHAN
DINAS PU DAN PENATAAN
RUANG
KOTA BUKITTINGGI

MUSPIDA, S.AP
NIP. 19680318 199303 1003

KASI INVENTARISASI TANAH
DINAS PU DAN PENATAAN
RUANG
KOTA BUKITTINGGI

MUHAMMAD HAGGY MARTA,
S.Kom
NIP. 19880317 2011011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI PENGADAAN TANAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Pengadaan Tanah untuk Jalan	Tersedianya tanah untuk Jalan menuju Kantor DPRD	100%
2	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersedianya Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	100%

Diketahui :
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

MUSPIDA, S.AP

NIP. 19680318 199303 1003

KASI PENGADAAN TANAH
DINAS PU DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

RESTY HARMILENY, ST
NIP. 19781126 200701
2005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TANAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
1	Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by.pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	100%
2	Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Presentase Sertifikasi Kepastian Hukum atas Tanah Aset Daerah	100%

Diketahui :

KEPALA BIDANG PERTANAHAN
DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

MUSPIDA, S.AP
NIP. 19680318 199303 1003

KASI PENYELESAIAN
PERMASALAHAN TANAH
DINAS PU DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

SYAFAR, SH
NIP. 19620216 1983031008



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat segala limpahan rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Laporan yang menunjukkan capaian kinerja selama tahun 2017 ini menggambarkan capaian kinerja DPUPR yang dilaksanakan oleh seluruh unit eselon yang ada dengan berdasarkan 11 sasaran, 20 program dan 98 kegiatan yang termuat dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017.

LAKIP ini disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Ketua LAN RI Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permen PAN No. 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai implementasi dari visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan dalam Renstra DPUPR tahun 2016-2021 yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dengan indikator yang terukur. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah menyusun Penetapan Kinerja yang ditandatangani bersama Walikota Bukittinggi pada bulan Februari tahun 2017. Penetapan Kinerja ini kemudian dijadikan sebagai dasar acuan dalam mengukur capaian kinerja.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal sholeh dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS.MT
NIP. 19631030 199202 1001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). *Report on Accountability and Performance of Government Institutions* ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang tujuan akhirnya diharapkan akan menciptakan penyelenggaraan negara yang *good governance* dan *clean government*.

LAKIP ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (2017) yang indikatornya berdasarkan kepada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah disepakati pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan Walikota Bukittinggi.

Acuan penilaian kinerja ini berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, dengan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya”

Maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;



3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan

Sebagai penjabaran dari visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan yang akan dicapai untuk pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan
3. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir
4. Meningkatnya cakupan air irigasi untk daerah pertanian
5. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)
7. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota
8. Mengkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan dicapai dengan beberapa sasaran berikut :

1. Peningkatan kualitas Pengelolaan SAKIP
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
3. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
4. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir
5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi
6. Menigkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah
7. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi
8. Pemenuhan kebutuhan air bersih
9. Pemenuhan drainase layak
10. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang
11. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas
12. Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah



Analisis Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bukittinggi pada tahun 2017 terlihat dalam 11 sasaran strategis yang ditiangkan dalam dari 98 buah kegiatan yang terhimpun 20 program, analisis capaian kinerja dimaksud terinci dalam tabel berikut:

**CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017**

Sasaran		Rencana a Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	100,00	41,00	41,00%	Dari Masukan
		100,00	67,00	67,00%	Dari Keluaran
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Presentase tingkat jalan dan jembatan	92,75	36,38	39,22%	Dari Masukan
		92,75	55,67	60,02%	Dari Keluaran
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	76,67	23,22	30,29%	Dari Masukan
		76,67	17,60	22,96%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	65,00	8,68	13,35%	Dari Masukan
		65,00	11,24	17,30%	Dari Keluaran
5 Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	71,25	32,22	45,23%	Dari Masukan
		71,25	35,69	50,09%	Dari Keluaran
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning	20,00	3,71	18,55%	Dari Masukan



konstruksi		yang dikeluarkan				
			20,00	20,00	100,00%	Dari Keluaran
7	Pemenuhan kebutuhan air bersih	- Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	65,00	8,00	12,31%	Dari Masukan
		- Pemenuhan drainase layak	65,00	7,00	10,77%	Dari Keluaran
8	Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	80,00	52,00	65,00%	Dari Masukan
			80,00	51,00	63,75%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang						
9	Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	85,83	57,55	67,05%	Dari Masukan
			85,83	73,23	85,32%	Dari Keluaran
		- Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan				
Urusan Wajib Pertanahan						
10	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	90,83	54,35	59,84%	Dari Masukan
			90,83	60,00	66,06%	Dari Keluaran
11	Selesainya Konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	90,00	30,67	34,08%	Dari Masukan
			90,00	90,00	100,00%	Dari Keluaran
TOTAL			76,12	31,62	41,54%	Dari Masukan
			76,12	44,40	58,33%	Dari Keluaran

Sumber: Hasil Analisis Rata-rata capaian



Dari tabel Capaian kinerja DPUPR tahun 2017 dibagi atas 11 sasaran, sedangkan penilaian berdasarkan pada indikator hasil dengan melihat dari dua indikator pembanding, yaitu dari indikator masukan dan keluran. Dari data dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja DPU dari sisi masukan rata-rata hanya sebesar 41,54% dengan predikat kurang baik, namun jika dilihat dari sisi keluaran kegiatan capaian kinerja DPU tahun 2017 mencapai 58,33% dengan predikat sedang. Secara umum rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di Perubahan APBD seperti sisa – sisa DAK tahun berjalan, lokasi yang tidak bebas, dan beberapa kegiatan juga gagal lelang karena tidak adanya penawaran terhadap kegiatan tersebut.

Dari hal ini jika dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu dilakukan perencanaan pengalokasian pendanaan secara matang, dengan merencanakan kegiatan berdasarkan output/ hasil yang akan dikeluarkan sehingga kegiatan lebih terarah dan akan menghasilkan hasil yang maksimal dan bukan berorientasi pada seberapa besar dana yang disediakan.

Dalam 11 Indikator sasaran terdapat 19 program dan 87 kegiatan, namun dalam hal ini terdapat beberapa 1-3 program dalam 1 sasaran. Banyak program dan kegiatan dalam sasaran DPUPR tergambar dalam tabel berikut.

JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SASARAN

NO. URUT SASARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	1	2
2	4	19
3	3	6
4	1	4
5	2	9
6	1	4
7	1	14
8	1	4
9	2	19
10	3	6
11	1	1
Jumlah	19	87

Sumber: Hasil Analisis

**PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI MASUKAN**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	-	-
2	85% sd < 100%	Baik	-	-
3	70% sd < 85%	Sedang	-	-
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	11	100,00
Jumlah			11	100

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi pada tahun 2017 jika dilihat dari indikator masukan/Input yaitu berdasarkan dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disandingkan dengan realisasi atau serapan anggaran didapat bahwa tidak ada satupun indikator sasaran yang mempunyai predikat sangat baik. Kinerja DPUPR tahun ini dari sisi indikator masukan mengalami penurunan dimana pada Tahun 2016 terdapat 1 sasaran yang berpredikat Baik, 2 sasaran berpredikat Sedang dan 3 sasaran yang berpredikat kurang baik. Sedangkan dari indikator keluaran kinerja DPUPR tahun 2017 juga mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI KELUARAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	2	18,18
2	85% sd < 100%	Baik	1	9,09
3	70% sd < 85%	Sedang	0	0
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	8	72,73
Jumlah			11	100

Sumber: Hasil Analisis



Jika dilihat dari keluaran/output sebagaimana terlihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja DPU tahun 2017 terdapat 2 sasaran dengan predikat sangat baik , 2 sasaran dengan predikat baik, 1 sasaran dengan predikat sedang dan 6 sasaran dengan predikat kurang baik. Rendahnya capaian kinerja ini dari sisi input atau serapan keuangan dan ouput disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih merupakan indikator paling rendah dari segi output, disebabkan karena beberapa kegiatan yang atal dilaksanakan dikarenakan Lahan yang belum bebas belum adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemakaian sisa DAK.
- b. Pada Indikator sasaran no. 7 yaitu Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih juga merupakan sasaran yang mempunyai predikat rendah segi input , hal ini disebabkan karena dana di anggarkan di DPA tetapi beberapa kegiatan batal karena beberapa hal seperti masalah lahan dan tidak adanya juklak dan juknis pengerjaan.
- c. Pada Indikator No.4 dari segi Input 13,35% dan dari segi Output 17,30% hal ini dikarenakan beberapa hal seperti untuk Perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018 Dana untuk DAK Tahun 2018 Kota Bukittinggi tidak ada, dan Pemotongan Dana DAK dari Pusat.
- d. Beberapa kegiatan di resian ulang (CCO) karena terdapat bagian pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena faktor lahan/tanah sehingga serapan kegiatan tidak bisa maksimal dan output kegiatan tidak terealisasi 100%.
- e. Rendahnya serapan dana, khusus untuk kegiatan belanja Modal dan Barang jasa yang pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan umum disebabkan oleh rendahnya penawaran dari rekanan dari nilai HPS. Dan tentu akan lebih besar jika disandingkan dengan nilai pagu yang disediakan dalam DPA masing-masing kegiatan.

Capaian kinerja juga sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, yang terlihat dari sejauh mana serapan anggaran yang telah dialokasikan untuk sebuah kegiatan, Akuntabilitas Keuangan DPUPR berdasarkan sasaran strategis dapat tergambar dari tabel berikut:



**REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017**

Sasaran				
URAIAN	Indikator Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
Urusan Wajib Pekerjaan Umum				
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai sakip Dinas PUPR	690.000.000	230.018.646	33%
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.	Presentase tingkat jalan dan jembatan.	39.157.198.854	28.905.270.865	73,82%
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir .	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir.	3.653.615.220	1.974.426.000	54%
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	5.499.347.623	1.288.239.000	23%
5 Meningkatnya mutu dan umur tekhnis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	17.338.396.825	15.094.256.835	88%
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	115.809.775	21.477.705	18.54%
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	-Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih -Pemenuhan Drainase layak	9.476.463.524	428.662.000	5%



Sasaran		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN	Indikator Sasaran			
1	2	3	4	5
8 Pemenuhan Drainase Layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	7.758.835.905	6.442.698.500	83%
Urusan Wajib Penataan Ruang				
9 Peningkatan Penataan Ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota - Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	1.882.905.120	1.426.167.860	75,74%
Urusan Wajib Pertanahan				
10 Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas.	Presentase Pelayanan pertanahan sesuai SOP	3.780.460.898	165.895.173	4,39%
11 Selesainya Konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah.	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	387.286.390	131.996.589	34,08%
TOTAL		89.740.320.134	56.109.109.173	62,52%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi hanya mencapai **62,52%**, hal ini tentunya akan berkorelasi terhadap output kegiatan yang dihasilkan. Sehingga kedepan perlu adanya manajemen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang baik terencana, terukur dan berdasarkan kepada output dan tidak hanya berdasarkan input/atau seberapa besar dana yang disediakan.

**RENCANA DAN REALISASI BELANJA DPUPR TAHUN 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PORSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
B	BELANJA DAERAH	99.789.503.275	64.884.378.253	65,02
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.1.1	Belanja Pegawai	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.2	BELANJA LANGSUNG	94.854.293.774	60.144.249.336	63,41
2.2.2	Belanja Pegawai	2.392.791.000	1.827.517.228	76,38
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	10.324.107.253	5.422.991.017	52,53
2.2.4	Belanja Modal	82.137.395.521	52.893.741.091	64,40

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2017 tidak ada yang mencapai nilai 100%, Kurangnya pencapaian 100% keuangan disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang telah diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM.....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN	5
1.5 TUGAS DAN WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM.....	6
1.6 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANG.....	7
1.7 PEGAWAI.....	1
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK	6
2.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGKOTA BUKITTINGGI	7
2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGKOTA BUKITTINGGI	8
2.3 KEBIJAKAN PROGRAM DINAS PU KOTA BUKITTINGGI	10
2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN	14
2.5. PENETAPAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3. 1 INDIKATOR KINERJA.....	19
3.2 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	20
3.3 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	21
3.4 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGKOTA BUKITTINGGI	21
3.5 KENDALA YANG DIHADAPI	256
3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN	27
BAB IV PENUTUP.....	31



LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1	STAF PENDUKUNG MASING-MASING BIDANG	1
TABEL 1. 2	KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	4
TABEL 1. 3	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PNS	4
TABEL 2.1	TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16
TABEL 2.2	PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017.....	16
TABEL 3. 1	CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI	22
TABEL 3.2	JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SASARAN	23
TABEL 3.3	PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI MASUKAN	24
TABEL 3.4	PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI KELUARAN	24
TABEL 3.5	REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI	28
TABEL 3.6	RENCANA DAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DPUPR TAHUN 2017	30



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1	STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM	7
-------------	--	---



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	RENCANA STRATEGIS 2016-2021 (Renstra 2016 - 2021)
LAMPIRAN 2	RENCANA KINERJA TAHUNAN 2017 (RKT 2017)
LAMPIRAN 3	PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN 2017 (PKT 2017)
LAMPIRAN 4	PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 2017 (PPS 2017)



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *Report on Accountability and Performance of Government Institutions* ini sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangan pengelolaan Sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Yang tujuan akhirnya diharapkan akan menciptakan penyelenggaraan negara yang *good governance* dan *clean government*.

LAKIP ini disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan (2017) yang indikatornya berdasarkan kepada Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yang telah disepakati pada tahun 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Walikota Bukittinggi.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, mengacu dan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);



20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013;
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2013;
25. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/XII/2004 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 dimaksud untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan



akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya laporan dan kinerja kepengintahan yang baik (*good governance*).

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2017. Penyusunan LAKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/program/kegiatan dengan rencananya. Yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2017 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Dengan demikian penyajian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang, Dasar hukum, maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP, Sistematika Penulisan, Tugas dan Wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pegawai

BAB II PERENCANAAN STRATEGIK



Menjelaskan Visi, Misi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rencana Kinerja Tahunan serta Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5 TUGAS DAN WEWENANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 .



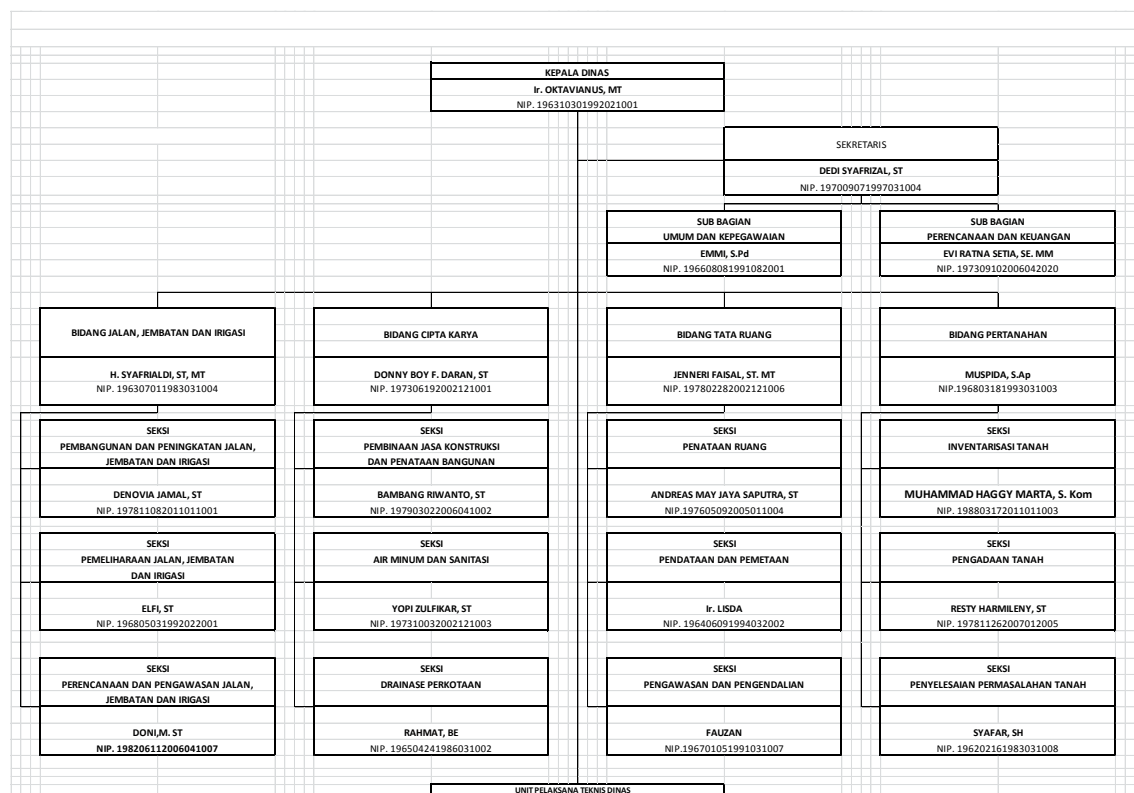
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum, Penataan Ruang dan peratanahan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.6 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANGDAN PENATAAN RUANG.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdan Penataan Ruangdan Penataan Ruangdan Penataan Riang Kota Bukittinggi terlihat dalam Gambar berikut:

GAMBAR 1. 1





Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktural tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi No. 46 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

1.7 PEGAWAI

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keadaan tanggal 30 Desember 2017 adalah sebanyak 110 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 20 orang dan 49 orang staf serta didukung oleh 41 orang tenaga honorer, dengan komposisi seperti tabel 1.1 dan tabel 1.2 sebagai berikut :

TABEL 1. 1
STAF PENDUKUNG MASING-MASING BIDANG

No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
I	SEKRETARIAT				
1.	ROMA DONA PUTRA, ST	PNS	1.	NORA ALVINA	PHL
2.	ZULHELMY NASIR	PNS	2.	ZEICKY CERIA	KONTRAK
3.	JONI ARIANTO, ST	PNS	3.	DARYATA	KONTRAK
4.	REDHO NASLIN, A.Md	PNS	4.	FAHMI DARWIN	KONTRAK
5.	AHMAD TAHARUDDIN	PNS	5.	EFRIYUNARDI	KONTRAK
6.	HARIADI	PNS	6.	HENGKI GUNAWAN	KONTRAK
7.	METRIAMEL (Gudang)	PNS			
8.	SYAFRIJONI	PNS			
9.	BASRI	PNS			
10.	DINA MUHARLINA ARFAN, S.Sos	PNS			
11.	DONNY IRWAN, SE	PNS			
12.	LENI MARLINA, A.Md	PNS			
13.	MUHAMMAD FAUZI ZEN, ST	PNS			
14.	NELVIA FITRI	PNS			
15.	HENDRA SAPUTRA	PNS			
16.	EDI MULYA	PNS			
II.	BIDANG TATA RUANG				
17.	HARZON	PNS	7.	ZUL IRPAN	KONTRAK



No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
18.	IDRUS HAKIMI	PNS	8.	DENY RONALD	KONTRAK
19.	DONI ADMEL	PNS	9.	SEVRISMAN HEKI	KONTRAK
20.	EDITIWARMAN	PNS	10.	FERRY LESMANA	KONTRAK
21.	HERMANSYAH	PNS	11.	ARDIMAN	KONTRAK
22.	IFRIANTO	PNS	12.	RONI JUNAIDI	KONTRAK
			13.	KUS HERLENI	KONTRAK
III.	BIDANG PRASARANA JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI				
23.	AFDAL ADNAN, ST	PNS	14.	ADE INDRA	PHL
24.	SAIFUL MUSTAFA, ST	PNS	15.	T.A. EKA PUTRA	PHL
25.	UTIAR	PNS	16.	ICHWAN RISKI	PHL
26.	MUKLIS	PNS	17.	FERRI O. DHARMA	KONTRAK
27.	YUNAI DI	PNS	18.	ANDRES	KONTRAK
28.	DELVIA DONA	PNS	19.	AFRIZAL	KONTRAK
29.	HERIYANTO	PNS	20.	YULNAZRI	KONTRAK
30.	RUDY	PNS	21.	IRWANDI	KONTRAK
31.	ASRIL ST. MARAJO	PNS	22.	JIMMY AGFIRSTNA	KONTRAK
32.	AFDALDI YUSUF RIYANTO, ST	PNS	23.	HENGKY PRATAMA	KONTRAK
33.	FEBRIK APAHDIL, A.Md	PNS	24.	JEKY LESMANA	KONTRAK
			25.	DENI PUTRA	KONTRAK
			26.	SURASIM	KONTRAK
			27.	RICCO FITRA	KONTRAK
			28.	AFRIZAL	PHL
			29.	GUSTAMAR	KONTRAK
			30.	EMILSYAH	KONTRAK
			31.	RONI EFENDI	KONTRAK



No.	NAMA	STATUS KEP.	No	NAMA	STATUS KEP.
IV.	BIDANG CIPTA KARYA				
34.	M. SYAHRIL	PNS	32.	SALIM HAVEZ SYAH	KONTRAK
35.	DEDI ERYANTO, ST	PNS	33.	B. St. ASA RAJO	PHL
36.	BENNY ARISTO, ST	PNS	34.	NASWIRLEN	PHL
37.	FITRIA, A.Md	PNS	35.	HUSNUL F. M	KONTRAK
38.	KHAIRUL EKA PUTRA, ST	PNS	36.	EKO WAHYUDI	KONTRAK
39.	RENAWAFIL	PNS	37.	ABDUL HADI	KONTRAK
40.	RIKO	PNS	38.	ZULHENDRA	KONTRAK
41.	SUJAMAL	PNS			
42.	RONI	PNS			
43.	RIKO SALAM	PNS			
44.	IRZAL RISWAN	PNS			
V.	BIDANG PERTANAHAN				
45.	SILLATURAHMAH, ST	PNS	39	ANDRIYANTO	
46.	RONNY KURNIAWAN, A.Md	PNS	40.	DEDY NOVYANDI	
47.	UTIAR	PNS	41.	RENDI YOHANIS	
48.	IRFAN SAPUTRA, A.Md	PNS			
49.	SYAFRIAL	PNS			

Sumber: Bagian Umum DPUPR Bukittinggi, 2017



TABEL 1. 2
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 30 Des 2017 (orang)	Porsentase (%)
IV	3	2,73%
III	38	34,54%
II	25	22,72%
I	3	2,73%
Honor	41	37,23%
Jumlah	110	100%

Sumber: Bagian Umum DPU Bukittinggi, 2017

Komposisi Pegawai PUPR di Desember Tahun 2017 didominasi oleh PNS yaitu sebanyak 63.36% sedangkan berdasarkan komposisi PNS komposisi paling besar diisi oleh golongan III, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan I.

TABEL 1. 3
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PNS

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0,0%
S2	5	7,25%
S1	27	39,13%
D III	8	11,59%
D II	0	0,0%
D I	0	0,0%
SLTA	22	31,88%
SLTP	4	5,80%
SD	3	4,35%
JUMLAH	69	100,0%

Sumber: Bagian Umum DPU Bukittinggi, 2017

Dari 69 personil PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan diisi oleh PNS berpendidikan S1& S2 yaitu



sebanyak 46,38% dan berpendidikan SLTA sebanyak 31,88% sedangkan paling sedikit PNS berpendidikan SD sebanyak 3%. Untuk peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjejang pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur padamasyarakat.

B A B II

PERENCANAAN STRATEJIK

Lahirnya Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, yang didalam pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan RPJPD tahun 2004 - 2025. Berdasarkan pasal 19 ayat (4) dinyatakan bahwa Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 menjadi dasar pijakan bagi aparatur dalam melaksanakan segala aktifitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara substansi Renstra Kota Bukittinggi tahun 2016 - 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Prioritas dan kegiatan yang akan diaktualisasikan dan diimplementasikan oleh seluruh elemen aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan koordinasi terhadap stakeholder kota. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah SKPD yang menangani infrastruktur Ke PU an dalam implementasi visi dan misinya tetap mengacu kepada RPJMD dan RTRW Kota Bukittinggi serta renstra K/L Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga mampu mengaktualkan kebijakan dalam dokumen tersebut kedalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan demikian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*out put*) dan hasil (*out comes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Untuk mendukung visi dan program pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi di Bidang ke PU an maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi menetapkan Visi:

“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya”

Makna dari infrastruktur bidang Ke PU an yang merupakan perwujudan dari optimalisasi dan pelayanan bidang ke PU an yang penjabarannya meliputi:

1. Optimalisasi pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kapasitas layanan fisik pembangunan sesuai dengan parameter karakteristik sarana prasarana kota.
2. Bidang pekerjaan umum adalah merupakan perangkat sektor pembangunan yang terintegrasi terhadap sektor lainnya.
3. Berkesinambungan adalah merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya untuk pencapaian manfaat dan sasaran yang diharapkan.

Maka untuk mencapai Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peralatan ke PU an
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik
3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota



4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Sebagai penjabaran dari visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka tujuan yang akan dicapai untuk pembangunan infrastruktur lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan
3. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan
4. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian
5. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)
7. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota
8. Meningkatkan pelayanan publik dibidang pertanahan

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, akan dicapai dengan beberapa sasaran berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
3. Meningkatnya kualitas jalan jalan dan jembatan
4. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir
5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi
6. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah
7. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi
8. Pemenuhan kebutuhan air bersih
9. Pemenuhan drainase layak
10. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang
11. Terciptanya pelayanan yang berkualitas
12. Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah



TABEL 2. 1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	B	B	B	B	B	B
	2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	5	5	5	5	5	5
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	3 Meningkatnya · kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	85,20%	87,30%	90%	92%	94%	95%
3. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	4 Berkurangnya · wilayah yang terkena dampak genangan/ banjir.	Persentase wilayah/titik yang terkena dampak genangan/ banjir	100%	85%	85%	70%	55%	40%
4. Meningkatkan cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	5 Meningkatnya · kualitas sarana dan prasarana irigasi	persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	98%	98%	98%	98%	98%	97%
5. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	6 Meningkatnyamutu · dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah	persentase gedung /bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	0%	10%	20%	30%	40%
	7 Meningkatnya · ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	10%	20%	40%	60%	75%
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)	8 Pemenuhan · kebutuhan air bersih	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	90,64 %	90,64%	95,45 %	97%	100 %	100 %
	9 Pemenuhan · drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak	40%	40%	55%	60%	65%	70%
7. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota.	1 Peningkatan 0 penataan ruang dan · ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	60%	65%	70%	75%	80%	85%
		pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	55%	60%	65%	70%	75%
8 Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan.	1 Terciptanya 1 pelayanan · pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	-	50%	55%	60%	65%	70%
	1 Selesainya konflik- 2 konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	-	35%	40%	45%	55%	60%

2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

1. KEBIJAKAN UMUM

Pemerintah Pusat telah merumuskan *new deal* pembangunan ekonomi indonesia yang secara prinsip memuat *triple track strategy*, yaitu *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. Track pertama dilakukan dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, sedangkan track ketiga dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan prinsip dan strategi pemerintah tersebut maka peran infrastruktur ke PUPR an dalam pembangunan di Kota Bukittinggi pada dasarnya sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini juga harus disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan dan program pembangunan di RPJMD dan RTRW Kota Bukittinggi yang diharapkan akan menciptakan keselarasan perencanaan dan pembangunan infrastruktur.

Kebijakan umum pembangunan infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemajuan teknologi dan informasi;



3. Mengirimkan aparatur dan pelaksana jasa konstruksi untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi jasa konstruksi;
4. Mengadakan dan melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dibutuhkan ;
5. Melakukan penanganan jalan, jembatan dan irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab;
6. Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana-rencana pembangunan jalan, jembatan dan irigasi;
7. Melakukan pemetaan terhadap jaringan drainase yang perlu dipelihara, direhabilitasi, dibangun dan ditingkatkan;
8. Meningkatkan kapasitas produksi air baku air minum dengan melakukan inovasi terhadap sumber air untuk air minum;
9. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan PJU serta melakukan pembaharuan dan peremajaan terhadap PJU yang sudah tidak layak;
10. Menyiapkan database ke PU an dalam bentuk data spasial (berbasis GIS);
11. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Melakukan pendataan terhadap bangunan dalam kota;
13. Melakukan pengembangan informasi pertanahan dengan membuat arsip elektronik;
14. Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki konflik pertanahan dengan pemerintah daerah;
15. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai kebutuhan tanah dalam rangka pemenuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2. PROGRAM

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang merupakan

penjabaran secara selektif dan tepat dari beberapa klasifikasi program pembangunan. Klasifikasi program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, urusan yang melekat ditugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk tahun 2017 selain katagori non urusan terdapat beberapa urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan yang tergeneralisasi dalam beberapa program, dan untuk menunjang keberhasilan program tersebut didukung oleh input pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

A. Non Urusan / Rutin

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan *Outcomenya* adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan *Outcomenya* adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan *Outcomenya* adalah Meningkatnya disiplin aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan *Outcome* adalah Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan secara berkala dan akuntabel.

B. Urusan Wajib

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan *outcomenya* adalah Presentase Jalan dan Jembatan Dalam kota yang berkondisi baik.
- b. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan *outcomenya*, meningkatnya kualitas dan kuantitas Jalan Dalam Kota yang berkondisi baik.
- c. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas Lampu Penerangan Jalan Umum



- d. Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan, dengan *outcomenya* adalah Ketersediaan informasi / data base jalan.
- e. Program Pengendalian Banjir, dengan *outcomenya* adalah Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir
- f. Program pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan *aoutcomenya* adalah meningkatnya Presentase sungai yang terpelihara / normalisasi.
- g. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong, dengan *outcomenya* adalah Berkurangnya titik bahaya longsor.
- h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya kualitas sarana danprasarana irigasi.
- i. Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana sosial dan fasilitas umum.
- j. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung, dengan *outcomenya* adalah meningkatnya presentase gedung negara yang laik fungsi.
- k. Program Pengaturan Jasa Konstruksi , dengan *outcomenya* adalah Presentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi.
- l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Ilmbah, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih.
- m. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase darinase perkotaan dengan kondisi baik

2. Urusan Wajib Penataan Ruang

- a. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase penyediaan informasi mengenai rencana Tata Ruang (RTR) wilayah
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya ketaatan terhadap tata ruang

3. Urusan Wajib Pertanahan



- a. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya Persentase ketersediaan informasi pertanahan
- b. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase optimalisasi penataan, penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah
- c. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan *Outcomenya* adalah meningkatnya persentase kepastian hukum atas tanah aset daerah.

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran 1. Rencana Kinerja memuat 3 urusan yaitu Urusan Wajib Pekerjaan Umum dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis, Urusan Urusan Wajib Penataan Ruang dengan 2 (dua) Sasaran Strategis dan urusan Wajib Pertanahan dengan 2 (dua) Sasaran Strategis.

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 1 (satu) tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 berdasarkan Penetapan Kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2017 secara lengkap disajikan pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2 : Formulir RKT).

2.5. PENETAPAN KINERJA

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi berkomitmen dengan sistem akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja.



Penetapan Kinerja merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Salah satu tujuan Penetapan Kinerja ini adalah sebagai acuan untuk menilai keberhasilan /kegagalan pencapaian dan tujuan organisasi. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebagaimana yang telah disepakati oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Walikota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.2.
PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017



Sasaran			Program	KEGIATAN	Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan		
1	2	3	4			
Urusan Wajib Pekerjaan Umum						
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai Sakip Dinas PUPR	5	23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1 Pengadaan Alat Berat	Rp 430.000.000	
				2 Pemeliharaan Alat Berat	Rp 260.000.000	
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Porsentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	87,30%	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	01 Peningkatan Trotoar	Rp 5.999.319.400	
				02 Pembangunan Trotoar	Rp 1.910.698.000	
				03 Peningkatan Jalan Dalam Kota	Rp 5.424.963.950	
				05 Pembangunan Jembatan	Rp 849.971.725	
				06 Pembangunan Box Culvert	Rp 699.060.000	
				09 DAK Penugasan Bidang Jalan (Sisa DAK 2010 - 2015)	Rp 995.649.309	
				12 DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektifitas DAK 2017)	Rp 16.863.000.000	
				13 Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DA 2018)	Rp 250.000.000	
				14 Pembangunan Jalan Konsolidasi By.Pass Kelurahan Pulau Anak Air	Rp 200.000.000	
				16 Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By.Pass Jln. Teja Sukmana	Rp 200.000.000	
				17 Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	Rp 87.500.000	
			18 Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Jembatan	01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Rp 532.812.320	
				02 Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Rp 443.875.360	
				03 Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Rp 399.949.010	
			33 Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan	01 Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Rp 399.999.940	
				02 Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Rp 600.399.840	
				03 Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	Rp -	
			22 Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan	04 Pembayaran Listrik Rekening Database Jalan dan Jembatan Berbasis GIS	Rp 3.300.000.000	
				03 Database Jalan dan Jembatan Berbasis GIS	Rp -	
				04 Penyediaan sarana Pengelolaan Peta GIS dan Data Base Kondisi Jalan Kota Bukittinggi	Rp -	
2 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	85%	28 Program Pengendalian Banjir	01 Peningkatan PePeningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Rp 344.638.185	
				02 Pembuatan Sumur Resapan	Rp 299.989.725	
			26 Program Pengembangan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	01 Normalisasi Sungai	Rp 550.787.660	



				17	Program Pembangunan Turap / Talud Bronjong	01	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Bangunan	Rp	-	
						02	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Rp	2.458.199.650	
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang ternenuhi	98%	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	01	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp	287.862.675	
						02	Rehab Peningkatan Jaringan Irigasi	Rp	479.985.125	
						03	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (sisa DAK 2010 - 2015)	Rp	735.499.823	
						06	Saluran Irigasi yang Direhabilitasi dan di bangun	Rp	3.896.000.000	
						07	Perencanaan DAK reguler Bidang Irigasi 2018	Rp	100.000.000	
4	Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	31	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	01	Event-event Daerah dan Nasional	Rp	99.964.400	
						02	Pembangunan Kantor Lurah	Rp	5.221.254.740	
						03	Rehab Kantor Lurah	Rp	841.496.000	
						05	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Rp	149.599.610	
						32	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Rp	5.712.024.425	
						33	Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Rp	2.583.521.535	
						34	Rehab Gedung Parkir Eks. Gloria	Rp	2.227.118.950	
						36	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Rp	210.000.000	
				32	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	01	Operasional Perda Bangunan Gedung	Rp	143.893.235	
						02	Penyusunan Perda	Rp	149.523.930	
	Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	34	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp	115.809.775	
6	Pemenuhan kebutuhan air bersih	Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	90,64%	27	Program Pengembangan, Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	11	Pemipaan (SR)) Masyarakat	Rp	436.000.000	
						12	Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Rp	63.000.000	
						17	Pembangunan / Peningkatan SPAM Regional	Rp	-	
						18	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010 - 2015)	Rp	3.253.602.500	
						28	Pembuatan Sumur Bor	Rp	200.000.000	
						29	Infrastruktur Senilai Perkotaan (DAK 2010 - 2015)	Rp	4.879.539.424	
						30	Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Rp	220.321.600	
						31	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Rp	424.000.000	



	Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	40%	16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Rp	5.524.976.795	
						02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Rp	235.477.685	
						03	Peningkatan Drainase	Rp	1.998.381.425	
Urusan Wajib Penataan Ruang										
1	Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	36	Program Perencanaan Tata Ruang	03	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Rp	400.037.830	
						05	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Rp	30.000.000	
						06	Pendataan Bangunan	Rp	329.968.300	
						07	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Rp	250.000.000	
						10	RTBL Kawasan Strategis	Rp	441.498.450	
						13	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Rp	49.158.610	
						14	Perubahan Sertifikat Tanah yang terkena pelepasan hak	Rp	85.016.055	
				37	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan	Rp	146.681.575	
						02	Audit Pemanfaatan Ruang	Rp	75.544.300	
						03	Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas lereng / tebing	Rp	75.000.000	
Urusan Pertanahan										
1	Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	50%	01	Program Penataan, Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan	01	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Rp	221.710.950	
						03	Pengadaan Tanah untuk jalan	Rp	33.089.293	
						04	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan pemerintah Kota Bukittinggi	Rp	3.499.839.625	
	Selesai konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	35%	17	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	01	Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Rp	387.286.390	
				18	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	01	Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Rp	25.821.030	

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. **Indikator Masukan (*input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan mejandi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (*output*)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari satu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (*outcome*)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan dapat terwujud.
5. **Indikator Manfaat (*benefit*)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (*impact*)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat indikator keluaran (*output*)/ indikator hasil (*outcome*).

3.2 METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran indikator kinerja yang dijadikan acuan adalah tingkat capaian indikator Hasil (*Outcome*)

masing-masing kegiatan pada kelompok sasaran yang termuat dalam dokumen perencanaan.

$$\text{Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

3.3 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap indikator kinerja. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya “ **Sangat Baik.** “
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dengan dibawah 100% predikatnya “ **Baik.** “
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dengan dibawah 85% predikatnya “ **Sedang.**”
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dengan dibawah 70% predikatnya “ **Kurang Baik.**”

Setiap predikat yang dicapai dari sasaran dan indikator yang telah ditetapkan diberikan penjelasan untuk rasionalisasi dengan kondisi setiap indikator kegiatan.

3.4 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

Analisis Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 sesuai Tapkin terlihat dalam 11 sasaran strategis sebagai aglomerasi dari 87 buah kegiatan dalam 19 program, analisis capaian kinerja dimaksud terinci dalam tabel berikut:



TABEL 3. 1
CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	100,00	41,00	41,00%	Dari Masukan
		100,00	67,00	67,00%	Dari Keluaran
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Presentase tingkat jalan dan jembatan	92,75	36,38	39,22%	Dari Masukan
		92,75	55,67	60,02%	Dari Keluaran
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yag terkena dampak genangan / banjir	76,67	23,22	30,29%	Dari Masukan
		76,67	17,60	22,96%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	65,00	8,68	13,35%	Dari Masukan
		65,00	11,24	17,30%	Dari Keluaran
5 Meningkatnya mutu dan umur tehknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	71,25	32,22	45,23%	Dari Masukan
		71,25	35,69	50,09%	Dari Keluaran
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	20,00	3,71	18,55%	Dari Masukan
		20,00	20,00	100,00%	Dari Keluaran
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	- Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	65,00	8,00	12,31%	Dari Masukan
	- Pemenuhan drainase layak	65,00	7,00	10,77%	Dari Keluaran
8 Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaaan yang layak	80,00	52,00	65,00%	Dari Masukan
		80,00	51,00	63,75%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang					
9 Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	85,83	57,55	67,05%	Dari Masukan
		85,83	73,23	85,32%	Dari Keluaran
	- Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan				
Urusan Wajib Pertanahan					
10 Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	90,83	54,35	59,84%	Dari Masukan
		90,83	60,00	66,06%	Dari Keluaran
11 Selesainya Konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	90,00	30,67	34,08%	Dari Masukan
		90,00	90,00	100,00%	Dari Keluaran
TOTAL		76,12	31,62	41,54%	Dari Masukan
		76,12	44,40	58,33%	Dari Keluaran

Sumber: Hasil Analisis Rata-rata capaian

Dari tabel Capaian kinerja DPUPR tahun 2017 dibagi atas 11 sasaran, sedangkan penilaian berdasarkan pada indikator hasil dengan melihat dari dua indikator pembanding, yaitu dari indikator masukan dan keluran. Dari data dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian kinerja DPUPR dari sisi masukan rata-rata hanya sebesar 41,54% dengan predikat kurang baik, namun jika dilihat dari sisi keluran kegiatan capaian kinerja DPUPR tahun 2017 mencapai 58,33% dengan predikat **kurang baik**. Secara umum rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti sisa – sisa DAK Tahun berjalan, lokasi yang tidak bebas, lokasi berada di fasilitas umum, dan beberapa kegiatan juga gagal lelang karena tidak adanya penawaran terhadap kegiatan tersebut.

Dari hal ini jika dapat disimpulkan bahwa kedepan perlu dilakukan perencanaan pengalokasian pendanaan secara matang, dengan merencanakan kegiatan berdasarkan output/ hasil yang akan dikeluarkan sehingga kegiatan lebih terarah dan akan menghasilkan hasil yang maksimal dan bukan berorientasi pada seberapa besar dana yang disediakan.

Dalam 11 sasaran strategis sebagai aglomerasi dari 87 buah kegiatan dalam 19 program, namun dalam hal ini terdapat beberapa 1-3 program dalam 1 sasaran. Banyak program dan kegiatan dalam sasaran DPUPR tergambar dalam tabel berikut.

TABEL 3.2
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM SASARAN

NO. URUT SASARAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	1	2
2	4	19
3	3	6
4	1	4
5	2	9
6	1	4
7	1	14
8	1	4
9	2	19
10	3	6
11	1	1
Jumlah	19	87

Sumber: Hasil Analisis

TABEL 3.3
PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI MASUKAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	-	-
2	85% sd < 100%	Baik	-	-
3	70% sd < 85%	Sedang	-	-
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	11	100,00

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 jika dilihat dari indikator masukan/Input yaitu berdasarkan dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disandingkan dengan realisasi atau serapan anggaran didapat bahwa tidak ada satupun indikator sasaran yang mempunyai predikat sangat baik. Kinerja DPUPR tahun ini dari sisi indikator masukan mengalami penurunan dimana pada Tahun 2016 terdapat 1 sasaran yang berpredikat Baik, 2 sasaran berpredikat Sedang dan 3 sasaran yang berpredikat kurang baik. Sedangkan dari indikator keluaran kinerja DPUPR tahun 2017 juga mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

TABEL 3.4
PREDIKAT INDIKATOR BERDASARKAN NILAI KELUARAN

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran	%
1	100%	Sangat Baik	2	18,18
2	85% sd < 100%	Baik	1	9,09
3	70% sd < 85%	Sedang	0	0
4	0% sd < 70 %	Kurang Baik	8	72,73
Jumlah			11	100

Sumber: Hasil Analisis

Jika dilihat dari keluaran/output sebagaimana terlihat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja DPUPR tahun 2017 terdapat 2 sasaran dengan predikat sangat baik , 1 sasaran dengan predikat baik, 0 sasaran dengan predikat sedang dan 8 sasaran dengan predikat kurang baik. Rendahnya capaian kinerja ini dari sisi input atau serapan keuangan dan ouput disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih merupakan indikator paling rendah dari segi output, disebabkan karena beberapa kegiatan yang atal dilaksanakan dikarenakan Lahan yang belum bebas belum adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemakaian sisa DAK.
- b. Pada Indikator sasaran no. 7 yaitu Presentase penduduk yang mendapatkan air bersih juga merupakan sasaran yang mempunyai predikat rendah segi input , hal ini disebabkan karena dana di anggarkan di DPA tetapi beberapa kegiatan batal karena beberapa hal seperti masalah lahan dan tidak adanya juklak dan juknis pengerjaan.
- c. Pada Indikator No.4 dari segi Input 13,35% dan dari segi Output 17,30% hal ini dikarenakan beberapa hal seperti untuk Perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018 Dana untuk DAK Tahun 2018 Kota Bukittinggi tidak ada, dan Pemotongan Dana DAK dari Pusat.
- d. Beberapa kegiatan di resian ulang (CCO) karena terdapat bagian pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan karena faktor lahan/tanah sehingga serapan kegiatan tidak bisa maksimal dan output kegiatan tidak terealisasi 100%.
- e. Rendahnya serapan dana, khusus untuk kegiatan belanja Modal dan Barang jasa yang pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan umum disebabkan oleh rendahnya penawaran dari rekanan dari nilai HPS. Dan tentu akan lebih besar jika disandingkan dengan nilai pagu yang disediakan dalam DPA masing-masing kegiatan.

3.5 KENDALA YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur ke PU an pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi adalah:

- a. Daya dukung wilayah yang terbatas untuk menampung pengembangan berbagai fungsi kota, sesuai tuntutan dan kebutuhan. Hal ini terlihat dengan peningkatan kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, serta *urban sprawl* sebagai dampak kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah dalam penerapan penataan ruang. Dalam hal penggunaan lahan, sering terjadi benturan antara aturan yang ada dengan desakan kebutuhan masyarakat di lapangan. Keterbatasan lahan juga makin dirasakan, karena posisi Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, Pusat Perdagangan & Jasa, Pendidikan dan Kesehatan, maka Pemerintah Kota Bukittinggi tidak hanya melayani warga Bukittinggi, tetapi juga melayani masyarakat hinterland dan para commuter dari kabupaten dan kota tetangga.
- b. Kurangnya Sosialisasi Perda No. 6 tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bukittinggi mengakibatkan terjadinya kesalahan informasi dan perbedaan persepsi penerapan peraturan dilapangan oleh masyarakat maupun aparatur sendiri. Hal ini berakibat terhadap rendahnya implementasi rencana tata ruang dilapangan sebagai akibat timbulnya sedikit gejolak masyarakat terhadap dokumen rencana RTRW terutama terhadap pola ruang dalam guna lahan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
- c. Lokasi dan lahan rencana pembangunan yang telah teralokasikan dalam kegiatan 2017 sering terkendala dan tidak bebas, sehingga beberapa kegiatan pembangunan tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, begitu juga pada beberapa lokasi juga lahannya tidak siap yang berakibat terhadap keterlambatan pelaksanaan pembangunan. Kedepan hal ini perlu disikapi dengan membuat skala prioritas dan kepastian pembebasan lokasi, dalam artian bahwa pada tataran usulan pembangunan paling bawah pada musrenbang setiap kegiatan pembangunan yang diusulkan lokasinya harus bebas dan hal ini perlu ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dari masyarakat.

- d. Pelaksanaan pembangunan fisik di Pemerintah Kota khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagian besar dimulai pada bulan Agustus, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan/pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan karena waktu yang tersedia untuk pembangunan tidak mencukupi. Banyak kegiatan yang dilakukan adendum dan CCO kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan skenario/perencanaan awal. Beberapa kegiatan juga hanya dapat dilakukan sebatas pembuatan dokumen perencanaan. Beberapa hal tersebut bisa/mungkin disebabkan oleh beberapa hal:
- Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Implementasi Perpres 70 tahun 2012 sebagai perubahan kedua dari 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa menyebabkan keterlambatan proses pelelangan dan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- e. Khusus untuk kegiatan DAK Tahun berjalan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Petunjuk Teknis untuk Pemakaian dana belum ada.
- f. Rendahnya pemahaman aparatur terhadap TUPOKSI masing-masing menyebabkan beberapa kinerja aparatur tidak berjalan dengan baik, sehingga tidak berfungsi optimal dalam mendukung kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.

3.6 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, pengalokasian belanja diupayakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 disusun menggunakan *Performance Based Budget System*, yang telah dimulai semenjak Tahun 2002 berdasarkan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 yang berorientasi pada hasil dan manfaat yang terukur berdasarkan ukuran kinerja.

Penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



Capaian kinerja juga sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, yang terlihat dari sejauh mana serapan anggaran yang telah dialokasikan untuk sebuah kegiatan, Akuntabilitas Keuangan DPUPR berdasarkan sasaran strategis dapat tergambar dari tabel berikut :

TABEL 3.5
REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2017

Sasaran		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN	Indikator Sasaran			
1	2	3	4	5
Urusan Wajib Pekerjaan Umum				
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai sakip Dinas PUPR	690.000.000	230.018.646	33%
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.	Presentase tingkat jalan dan jembatan.	39.157.198.854	28.905.270.865	73,82%
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir .	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir.	3.653.615.220	1.974.426.000	54%
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	5.499.347.623	1.288.239.000	23%
5 Meningkatnya mutu dan umur tekhnis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	17.338.396.825	15.094.256.835	88%
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice	115.809.775	21.477.705	18.54%



Sasaran		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
URAIAN	Indikator Sasaran			
1	2	3	4	5
	planning yang dikeluarkan			
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	-Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih -Pemenuhan Drainase layak	9.476.463.524	428.662.000	5%
8 Pemenuhan Drainase Layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	7.758.835.905	6.442.698.500	83%
Urusan Wajib Penataan Ruang				
9 Peningkatan Penataan Ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota - Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	1.882.905.120	1.426.167.860	75,74%
Urusan Wajib Pertanahan				
1 Terciptanya pelayanan 0 pertanahan yang berkualitas.	Presentase Pelayanan pertanahan sesuai SOP	3.780.460.898	165.895.173	4,39%
1 Selesainya Konflik-konflik 1 pertanahan pemerintah daerah.	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	387.286.390	131.996.589	34,08%
TOTAL		89.740.320.134	56.109.109.173	62,52%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa serapan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya mencapai 62,52%, hal ini tentunya akan berkorelasi terhadap output kegiatan yang dihasilkan. Sehingga perlu



kedepan perlu adanya manajemen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang baik terencana, terukur dan berdasarkan kepada output dan tidak hanya berdasarkan input/atau seberapa besar dana yang disediakan.

TABEL 3.6
RENCANA DAN REASLISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DPUPR TAHUN 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PORSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
B	BELANJA DAERAH	99.789.503.275	64.884.378.253	65,02
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.1.1	Belanja Pegawai	4.935.209.501	4.740.128.917	96,05
2.2	BELANJA LANGSUNG	94.854.293.774	60.144.249.336	63,41
2.2.2	Belanja Pegawai	2.392.791.000	1.827.517.228	76,38
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	10.324.107.253	5.422.991.017	52,53
2.2.4	Belanja Modal	82.137.395.521	52.893.741.091	64,40

Sumber : Subbag Keuangan Sekretariat DPUPR dan hasil Analisis, 2017

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2017 tidak ada yang mencapai nilai 100%, Kurangnya pencapaian 100% keuangan disebabkan hambatan-hambatan/permasalahan yang akan diuraikan di dalam pencapaian indikator sasaran pada analisis pencapaian sasaran strategis akuntabilitas kinerja.

B A B I V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 merupakan tolok akur/ acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2017 ini. Renstra DPUPR juga merupakan salah satu bentuk penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Bukittinggi yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang teranggarkan dalam setiap tahun perencanaan.

Pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan tanggung jawab seluruh unit eselon yang ada yang telah dituangkan berdasarkan tupoksi masing-masing dalam upaya penyelenggaraan pembangunan, baik itu dalam urusan otonomi daerah maupun urusan wajib yang di emban.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut ditetapkan dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik dalam Renstra dan Renja sebagai acuan awal baik dalam DPA yang telah disiapkan. Dalam Hal penyampaian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) ini berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan dan diukur dengan realisasi dari target yang telah ditetapkan. Khusus untuk tahun 2017 ini capaian kinerja sasaran DPUPR dari sisi indikator Input hanya sebesar 37,69%, sedangkandari indikator keluaran sebesar 58,33%. Seperti banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan belum adanya Petunjuk Teknis untuk Pemakian Dana DAK Tahun berjalan, dan permasalahan lahan. Masih kurangnya pemahaman aparatur dalam proses pengadaan barang dan jasa dan kurang siapnya lahan pembangunan juga merupakan salah satu penyebab rendahnya pencapaian kinerja DPUPR pada tahun 2017.

Kedepan diharapkan perlu dilakukan beberapa hal seperti kepastian ketersediaan lahan yang telah sesuai dengan peruntukan ruang yang dituju, pemantapan proses pengadaan barang dan jasa serta mematangkan perencanaan penganggaran kegiatan, sehingga pada saat implementasi pembangunan tidak ada lagi kendala dalam proses pembangunan tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah perlu dilakukannya percepatan proses pengadaan barang dan jasa, dimana diharapkan pada triwulan I seluruh kegiatan telah masuk pada tahapan pelelangan



serta diupaya peningkatan kuantitas aparatur bersertifikasi sehingga penanganan kegiatan fisik dapat terdistribusi secara proposional.

Diharapkan dengan terpenuhinya hal tersebut diatas, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedepan akan lebih baik dan sesuai dengan rencana yang diharapkan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran			Program	KEGIATAN			Rencana Tingkat Capaian (Target)	KET
URAIAN	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian		URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan		
1	2	3	4					
Urusan Wajib Pekerjaan Umum								
1 Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai Sakip Dinas PUPR	5	2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1 Pengadaan Alat Berat	Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 230.018.646	
					Keluaran			
					Jumlah pengadaan alat berat	Jenis	1	
					Hasil			
				2 Pemeliharaan Alat Berat	Alat Berat yang dipelihara dapat melancarkan pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	53	
					Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 188.918.646	
					Keluaran			
					Jumlah pemeliharaan Alat Berat	Jenis	10	
					Hasil			
					Alat Berat yang dipelihara dapat melancarkan pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	73	
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Porsentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	87,30 %	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	0 1 Peningkatan Trotoar	Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 5.999.319.400	
					Keluaran			
					Jumlah Trotoar yang ditingkatkan	Ruas	10	
					Hasil			
					Trotoar Yang berkondisi baik dan sesuai standar	%	87,5	
				0 2 Pembangunan Trotoar	Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 1.910.698.000	



						Keluaran			
						Panjang Trotoar yang dibangun	Ruas	6	
						Hasil			
						Trotoar yang berkondisi baik dan sesuai standar	%	87,5	
					03	Peningkatan Jalan Dalam Kota			
						Masukan			
						- SDM			
						- DANA		Rp 5.424.963.950	
						Keluaran			
						Panjang Jalan yang ditingkatkan	KM	2,2	
						Hasil			
						Jalan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	87,5	
					05	Pembangunan Jembatan			
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 849.971.725	
						Keluaran			
						Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	1	
						Hasil			
						Jembatan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	87,5	
					6	Pembangunan Box Culvert			
						Masukan			
						- SDM	org		Batal
						- DANA	Rp.	Rp -	
						Keluaran			
						Jumlah Box Culvert yang dibangun	paket	0	
						Hasil			
						Berkurangnya titik genangan air	%	0	
					09	DAK Penugasan Bidang Jalan (Sisa DAK 2010 - 2015)			
						Masukan			Batal
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp -	
						Keluaran			
						Panjang Jalan yang diaspal	paket	0	
						Hasil			
						Jalan dalam kondisi baik	%	0	
					12	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas DAK 2017)			
						Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 16.863.000.000	



						Keluaran			
						Panjang Jalan yang diaspal ulang	KM	12,22	
						Hasil			
						Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	%	87,5	
					1 3	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 250.000.000	
						Keluaran			
						Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK 2018)	dokumen	2	
						Hasil			
						Jalan Dalam Kondisi Baik	%	10	
					1 4	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	
						Keluaran			
						Jalan yang dibangun	paket + Dok	3	
						Hasil			
						Jalan Dalam Kota Yang Berkondisi Baik	%	95	
					1 6	Masukan			Batal
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	
						Keluaran			
						DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2015) yang dilaksanakan	paket + dok	3	
						Hasil	%	90%	
					1 7	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp 87.500.000	
						Keluaran			
						Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	paket	1	
						Hasil			
						Saluran dan Trotoar Dalam Kondisi Baik	%	90	
					1 8	Masukan			
					0 Rehabilitasi /				



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	85%	2	Program Sistem Informasi / Data Base Jalan Jembatan	0	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Keluaran			
								Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum direvitalisasi	Paket	0	
								Hasil			
								Lampu PJU sesuai standar	%	0,0	
								Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp 3.300.000.000	
								Keluaran			
								Rekening Listrik PJU yang dibayar	Bulan	12	
								Hasil			
								Lampu PJU yang Berfungsi	%	99,0	
								Masukan			Batal
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp -	
								Keluaran			
								Data Base jalan dan jembatan berbasis GIS	Kawasan	0	
								Hasil			
								Program pembangunan jalan sesuai kondisi ril	%	0	
								Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp -	Batal
								Keluaran			
								Panjang Jalan Dalam Kota yang Dilaksanakan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin	Kawasan	0	
								Hasil			
								menjaga kelancaran arus lalu lintas	%	0	
2	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yang terkena dampak genangan / banjir	85%	2	Program Pengendalian Banjir	0	Peningkatan PePeningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp 344.638.185	
								Keluaran			
								Panjang pengerukan Sungai / Kali	M'	2000	
								Hasil			
								Mengurangi titik genangan air	80%	80	
								Masukan			
								- SDM	org		
								- DANA	Rp.	Rp 299.989.725	Batal
0	Pembuatan Sumur Resapan							Keluaran			



3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	98%	26	Program Pengembangan Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	01	Normalisasi Sungai	Jumlah Sumur Resapan yang dibangun	Unit	1	
				Hasil							
				Berkurangnya titik genangan air	%	80,0					
				Masukan							
				- SDM	org						
				- DANA	Rp.	Rp 550.787.660	Batal				
				Keluaran							
				Panjang Sungai yang dinormalisasi	M'	300					
				Hasil							
				Cakupan layanan air bersih perpipaan	%	80					
				Masukan							
				- SDM	org						
				- DANA	Rp.	Rp -	Batal				
				Keluaran							
				Pekerjaan Pemasangan Dam Bangunan	Paket	0					
				Hasil							
				Berkurangnya titik potensial longsor	%	0					
				Masukan							
				- SDM	org						
				- DANA	Rp.	Rp 2.458.199.650					
				Keluaran							
				Panjang Pemasangan Batu Bronjong / dam Jalan	Paket + Dok	14					
				Hasil							
				Berkurangnya titik potensial longsor	%	70					
				Masukan							
				- SDM	org						
				- DANA	Rp.	Rp 287.862.675					
				Keluaran							
				Jumlah Saluran Irigasi dan Pintu Air yang dibangun	Unit	3					
				Hasil							
				Luas areal pertanian yang diairi	%	65					
				Masukan							
				- SDM	org						
				- DANA	Rp.	Rp 479.985.125					
				Keluaran							
				Panjang Saluran Irigasi yang direhab / peningkatan	M'	1000					
				Hasil							
				Luas areal pertanian yang diairi	%	65					



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

4	Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	3	1	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	03	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (sisa DAK 2010 - 2015)				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 735.499.823	Batal		
							Keluaran					
							Panjang Irigasi yang dibangun	Paket	1			
							Hasil					
							Peningkatan luas areal pertanian yag diairi	%	65			
							06	Saluran Irigasi yang Direhabilitasi dan dibangun				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 3.896.000.000	Batal		
							Keluaran					
							Saluran irigasi yang di rehabilitasi dan dibangun	M + Bendung	2845			
							Hasil					
							Luas Areal pertanian yang diairi	%	65	Batal		
							07	Perencanaaan DAK reguler Bidang Irigasi 2018				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 100.000.000			
							Keluaran					
							Saluran irigasi yang di rehabilitasi dan dibangun	Paket	2			
							Hasil					
							Luas Areal pertanian yang diairi	%	65			
							01	Event-event Daerah dan Nasional				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 99.964.400			
							Keluaran					
							Prasarana penunjang even daerah dan Nasional	Event	5			
							Hasil					
							Event-event Daerah dan nasional dapat berjalan dengan baik	%	80,0			
							02	Pembangunan Kantor Lurah				
							Masukan					
							- SDM	org				
							- DANA	Rp.	Rp 5.221.254.740			
Keluaran												
Jumlah Kantor Lurah yang dibangun	Unit	7										
Hasil												
Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100,0										
03	Rehab Kantor											
Masukan												



					Lurah	- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 841.496.000	
						Keluaran			
						Kantor Lurah yang direhab	Paket + Dokumen	3 Paket - 6 Dokumen	
						Hasil			
						Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100,0	
				0	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 149.599.610	Batal
						Keluaran			
						Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	Dokumen	2	
						Hasil			
						Tersedianya Kantor DPRD yang representatif	%	40,0	
				3	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 5.712.024.425	
						Keluaran			
						Rumah Dinas yang dibangun kembali	Paket + Dokumen + Maket	1	
						Hasil			
						Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100,0	
				3	Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 2.583.521.535	
						Keluaran			
						Rumah Dinas yang dikembangkan	Unit	1	
						Hasil			
						Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100,0	
				3	Rehab Gedung Parkir Eks. Gloria	Masukan			
						- SDM	org		
						- DANA	Rp.	Rp. 2.227.118.950	
						Keluaran			
						Gedug Parkir yang direhab	Unit	1	
						Hasil			
						Tersedinya Gedung Parkir yang representatif	%	100,0	
				3	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan	Masukan			
						- SDM	org		



6	Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	3 2	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Pacuan Kuda Bukit Ambacang	0 1	Operasional Perda Bangunan Gedung				
									- DANA	Rp.	Rp 210.000.000	
									Keluaran			
									Gedug Parkir yang direhab	M	200	
									Hasil			
									Tersedinya Gedung Parkir yang representatif	%	80,0	
									Masukan			
									- SDM	org		
									- DANA	Rp.	Rp 143.893.235	Batal
									Keluaran			
									Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	9 kali sidang, 18 SLF	9	
									Hasil			
									Bangunan Gedung sesuai SLF	%	10	
									Masukan			
									- SDM	org		
									- DANA	Rp.	Rp 149.523.930	Batal
									Keluaran			
									Jumlah Ranperda tersusun	Ranperda	1	
									Hasil			
									Pembangunan non Bangunan Gedung sesuai aturan	%	100,0	
									Masukan			
									- SDM	org		
									- DANA	Rp.	Rp 115.809.775	
									Keluaran			
									Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Lokakarya	2	
Hasil												
Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	20,0										
Masukan												
- SDM	org											
- DANA	Rp.	Rp 436.000.000										
Keluaran												
Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Lokakarya	300										
Hasil												
Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	65,0										



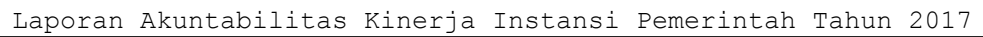
					1 2	Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 63.000.000	
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Spam	1	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	65,0	
					1 7	Pembangunan / Peningkatan SPAM Regional	Masukan			
							- SDM	org		Batal
							- DANA	Rp.	Rp -	
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Lokakarya	0	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	0,0	
					1 8	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010 - 2015)	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 3.253.602.500	Batal
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Paket	1	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	65,0	
					2 8	Pembuatan Sumur Bor	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	Batal
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Paket + Dok	3	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	77,6	
					2 9	Infrastruktur Senilai Perkotaan (DAK 2010 - 2015)	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 4.879.539.424	Batal
							Keluaran			



Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaan yang layak	40%	16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	30	Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	MCK ++ yang dibangun	1	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	55,0	
							Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 220.321.600	Batal
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	KM	180,17	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	100,0	
							Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 424.000.000	
							Keluaran			
							Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Paket + Dok	2	
							Hasil			
							Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	55,0	
					01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 5.524.976.795	
							Keluaran			
							Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dibangun	Paket + Dok	18 + 2	
							Hasil			
							Berkurangnya titik genangan air	%	80	
					02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Masukan			
							- SDM	org		
							- DANA	Rp.	Rp 235.477.685	
							Keluaran			
							Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara	M'	5700	
							Hasil			
							Berkurangnya titik genangan air	%	80	
					03	Peningkatan Drainase	Masukan			
							- SDM	org		



						- DANA	Rp.	Rp 1.998.381.425	
						Keluaran			
						Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang ditingkatkan	Km	1.200	
						Hasil			
						Berkurangnya titik genangan air	%	80	
Urusan Wajib Penataan Ruang									
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	65%	3 6	Program Perencanaan Tata Ruang	0 3	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Masukan		
Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang					0 3	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 400.037.830
							Keluaran		
							Terlaksananya Pendampingan Penyusunan dokumen RDTR	Dokumen	1
							Hasil		
							Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90,0
					0 5	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 30.000.000
							Keluaran		
							Tersedianya Peta Tata Ruang	Unit Peta	4
							Hasil		
							Presentase ketersediaan informasi penataan ruang	%	65,0
					0 6	Pengadaan Bangunan	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 329.968.300
							Keluaran		
							Terlaksananya Pengadaan Bangunan	Dokumen	1
							Hasil		
							Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90,0
					0 7	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 250.000.000
							Keluaran		
							Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Jenis	12
							Hasil		
							Presentase ketersediaan informasi penataan ruang	%	90,0
					1 0	RTBL Kawasan Strategis	Masukan		
							- SDM	org	
							- DANA	Rp.	Rp 441.498.450
							Keluaran		



LAMPIRAN



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

					Presentase kawasan yang sesuai dengan tata ruang	%	90,0	
				03	Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas lereng / tebing	Masukan		
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 75.000.000	
					Keluaran			
					Jumlah Bilboard yang dibuat	Buah	15	
					Hasil			
					Presentase kawasan lereng / tebing yang dibangun	%	80,0	
Urusan Pertanahan								
1	Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	50%	01	Program Penataan, Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan	01	Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	
						Masukan		
						- SDM	org	
						- DANA	Rp.	Rp 221.710.950
						Keluaran		
						Jumlah Sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan	Sertifikat	5
						Hasil		
						Presentase tanah aset pemerintah bersertifikat	%	90,0
				03	Pengadaan Tanah untuk jalan	Masukan		
						- SDM	org	
						- DANA	Rp.	Rp 33.089.293
						Keluaran		
						Tersedianya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	Paket	0
						Hasil		
						Presentase pemenuhan tanah untuk akses jalan	%	95,0
				04	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan pemerintah Kota Bukittinggi	Masukan		
						- SDM	org	
						- DANA	Rp.	Rp 3.499.839.625
						Keluaran		
						Tersedianya tanah untuk kepentingan Pemko Bukittinggi	Paket	1
						Hasil		
						Presentase pemenuhan tanah untuk pemko	%	90,0
	Selesaiannya konflik-konflik pertanahan	Presentase konflik	35%	17	Program Penyelesaian	01	Kegiatan Penyelesaian	Masukan



pemerintah daerah	pertanahan pemerintah daerah diselesaikan		n Konflik-konflik Pertanahan	n Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 387.286.390	
					Keluaran			
					Masalah tanah konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	Tahun	1	
					Hasil			
					Presentase tanah aset pemerintah bersertifikat	%	90,0	
					Masukan			
					- SDM	org		
					- DANA	Rp.	Rp 25.821.030	
					Keluaran			
					Arsip Elektronik	Bundel Arsip	100	
					Hasil			
					Presentase aset tanah dalam bentuk elektronik	%	90,0	



PKK

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi

Program	KEGIATAN			Rencana Tingkat Capaian (Target)	REALISASI	PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KET
	URAIAN	Indikator Kinerja	Satuan				
4							
2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan				Rp 690.000.000	Rp 230.018.646	33%	Serapan Dana
				100	41	41%	Dari Masukan
				100	67	67%	Dari Keluaran
	01 Pengadaan Alat Berat	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 430.000.000	Rp 41.100.000	10%	
		Keluaran					
		Jumlah Pengadaan Alat Berat	Jenis	3	1	33%	
		Hasil					
		Aat berat yang diadakan dapat membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	100	9,56	10%	Dari Masukan
			%	100	33,33	33%	Dari Keluaran
	02 Pemeliharaan Alat Berat	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 260.000.000	Rp 188.918.646	73%	
		Keluaran					
		Jumlah pemeliharaan Alat Berat	Jenis	10	10	100%	
		Hasil					
		Alat Berat yang dipelihara dapat melancarkan pelaksanaan pekerjaan ke PU an	%	100	72,66	73%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
1 5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				Rp 33.480.162.384	Rp 25.597.737.850	76%	Serapan Dana
				89,32	40,22	45%	Dari Masukan
				89,32	59,81	67%	Dari Keluaran
	01 Peningkatan Trotoar	Masukan					



		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 5.999.319.400	Rp. 5.455.562.400	91%	
		Keluaran					
		Jumlah Trotoar yang ditingkatkan	Ruas	10	10	100%	
		Hasil					
		Trotoar Yang berkondisi baik dan sesuai standar	%	87,5	79,57	91%	Dari Masukan
			%	87,5	87,5	100%	Dari Keluaran
02	Pembangunan Trotoar						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 1.910.698.000	Rp. 1.307.171.000	68%	
		Keluaran					
		Panjang Trotoar yang dibangun	Ruas	6	5	83%	
		Hasil					
		Trotoar yang berkondisi baik dan sesuai standar	88%	87,5	59,86	68%	Dari Masukan
			88%	87,5	73	83%	Dari Keluaran
03	Peningkatan Jalan Dalam Kota						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 5.424.963.950	Rp. 4.484.083.450	83%	
		Keluaran					
		Panjang Jalan yang ditingkatkan	KM	2,2	2,2	100%	
		Hasil					
		Jalan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	87,5	72,32	83%	Dari Masukan
			%	87,5	87,5	100%	Dari Keluaran
05	Pembangunan Jembatan						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 849.971.725	Rp. 217.631.000	26%	
		Keluaran					
		Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	1	1	100%	
		Hasil					
		Jembatan dalam Kota dalam Kondisi Baik	%	87,5	22,40	26%	Dari Masukan
			%	87,5	87,50	100%	Dari Keluaran
06	Pembangunan Box Culvert						
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp. 699.060.000	Rp. -	0%	Batal



		Keluaran					
		Jumlah Box Culvert yang dibangun	paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Berkurangnya titik genangan air	%	80	0,00	0%	Dari Masukan
			%	80	0,00	0%	Dari Keluaran
09	DAK Penugasan Bidang Jalan (Sisa DAK 2010 - 2015)	Masukan					
	- SDM	org					
	- DANA	Rp.	Rp	995.649.309	Rp	0%	Batal
		Keluaran					
		Panjang Jalan yang diaspal	M	800	0	0%	
		Hasil					
		Jalan dalam kondisi baik	%	90	0,00	0%	Dari Masukan
			%	90	0,00	0%	Dari Keluaran
12	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektifitas DAK 2017)	Masukan					
	- SDM	org					
	- DANA	Rp.	Rp	16.863.000.000	Rp	83%	
		Keluaran					
		Panjang Jalan yang diaspal ulang	Km	12,22	12,22	100%	
		Hasil					
		Ruas Jalan dalam Kondisi Baik	%	87,5	72,29	83%	Dari Masukan
			%	87,5	87,50	100%	Dari Keluaran
13	Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DA 2018)	Masukan					
	- SDM	org					
	- DANA	Rp.	Rp	250.000.000	Rp	20%	
		Keluaran					
		Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK 2018)	dok	2	1	50%	
		Hasil					



		Jalan Dalam Kondisi Baik	%	100	19,98	20%	Dari Masukan
			%	100	50,00	50%	Dari Keluaran
14	Pembangunan Jalan Konsolidasi By.Pass Kelurahan Pulai Anak Air	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA		Rp 200.000.000	Rp 73.004.000	37%	sesuai dengan kondisi lahan
		Keluaran					
		Jalan yang dibangun	Paket +dok	3	3	100%	
		Hasil					
		Jalan Dalam Kota Yang Berkondisi Baik	%	95	34,68	37%	Dari Masukan
			%	95	95,00	100%	Dari Keluaran
16	Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By.Pass Jln. Teja Sukmana	Masukan					Batal
		- SDM	org				
		- DANA		Rp 200.000.000	Rp -	0%	
		Keluaran					
		DAK Bidang Infrastruktur Jalan (Sisa DAK 2015) yang dilaksanakan	paket + Dok	3	0	0%	
		Hasil					
		Jalan Dalam Kota dalam kondisi baik	%	90	0,00	0%	Dari Masukan
			%	90	0,00	0%	Dari Keluaran
17	Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA		Rp 87.500.000	Rp 79.063.000	90%	
		Keluaran					
		Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By.Pass Surau Gadang	paket	1	1	100%	
		Hasil					



		Saluran dan Trotoar Dalam Kondisi Baik	%	90	81,32	90%	Dari Masukan
			%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
1 8	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan			Rp 1.376.636.690	Rp 636.450.907	46%	Serapan Dana
				88	41	47%	Dari Masukan
				88	69	78%	Dari Keluaran
		01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 532.812.320	Rp 286.174.012	54%
			Keluaran				
			Pekerjaan Pemeliharaan jalan dalam kota	Bulan	12	12	100%
			Hasil				
			jalan dalam kondisi baik	%	87,5	47,00	54%
				%	87,5	88	100%
		02 Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 443.875.360	Rp 43.542.415	10%
			Keluaran				
			Jembatan dalam kota yang direhabilitasi / dipelihara	Unit	31	11	35%
			Hasil				
			Jembatan dalam kota dalam kondisi baik	%	87,5	8,58	10%
				%	87,5	31,05	35%
		03 Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 399.949.010	Rp 306.734.480	77%
			Keluaran				
			Pekerjaan Pemeliharaan trotoar dalam kota	Bulan	12	12	100%
			Hasil				
			Trotoar dalam kondisi baik sesuai standar	%	87,5	67,11	77%
				%	87,5	87,50	100%
3 3	Program Pengelolaan Penerangan Lampu Jalan			Rp 4.300.399.780	Rp 2.671.082.108	62%	Serapan Dana
				94	64	68%	Dari Masukan
				94	94	100%	Dari Keluaran
		01 Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 399.999.940	Rp 319.139.715	80%



2	Program Sistik Informasi / Data Base Jalan Jembatan	Keluaran					
		Pekerjaan pemeliharaan lampu PJU	Bulan	12	12	100%	
		Hasil					
		Lampu Jalan dalam kondisi baik	%	95	75,80	80%	Dari Masukan
			%	95	95,00	100%	Dari Keluaran
		02 Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 600.399.840	Rp 399.600.000	67%	
		Keluaran					
		Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah	Paket	5	5	100%	
		Hasil					
		Luas wilayah kota yang tersedia penarangan jalan umum	%	87,5	58,24	67%	Dari Masukan
			%	87,5	87,50	100%	Dari Keluaran
		03 Revitalisasi Penerangan Jalan Umum					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah jaringan penerangan jalan umum direvitalisasi	Paket	0	0	0%	
		Hasil					
		Lampu PJU sesuai standar	%	0	0,00	0%	Dari Masukan
			%	0	0,00	0%	Dari Keluaran
		04 Pembayaran Listrik Rekening PJU					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 3.300.000.000	Rp 1.952.342.393	59%	
		Keluaran					
		Rekening Listrik PJU yang dibayar	Rekening	12	12	100%	
		Hasil					
		Lampu PJU berfungsi	%	100	59,16	59%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
				Rp 124.600.000	Rp -	0%	Serapan Dana
				100	0	0%	Dari Masukan
				100	0	0%	Dari Keluaran
		03 Database Jalan dan Jembatan Berbasis GIS					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

		Data Base jalan dan jembatan berbasis GIS	KM	0	0	0,00%	
		Hasil					
		Program pembangunan jalan sesuai kondisi ril	%	0	0,00	0,00%	Dari Masukan
			%	0	0,00	0,00%	Dari Keluaran
04	Penyediaan sarana Pengelolaan Peta GIS dan Data Base Kondisi Jalan Kota Bukittinggi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 124.600.000	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Panjang Jalan Dalam Kota yang Dilaksanakan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin	Unit	0	0	0%	
		Hasil					
		menjaga kelancaran arus lalu lintas	%	100	0	0%	Dari Masukan
			%	100	0	0%	Dari Keluaran
2	Program Pengendalian Banjir			Rp 644.628.110	Rp 153.440.000	24%	Serapan Dana
8				80	18	22%	Dari Masukan
				80	18	22%	Dari Keluaran
01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 344.638.385	Rp 153.440.000	45%	
		Keluaran					
		Panjang pengerukan Sungai / Kali	M'	2000	890	45%	
		Hasil					
		Mengurangi titik genangan air	%	80	35,62	45%	Dari Masukan
			%	80	35,60	45%	Dari Keluaran
02	Pembuatan Sumur Resapan	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 299.989.725	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah sumur resapan yang dibangun	Unit	1	0	0%	
		Hasil					
		Berkurangnya titik genangan air	%	80	0,00	0%	Dari Masukan
			%	80	0,00	0%	Dari Keluaran
2	Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			Rp 550.787.660	Rp -	0%	Serapan Dana
6				80	0	0%	Dari Masukan
				80	0	0%	Dari Keluaran
01	Normalisasi	Masukan					



1 7	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Sungai	- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 550.787.660	Rp -	0%	Batal
			Keluaran					
			Panjang sungai yang dinormalisasi	M'	300	0	0%	
			Hasil					
			Mengurangi titik genangan air	%	80	0,00	0%	Dari Masukan
				%	80	0,00	0%	Dari Keluaran
					Rp 2.458.199.650	Rp 1.820.986.000	74%	Serapan Dana
					70	52	74%	Dari Masukan
					70	35	50%	Dari Keluaran
		01	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Bangunan	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	Batal
			Keluaran					
			Pekerjaan Pemasangan Dam Bangunan	Paket	0	0	0,00%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik potensial longsor	%	0	0	0,00%	Dari Masukan
				%	0	0	0,00%	Dari Keluaran
		02	Pemasangan Batu Bronjong / Dam Jalan	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 2.458.199.650	Rp 1.820.986.000	74%	
			Keluaran					
2 4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Panjang Pemasangan Batu Bronjong / dam Jalan	Paket	6	3	50%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik potensial longsor	%	70	51,85	74%	Dari Masukan
				%	70	35,00	50%	Dari Keluaran
					Rp 5.499.347.623	Rp 1.288.239.000	23%	Serapan Dana
					65	9	13%	Dari Masukan
					65	11	17%	Dari Keluaran
		01	Pembangunan Saluran Irigasi	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 287.862.675	Rp 84.273.000	29%	Realisasi hanya untuknpe rencanaan DAK 2017
			Keluaran					
			Jumlah Saluran Irigasi dan Pintu Air yang	Unit	3	2	67%	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017

		dibangun					
		Hasil					
		Luas areal pertanian yang diairi	%	65	19,03	29%	Dari Masukan
			%	65	43,33	67%	Dari Keluaran
02	Rehab Peningkatan Jaringan Irigasi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 479.985.125	Rp 35.897.000	7%	
		Keluaran					
		Panjang Saluran irigasi yang direhab / peningkatan	M'	1000	40	4%	
		Hasil					
		Luas areal pertanian yang diairi	%	65	4,86	7%	Dari Masukan
			%	65	2,60	4%	Dari Keluaran
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 735.499.823	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Panjang irigasi yang dibangun	Paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Peningkatan luas areal pertanian yang diairi	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
06	Saluran irigasi yang direhabilitasi da dibangun	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 3.896.000.000	Rp 1.168.069.000	30%	
		Keluaran					
		Saluran irigasi yang direhabilitasi dan dibangun	M + Bend ung	2845	450	16%	
		Hasil					
		Luas areal pertanian yang diairi	%	65	19,49	30%	Dari Masukan
			%	65	10,28	16%	Dari Keluaran
07	Perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 100.000.000	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Dokumen perencanaan DAK Reguler Bidang Irigasi 2018	Paket	2	0	0%	
		Hasil					
		Peningkatan luas areal pertanian yang diairi	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran



3 1	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasayarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum				Rp 17.044.979.660	Rp 15.094.256.835	89%	Serapan Dana
					88	64	74%	Dari Masukan
					88	71	82%	Dari Keluaran
	01	Event-event Daerah dan Nasional	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 99.964.400	Rp 12.018.250	12%	
			Keluaran					
			Prasarana penunjang even daerah dan ansional	Event	5	1	20%	
			Hasil					
			Event-event Daerah dan nasional dapat berjalan dengan baik	%	80	9,62	12%	Dari Masukan
				%	80	16,00	20%	Dari Keluaran
	02	Pembangunan Kantor Lurah	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 5.221.254.740	Rp 4.419.470.615	85%	
			Keluaran					
			Jumlah Kantor Lurah yang dibangun	Unit	8	8	100%	
			Hasil					
			Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100	84,64	85%	Dari Masukan
				%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
	03	Rehab Kantor Lurah	Masukan					
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 841.496.000	Rp 775.480.000	92%	
			Keluaran					
			Kantor Lurah yang direhab	Unit	4	3	75%	
			Hasil					
			Tersedianya Kantor Lurah yang representatif	%	100	92,15	92%	Dari Masukan
			%	100	75,00	75%	Dari Keluaran	
05	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Masukan						
		- SDM	org					
		- DANA	Rp.	Rp 149.599.610	Rp -	0%	Batal	
		Keluaran						
		Terlaksananya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi	Unit	1	0	0%		
		Hasil						
		Tersedianya Kantor DPRD yang representatif	%	40	0,00	0%	Dari Masukan	
		%	40	0,00	0%	Dari Keluaran		



32	Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 5.712.024.425	Rp 5.187.926.220	91%	
		Keluaran					
		Rumah Dinas yang dibangun kembali	Paket + Dokumen + Make t	1	1	100%	
		Hasil					
		Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100	90,82	91%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 2.583.521.535	Rp 2.502.075.625	97%	
		Keluaran					
		Rumah Dinas yang dikembangkan	Unit	1	1	100%	
		Hasil					
		Tersedianya rumah dinas yang representatif	%	100	96,85	97%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 2.227.118.950	Rp 2.069.836.125	93%	
		Keluaran					
		Gedung yang parkir direhab	Unit	1	1	100%	
		Hasil					
		Tersedianya Gedung Parkir yang representatif	%	100	92,94	93%	Dari Masukan
			%	100	100,00	100%	Dari Keluaran
36	Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 210.000.000	Rp 127.450.000	61%	
		Keluaran					
		Panjang Pagar Lintasan Pacuan Kuda	M	200	200	100%	
		Hasil					
		Pemenuhan Sarana prasarana kota yang representatif	%	80	48,55	61%	Dari Masukan
			%	80	80,00	100%	Dari Keluaran
32	Program Pengelolaan Pembangunan Gedung			Rp 293.417.165	Rp -	0%	Serapan Dana
				55	0	0%	Dari Masukan



				55	0	0%	Dari Keluaran
01	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 143.893.235	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	9 kali Sidan g. 18 SLF	9	0	0%	
		Hasil					
		Bangunan Gedung sesuai SLF	%	10	0,00	0%	Dari Masukan
			%	10	0,00	0%	Dari Keluaran
02	Penyusunan Perda	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 149.523.930	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Jumlah Ranperda tersusun	Ranperda	1	0	0%	
		Hasil					
		Pembangunan non bangunan gedung sesuai aturan	%	100	0,00	0%	Dari Masukan
			%	100	0,00	0%	Dari Keluaran
3	Program			Rp 115.809.775	Rp 21.477.705	19%	Serapan Dana
4	Pengaturan Jasa Konstruksi			20	3,71	19%	Dari Masukan
				20	20	100%	Dari Keluaran
	03 Pembinaan Jasa Konstruksi	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 115.809.775	Rp 21.477.705	19%	
		Keluaran					
		Kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Loka karya	2	2	100%	
		Hasil					
		Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai aturan	%	20	3,71	19%	Dari Masukan
			%	20	20	100%	Dari Keluaran
2	Program			Rp 9.476.463.524	Rp 428.662.000	5%	Serapan Dana
7	Pengembangan, Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			65	8	12%	Dari Masukan
				65	7	11%	Dari Keluaran
	11 Pemipaan (SR)) Masyarakat	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 436.000.000	Rp -	0%	Batal



		Keluaran					
		Pemipaan SR Masyarakat	SR	300	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan layanan air bersih perpipaan	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
12	Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 63.000.000	Rp 4.978.000	8%	
		Keluaran					
		Operasi dan pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Spam	1	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan air bersih perpipaan	%	65	5,14	8%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
17	Pembangunan / Peningkatan SPAM Regional	Masukan					
		- SDM	org				Batal
		- DANA	Rp.	Rp -	Rp -	0%	
		Keluaran					
		Jumlah SPAM yang dibangun	Unit	0	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan air bersih non perpipaan	%	0	0,00	0%	Dari Masukan
			%	0	0,00	0%	Dari Keluaran
18	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Sisa DAK 2010 - 2015)	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 3.253.602.500	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Infrastruktur Air Minum	Paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Cakupan Layanan Air Bersih	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
			%	65	0,00	0%	Dari Keluaran
28	Pembuatan Sumur Bor	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 200.000.000	Rp -	0%	Batal
		Keluaran					
		Terlaksananya pembuatan sumur bor	Paket + Dok	3	0	0%	
		Hasil					



		Cakupan Layanan air bersih non perpipaan	%	77,6	0,00	0%	Dari Masukan
				77,6	0,00	0%	Dari Keluaran
	29	Infrastruktur Sanitasi Perkotaan (DAK 2010 - 2015)	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 4.879.539.424	Rp -	0%
		Keluaran					Batal
		Tersedianya infrastruktur perkotaan	MCK ++ yang diban gun	1	0	0%	
		Hasil					
		Pemenuhan Sanitasi yang layak	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
				65	0,00	0%	Dari Keluaran
	30	Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 220.321.600	Rp -	0%
		Keluaran					Batal
		Panjang Jalan Dalam Kota yang DilaksanakanReh abilitasi/Pemelih aaraan Rutin	KM	180,17	0	0%	
		Hasil					
		menjaga kelancaran arus lalu lintas	%	65	0,00	0%	Dari Masukan
				65	0,00	0%	Dari Keluaran
	31	Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 424.000.000	Rp 423.684.000	100%
		Keluaran					
		Lanjutan pembangunan Toilet Umum / Kawasan Wisata Ngarai Maaram dan Benteng Fort de Kock	Paket + Dok	2	2	100%	
		Hasil					
		Terpenuhinya Kebutuhan Toilet Umum yang representatif	100 %	50	49,96	100%	Dari Masukan
				50	50,00	100%	Dari Keluaran
	1 6	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong		Rp 7.758.835.905	Rp 6.442.698.500	83%	Serapan Dana
				80	52	65%	Dari Masukan
				80	51	64%	Dari Keluaran
	01	Pembangunan Saluran Drainase /	Masukan				
		- SDM	org				



3 6	Program Perencanaan Tata Ruang	Gorong-gorong	- DANA	Rp.	Rp 5.524.976.795	Rp 4.581.798.000	83%	
			Keluaran					
			Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dibangun	Paket + Dok	18	16	89%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik genangan air	%	80	66,34	83%	Dari Masukan
				%	80	71,11	89%	Dari Keluaran
		02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 235.477.685	Rp 51.247.500	22%	
			Keluaran					
			Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang dipelihara	M'	5700	130	2%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik genangan air	%	80	17,41	22%	Dari Masukan
				%	80	1,82	2%	Dari Keluaran
		03	Peningkatan Drainase	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 1.998.381.425	Rp 1.809.653.000	91%	
			Keluaran					
			Panjang Saluran Drainase / Gorong-gorong yang ditingkatkan	KM	1200	1200	100%	
			Hasil					
			Berkurangnya titik genangan air	%	80	72,44	91%	Dari Masukan
				%	80	80,00	100%	Dari Keluaran
					Rp 1.585.679.245	Rp 1.196.016.410	75%	Serapan Dana
					85	51	60%	Dari Masukan
					85	60	70%	Dari Keluaran
		03	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Masukan				
			- SDM	org				
			- DANA	Rp.	Rp 400.037.830	Rp 202.538.730	51%	
			Keluaran					
			Terlaksananya Pendampingan Penyusunan dokumen RDTR	Doku men	1	1	100%	
			Hasil					
			Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata	%	90	45,57	51%	Dari Masukan
				%	90	90,00	100%	Dari Keluaran



ruang						
05	Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 30.000.000	Rp -	0%	Batal
	Keluaran					
	Tersedianya Peta Tata Ruang	Unit Peta	4	0	0%	
	Hasil					
	Presentase ketersediaan informasi penataan ruang	%	95	0,00	0%	Dari Masukan
		%	95	0,00	0%	Dari Keluaran
06	Pendataan Bangunan	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 329.968.300	Rp 325.650.900	99%	
	Keluaran					
	Terlaksananya Penndataan Bangunan	Doku men	1	1	100%	
	Hasil					
	Presentase kawsaan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	88,82	99%	Dari Masukan
		%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
07	Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 250.000.000	Rp 224.087.710	90%	
	Keluaran					
	Terlaksananya Pengadaan Kelengkapan Studio Tata Ruang	Jenis	12	12	100%	
	Hasil					
	Presentase ketersediaan informasi penataan ruang	%	90	80,67	90%	Dari Masukan
		%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
10	RTBL Kawasan Strategis	Masukan				
	- SDM	org				
	- DANA	Rp.	Rp 441.498.450	Rp 390.190.870	88%	
	Keluaran					
	Jumlah dokumen RTBL Kawasan Strategis yang tersusun	Doku men	1	1	100%	
	Hasil					
	Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	79,54	88%	Dari Masukan
		%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
13	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Masukan				
	- SDM	org				



		- DANA	Rp.	Rp 49.158.610	Rp 26.829.300	55%	
		Keluaran					
		Terlaksananya Pembuatan Keterangan rencana Kota Hasil	KRK	350	218	62%	
		Presentase Kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	49,12	55%	Dari Masukan
			%	90	56,06	62%	Dari Keluaran
	14	Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak					
		Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 85.016.055	Rp 26.718.900	31%	
		Keluaran					
		Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang terkena pelepasan hak Hasil	Sertif ikat	60	3	5%	
		Presentase pelepasan tanah hak milik untuk fasilitas umum	%	50	15,71	31%	Dari Masukan
			%	50	2,50	5%	Dari Keluaran
3 7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Rp 297.225.875	Rp 230.151.450	77%	Serapan Dana
				87	64	74%	Dari Masukan
				87	87	100%	Dari Keluaran
		01	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan				
			Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 146.681.575	Rp 136.146.950	93%
			Keluaran				
			Jumlah Razia Bangunan Hasil	Tahu n	1	1	100%
			Presentase kawasan yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	90	83,54	93%
				%	90	90,00	100%
		02	Audit Pemanfaatan Ruang				
			Masukan				
			- SDM	org			
			- DANA	Rp.	Rp 75.544.300	Rp 59.849.500	79%
			Keluaran				
			Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang yang tersusun Hasil	Doku men	1	1	100%
			Presentase kawasan yang	%	90	71,30	79%
							Dari Masukan



		sesuai dengan tata ruang	%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
URUSAN PERTANAHAN	03 Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas lereng / tebing	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 75.000.000	Rp 34.155.000	46%	
		Keluaran					
		Jumlah Billboard yang dibuat	buah	15	15	100%	
		Hasil					
		Presentase kawasan lereng / tebing yang dibangun	%	80	36,43	46%	Dari Masukan
			%	80	80,00	100%	Dari Keluaran
1 6	Program Penataan, Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			Rp 3.754.639.868	Rp 146.546.873	4%	Serapan Dana
				91,67	41,27	45%	Dari Masukan
				91,67	30,00	33%	Dari Keluaran
	01 Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Masukan					
		- SDM	Org				
		- DANA	Rp.	Rp 221.710.950	Rp 68.127.125	31%	
		Keluaran					
		Jumlah Sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan / diterbitkan	Sertifkat	5	5	100%	
		Hasil					
		Presentase tanah aset pemerintah bersertifikat	%	90	27,66	31%	Dari Masukan
			%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
	03 Pengadaan Tanah untuk Jalan	Masukan					
		- SDM	org				
		- DANA	Rp.	Rp 33.089.293	Rp 33.080.593	100%	Fisik Batal
		Keluaran					
		Tersedianya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	paket	1	0	0%	
		Hasil					
		Presentase pemenuhan tanah untuk akses jalan	%	95	94,98	100%	Dari Masukan
			%	95	0,00	0%	Dari Keluaran
	04 Pengadaan Tanah untuk Kepentingan pemerintah	Masukan					
		- SDM	org				



1 7	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Kota Bukittinggi	- DANA	Rp.	Rp 3.499.839.625	Rp 45.339.155	1%	Fisik Batal
			Keluaran					
			Tersedianya tanah untuk kepentingan Pemko Bukittinggi	Paket	2	0	0%	
			Hasil					
			Presentase pemenuhan tanah untuk pemko	%	90	1,17	1%	Dari Masukan
				%	90	0,00	0%	Dari Keluaran
					Rp 387.286.390	Rp 131.996.589	34%	Serapan Dana
					90,00	30,67	34%	Dari Masukan
					90,00	90,00	100%	Dari Keluaran
		1 Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By.Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masukan					
			- SDM	Org				
			- DANA	Rp.	Rp 387.286.390	Rp 131.996.589	34%	
			Keluaran					
			Masalah tanah konsolidasi By.Pass dan Tanah Masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	Tahun	1	1	100%	
			Hasil					
1 8	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		Presentase penyelesaian tanah konsolidasi By.Pass	%	90	30,67	34%	Dari Masukan
				%	90	90,00	100%	Dari Keluaran
					Rp 25.821.030	Rp 19.348.300	75%	Serapan Dana
					90,00	67,44	75%	Dari Masukan
					90,00	90,00	100%	Dari Keluaran
		1 Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Masukan					
			- SDM	Org				
			- DANA	Rp.	Rp 25.821.030	Rp 19.348.300	75%	
			Keluaran					
			Arsip Elektronik	Bundel arsip	400	400	100%	
			Hasil					
			Presentase aset tanah dalam bentuk elektronik	%	90	67,44	75%	Dari Masukan
				%	90	90,00	100%	Dari Keluaran



PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN					
TAHUN 2017					
				FORMULIR : PPS	
Instansi		: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi			
Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Peningkatan Kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	100,00	41,00	41,00%	Dari Masukan
		100,00	67,00	67,00%	Dari Keluaran
2 Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Presentase tingkat jalan dan jembatan	92,75	36,38	39,22%	Dari Masukan
		92,75	55,67	60,02%	Dari Keluaran
3 Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir	Presentase wilayah / titik yag terkena dampak genangan / banjir	76,67	23,22	30,29%	Dari Masukan
		76,67	17,60	22,96%	Dari Keluaran
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Presentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	65,00	8,68	13,35%	Dari Masukan
		65,00	11,24	17,30%	Dari Keluaran
5 Meningkatnya mutu dan umur tehknis bangunan publik / gedung pemerintah	Presentase gedung / bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	71,25	32,22	45,23%	Dari Masukan
		71,25	35,69	50,09%	Dari Keluaran
6 Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	Presentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	20,00	3,71	18,55%	Dari Masukan
		20,00	20,00	100,00%	Dari Keluaran
7 Pemenuhan kebutuhan air bersih	- Presentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	65,00	8,00	12,31%	Dari Masukan
	- Pemenuhan drainase layak	65,00	7,00	10,77%	Dari Keluaran
8 Pemenuhan drainase layak	Presentase drainase perkotaaan yang layak	80,00	52,00	65,00%	Dari Masukan
		80,00	51,00	63,75%	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang					
9 Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	- Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	85,83	57,55	67,05%	Dari Masukan
		85,83	73,23	85,32%	Dari Keluaran
	- Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan				
Urusan Wajib Pertanahan					
10 Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Presentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	90,83	54,35	59,84%	Dari Masukan
		90,83	60,00	66,06%	Dari Keluaran
11 Selesainya Konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	90,00	30,67	34,08%	Dari Masukan
		90,00	90,00	100,00%	Dari Keluaran
TOTAL		76,12	31,62	41,54%	Dari Masukan
		76,12	44,40	58,33%	Dari Keluaran





RENCANA STRATEJIK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 - 2021

SKPD	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI
VISI	:	Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya
MISI	:	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik 3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota 4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan

NO	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
		URAIAN	INDIKATOR			
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	Mengadakan dan melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dibutuhkan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat Kebinamargaan
					Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/ dibeli
					Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara
2	Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	- Melakukan penanganan jalan, jembatan dan irigasi sesuai kewenangan dan tanggung jawab	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik



				Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana-rencana pembangunan jalan, jembatan dan irigasi	Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan
					Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun
					Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan
					Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun
					Rehabilitasi Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab
					Pembangunan Box Culvert	Jumlah box culvert yang dibangun
					Pengecoran bahu/ badan jalan	Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor
					Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jumlah DED yang disusun
					Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jalan 2 jalur yang dibangun
					Perencanaan DAK Jalan	Jumlah perencanaan Dak jalan yang dikerjakan
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan
					Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin



				Melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan PJU serta melakukan pembaharuan dan peremajaan terhadap PJU yang sudah tidak layak	Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	
					Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	
					Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi	
					Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi	
					Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar	
					Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan	
					Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi	
3	Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	3.	Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan /banjir	Persentase wilayah/ titik yang terkena dampak genangan/ banjir	Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir	Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan
						Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali
						Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat
						Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi
						Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi



					Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
					Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana
4	Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan irigasi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis
					Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
					Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan
					Pemeliharaan Rutin Irigasi	Irigasi yang dipelihara
					Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK irigasi yang dikerjakan
5	Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	5. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/ gedung pemerintah	Persentase gedung/ bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	- Melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung / bangunan yang belum memenuhi standar layak huni	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum
					Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun
					Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab
					Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun
					Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah rumah dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali



6					Rehab Gedung Parkir Ex Gloria	Jumlah gedung parkir Ex Gloria yang direhab
					Rehab Balai Pemuda	Jumlah balai pemuda yang direhab
					Rehabilitasi/ Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/ pembangunan kembali Pasar Atas
					Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi
					Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi
					Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
				- Melakukan pelayanan advice planning , IUJK & Jasa Konstruksi	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi
					Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan
					Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ di update
7	Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)	6. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan		Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 tersusun
					Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun
		7. Pemenuhan kebutuhan air bersih	persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	Meningkatkan kapasitas produksi air baku air minum dengan melakukan inovasi terhadap sumber air untuk air minum	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman



				Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibuat
				Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan direvitalisasi
				Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dipelihara
				Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun
				Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi
				Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi
				Pembangunan toilet umum	Jumlah toilet umum yang dibangun
				Pembangunan iPLT dan IPAL	Jumlah IPLT dan IPAL yang dibangun
				Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Jumlah Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat yang terlaksana
				Pemipaan (SR) Masyarakat	Jumlah Pemipaan (SR) Masyarakat
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu
				Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)
				Pamsimas	Terlaksanannya Pamsimas
8	Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak	Melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drianse	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik



					Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun
					Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara
					Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan
					Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
8	Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	9. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuain pemanfaatan ruang kota	- Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan ruang kota sesuai dengan RTRW	Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
				- Melakukan pendataan terhadap bangunan dalam kota	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksanannya Pembuatan Keterangan Rencana Kota
					Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Jumlah Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
					Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun
					Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana
					Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi terlaksana
					Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dilanjutkan
					Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang



					Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksanannya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
					Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	
					RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL kawasan strategis tersusun	
					Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan	
					Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data	Jumlah Arsip dan digitalisasi data tata ruang yang tersusun dan terdata	
					Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Jumlah kawasan Ngarai Sianok yang diidentifikasi dan dipetakan	
					Sistem Informasi Tata ruang	Tersedianya sitem informasi tata ruang	
			Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	Melakukan pendataam terhadap bangunan dalam kota	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap tata ruang	
					Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan pengawasan/ pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan	
					Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah audit pemanfaatan ruang yang disusun	
					Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat	
					Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	Jumlah Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	
9	Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	10	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	Melakukan pengembangan informasi pertanahan dengan membuat arsip elektronik	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan informasi pertanahan



					Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS tanah dan bangunan	
					Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanahan	
					Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah	
					Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	
					Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	
					Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah	
		11	Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki konflik pertanahan dengan pemerintah daerah	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah
						Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan
						Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran adminstrasi perkantoran tiap tahunnya
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar
11	Presentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku			



					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/ koordinasi yang diikuti/ dihadiri
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung



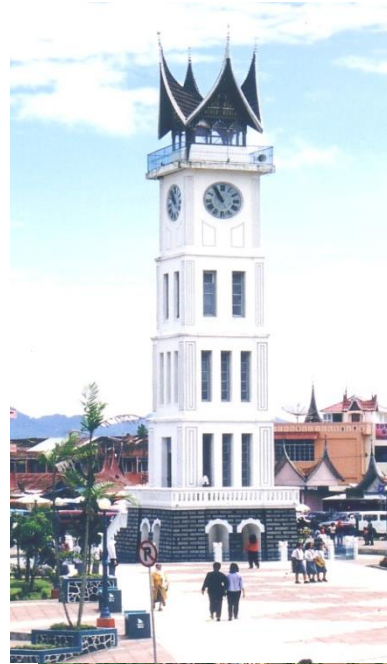
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
					Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
					Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
					Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi







RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM

JL. OMBILIN NO. 169 KELURAHAN BELAKANG BALOK TELP. 22214, FAX 627281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Nomor :

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD (renja SKPD) dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a. diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);



- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- y. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
- z. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
- aa. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2017;
- bb. Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Nomor/DPU-BKT/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
6. Pembangunan Kota Bukittinggi adalah upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2006 – 2025;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2016 – 2021;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahun 2010 – 2015;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016;
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode tahun 2016;



12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD tahun 2016 sebelum disepakati dengan DPRD;
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan SKPD serta, sebagai dasar penyusunan APBD;
14. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
15. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan atau teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa;
17. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
18. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
19. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Kota Bukittinggi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, yang mengacu kepada RKPD Kota Bukittinggi tahun 2017, yang merupakan hasil Musrenbang tahun 2016.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 memuat target kinerja yang terukur baik sasaran maupun pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum, maupun yang dilaksanakan oleh pihak lain.



BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2017

Pasal 5

- (1) Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015 DAN 2016

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

- (2) Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini dan merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

pada tanggal : Mei 2016

Sya'ban 1437 H

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

SYAHRIZAL, ST

NIP. 19611212 198602 1 002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya semata, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 telah dapat diselesaikan sebagai salah satu kewajiban kami selaku kepala SKPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD (renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rencana Kerja (RENJA) ini memuat unsur-unsur evaluasi kinerja serta analisis pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2015 dan perkiraan 2016 serta Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2017 yang bersinergi dengan penyusunan Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2017 serta Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati untuk lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang - saran positif dari berbagai pihak.

Akhirnya, mudah - mudahan Renja ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Bukittinggi, Mei 2016
 Sya'ban 1437 H
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

SYAHRIZAL, ST
Nip. 19611212 198602 1 002



DAFTAR ISI

	Hal.
Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1.1
1.2. Landasan Hukum	1.2
1.3. Maksud dan Tujuan	1.4
1.4. Sistematika Penulisan	1.4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014	2.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010-2015	2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	2.11
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum	2.14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi	2.15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	2.16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016	3.1
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	3.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016	3.2
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016	3.5
BAB IV PENUTUP	4.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD (renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 terjadi beberapa perubahan landasan yuridis yang cukup mendasar diantaranya acuan RPJMD dan Renstra yang berpedoman kepada visi misi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 serta perubahan urusan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang terkait pekerjaan umum, perumahan permukiman dan penataan ruang serta perencanaan pembangunan berubah menjadi pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan permukiman .

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

- **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi serta tetap mengacu kepada rancangan awal RKPD, rancangan Renstra, serta rancangan RPJMD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja.
- **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menselaraskan hasil Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, Kecamatan dan juga kota serta musrenbang Propinsi Sumatera Barat dan juga nasional.
- **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta kebijakan dan program prioritasnya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** dimana hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, Kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan perumusan tujuan dan sasaran untuk melahirkan program dan kegiatan dengan indikator kinerja serta dana indikatif yang mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan pemukiman.

Hasil penyusunan program/kegiatan akan disinkronkan dengan kebijakan prioritas dan program/kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Dinas Prasarana Jalan, Perumahan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi sebagai bentuk sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan nasional.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- r. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11);
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- y. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
- z. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;

- aa. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor ... Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2017;
- bb. Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Nomor/DPU-BKT/2016 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016-2021;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 adalah untuk memberikan gambaran mengenai Kebijakan, Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2017 serta perkiraan maju untuk Tahun 2018.

Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi berdasarkan Renstra Dinas untuk melaksanakan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.
4. Menyediakan informasi dan gambaran pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Penyampaian dokumen Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 mulai dari pengolahan data/ informasi, analisis dan perumusan Program/Kegiatan dalam bentuk dokumen mengacu kepada Lampiran 6 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian rencana kerja (RENJA) dimaksud , disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan.
- BAB II Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD hal-hal dan capaian Renstra DKPD, Analisis Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal SKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang Terdiri dari telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan.
- BAB IV Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010-2015.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pekerjaan umum.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2015 sesuai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2015 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2015

Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Urusan Wajib Pekerjaan Umum					
1 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaringan jalan dan trotoar di dalam sistem transportasi yang mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan kapasitas jalan dalam upaya peningkatan perekonomian/kesejahteraan	Porsentase/panjang jaringan lampu jalan, jalan, dan jembatan serta trotoar yang berkondisi mantap	90,25%	53,08	58,81	Dari Masukan
		90,25%	61,32	67,95	Dari Keluaran
2 Meningkatkan luas dan tingkat layanan jaringan irigasi melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.	Porsentase/Luas jaringan irigasi yang berkondisi mantap.	85%	45,28	53,27	Dari Masukan
		85%	82,88	97,50	Dari Keluaran



Sasaran		Rencana Tingkat Capaian	Realisasi (%)	Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket.	
URAIAN	Indikator Sasaran					
3	Meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung mengurangi luas dan lama genangan.	Porsentase/ panjang drainase, talub/turab/bro njong yang berkondisi mantap.	91,50%	57,24	62,55	Dari Masukan
			91,50%	71,93	78,62	Dari Keluaran
4	Meningkatnya efektifitas gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan dalam upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat	Porsentase/jumlah gedung negara, rumah dinas, bangunan umum dan lingkungan yang berkondisi mantap	97,50%	87,96	90,21	Dari Masukan
			97,50%	97,50	100,00	Dari Keluaran
Urusan Wajib Perumahan						
5	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana berbasiskan masyarakat.	Porsentase/Jumlah infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman	95,83%	56,65	59,12	Dari Masukan
			95,83%	68,30	71,27	Dari Keluaran
Urusan Wajib Penataan Ruang						
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengurangan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan, dengan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW Kota Bukittinggi.	Perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat (perda) RTRW/struktur dan pola ruang Kota Bukittinggi.	96,46%	45,56	47,23	Dari Masukan
			96,46%	66,50	68,95	Dari Keluaran
TOTAL			92,76%	57,63	62,13	* Dari Masukan
			92,76%	74,74	80,57	* Dari Keluaran

Sumber: Hasil Analisis Rata-rata capaian (LKIP 2015)

Dari tabel Capaian kinerja DPU tahun 2015 diatas jika dilihat secara keseluruhan capaian kinerja DPU dari sisi masukan rata-rata hanya sebesar 62,13% dengan predikat kurang baik, namun jika dilihat dari sisi keluaran kegiatan capaian kinerja DPU tahun 2015 mencapai 80,57 % dengan predikat sedang. Secara umum rendahnya realisasi kegiatan dan keuangan disebabkan oleh



banyaknya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di Perubahan APBD seperti lokasi yang tidak bebas, lokasi berada di fasilitas umum, dan beberapa kegiatan juga gagal lelang karena tidak adanya penawaran terhadap kegiatan tersebut.

Secara rinci pencapaian sasaran masing-masing urusan ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan tingkat pencapaian indikator output masing-masing kegiatan. Capaian kinerja pada tingkat program dan kegiatan untuk Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAH AN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1				2	3	4	5	6	7
C				BELANJA LANGSUNG					
1	03			URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM					
1	'03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	'03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat yang dikelola satu Tahun	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 rekening Telpon, 36 Rekening Listrik dan 12 rekening Air, Rekening PJU	12 rekening Telpon, 36 Rekening Listrik dan 12 rekening Air, Rekening PJU	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Truk 6 Unit, Minibus 3 Unit, Pick Up 7 Unit, Skead Loader 2 Unit, Beckhoe Loader 1 Unit, Baby Roller 2 Unit, Mesin Gilas 6 ton 1 Unit, stamper 2 unit, Sepeda Motor 19 Unit	Truk 6 Unit, Minibus 3 Unit, Pick Up 7 Unit, Skead Loader 2 Unit, Beckhoe Loader 1 Unit, Baby Roller 2 Unit, Mesin Gilas 6 ton 1 Unit, stamper 2 unit, Sepeda Motor 19 Unit	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan pembersih	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpelihara Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1Komputer 14 Unit, Lap Top 14 unit, Mesin Tik 8 Unit, Printer 16 unit, Infokus 1 unit, Kamera 5 unit, Ac 1 Unit	1Komputer 14 Unit, Lap Top 14 unit, Mesin Tik 8 Unit, Printer 16 unit, Infokus 1 unit, Kamera 5 unit, Ac 1 Unit	100%	
1	'03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan



KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Makanan dan Minuman	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1 '03 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi, dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	Tersedianya Biaya perjalanan Dinas Rapat-Rapat Koordinasi, konsultasi, Sosialisasi, Keluar Kota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1 '03 01 21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Tersedianya Jasa Pegawai Non PNS	1 Paket	1 Paket	100%	
1 '03 01 31	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai honorarium yang dibutuhkan
1 '03 01 34	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTK, Perencana Keg. Swakelola, Pelaksana Keg. Swakelola, Pengawas Keg. Swakelola, dan Pengelola Administrasi Kegiatan	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai honorarium yang dibutuhkan
1 '03 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1 '03 02 01	Pengadaan Perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan Perlengkapan kantor	1 paket	1 paket	100%	
1 '03 02 02	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas operasional (toyota pick up)	1 unit	1 unit	100%	
1 '03 02 07	Pengadaan alat berat	Terlaksananya Pengadaan alat berat	-	-	-	dihapus di P-APBD
1 '03 02 09	Pengadaan Peralatan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor	3 paket	3 paket	100%	
1 '03 02 44	Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas PU Kota Bukittinggi	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas PU Kota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	
1 '03 02 51	Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	
1 '03 02 52	Perencanaan Interior dan Landscape kantor Dinas PU Kota Bukittinggi	Terlaksananya penyusunan Perencanaan Interior dan Landscape Kantor Dinas PU Kota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	efisiensi pagu anggaran kontrak kerja
1 '03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1 '03 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Serta Kelengkapannya	162 stel	162 stel	100%	
1 '03 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
1 '03 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas PU 2014	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	sesuai kebutuhan
1 '03 06 03	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Laporan Keuangan dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	6 Eksemplar	6 Eksemplar	100%	
1 '03 06 05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Laporan rencana Kerja dan Keuangan SKPD Dinas PU 2013	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	sesuai kebutuhan



KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '03 06 07	Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2010-2015	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2010-2015	-	-		- menunggu RPJM dan visi kepala daerah terpilih
1 '03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan					
1 '03 15 02	Pembangunan Trotoar	Terwujudnya Pembangunan Trotoar	1 Dok Perenc, 5 Paket Fisik, 1 Dok pengawasan	1 Dok Perenc, 5 Paket Fisik, 1 Dok pengawasan	100%	
1 '03 15 03	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Peningkatan Jalan Dalam Kota	-	-		- gagal tender
1 '03 15 04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Terwujudnya Pembangunan Jalan Dalam Kota	-	-		- kegiatan fisik dan pengawasan gagal tender
1 '03 15 05	Perencanaan pemeliharaan Jalan Dalam Kota (DAK 2016)	Terlaksananya Perencanaan pemeliharaan Jalan Dalam Kota (DAK 2016)	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	
1 '03 15 06	Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dalam Kota	Terlaksananya Perencanaan Peningkatan Jalan Dalam Kota	1 paket dokumen	-		- perubahan rekening belanja menjadi belanja barang/jasa
1 '03 15 07	Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Trotoar	Terlaksananya Perencanaan Peningkatan trotoar	1 paket dokumen	-		- perubahan rekening belanja menjadi belanja barang/jasa
1 '03 15 08	Perencanaan Pembangunan Jembatan Pakan Kurai	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan Pakan Kurai	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '03 15 09	Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl. Syekh Arrasuli menuju Pasar Bawah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl. Syekh Arrasuli menuju Pasar Bawah	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '03 15 10	Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl. Mr. Assaat	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jembatan Jl. Mr. Assaat	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '03 15 11	Perencanaan pelebaran dan pengecoran bahu jalan manunggal menuju Jl. Cempaka	Terlaksananya Perencanaan pelebaran dan pengecoran bahu jalan manunggal menuju Jl. Cempaka	1 paket dokumen	-		- perubahan rekening belanja menjadi belanja barang/jasa
1 '03 15 12	Perencanaan pengecoran bahu jalan dalam kota Bukittinggi	Terlaksananya Perencanaan pengecoran bahu jalan dalam kota Bukittinggi	1 paket dokumen	-		- perubahan rekening belanja menjadi belanja barang/jasa
1 '03 15 13	Pembangunan Median Jalan Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya Pembangunan Median Jalan Perintis Kemerdekaan	1 paket	-		- penolakan dari masyarakat
1 '03 15 17	Pengecoran Jalan Gulai Bancah	Terlaksananya Pengecoran Jalan Gulai Bancah	1 paket	1 paket	100%	
1 '03 15 19	Pengecoran dan Pengedaman Jalan Ke SD 014 ATTS	Terlaksananya Pengecoran dan Pengedaman Jalan Ke SD 014 ATTS	1 paket	1 paket	100%	
1 '03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong					



KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '03 16 02	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Terpeliharanya Saluran Primer dan Skunder di Kota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '03 16 03	Peningkatan Drainase	Terlaksananya Drainase yang ditingkatkan	1 Dok Perenc, 14 Paket Fisik, 1 Dok Pengawasan	1 Dok Perenc, 14 Paket Fisik, 1 Dok Pengawasan	100%	
1 '03 16 04	Lanjutan Rehab Bandar belakang BTC	Terlaksananya Lanjutan Rehab Bandar belakang BTC	1 Dok Perenc, 1 Paket Fisik, 1 Dok Pengawasan	1 Dok Perenc, 1 Paket Fisik, 1 Dok Pengawasan	100%	
1 '03 16 05	Perbaikan Drainase RT. 02 Garegeh	Perbaikan Drainase RT. 02 Garegeh	1 paket	-		- dilakukan melalui pemeliharaan rutin
1 '03 16 06	Perbaikan Slauran Air Depan Masjid Al Abrar, Samping Lapangan Basket Atas Ngarai	Perbaikan Slauran Air Depan Masjid Al Abrar, Samping Lapangan Basket Atas Ngarai	1 paket	-		- tidak bisa dilaksanakan/lokasi
1 '03 16 07	Perbaikan Bandar Nagari Depan Sulaman Puti Bungsu RT I RW I Kelurahan Pulai Anak Air	Perbaikan Bandar Nagari Depan Sulaman Puti Bungsu RT I RW I Kelurahan Pulai Anak Air	1 paket	1 paket	100%	
1 '03 16 08	Pengecoran Plat Bandar Surian Pulai Anak Air RT I RW I kelurahan Pulai Anak Air	Pengecoran Plat Bandar Surian Pulai Anak Air RT I RW I kelurahan Pulai Anak Air	1 paket	1 paket	100%	
1 '03 16 09	Perencanaan Peningkatan Drainase Dalam Kota	Perencanaan Peningkatan Drainase Dalam Kota	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	
1 '03 16 10	Perencanaan Riol Lingkungan RW 05 Kelurahan Birugo - Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Perencanaan Riol Lingkungan RW 05 Kelurahan Birugo - Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	
1 '03 16 11	Perbaikan Drainase Gurun Tanjung RT. 01/RW. 05 Kelurahan Pakan Kurai	Perbaikan Drainase Gurun Tanjung RT. 01/RW. 05 Kelurahan Pakan Kurai	1 paket	1 paket	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '03 17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong					
1 '03 17 02	Lanjutan Pembangunan Dam Penahan tebing Koto Selayan	Terlaksananya lanjutan Pembangunan Dam Penahan tebing di Kel. Koto Selayan	1 paket	1 paket	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '03 17 03	Pembangunan Dam Penahan tebing Kampung Cina	Terlaksananya Pembangunan Dam Penahan tebing Kampung Cina	-	-		- dihapus di P-APBD
1 '03 17 04	Perencanaan Penedam Tebing Ikua Labuah	Terlaksananya Perencanaan Penedam Tebing Ikua Labuah	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	
1 '03 17 05	Pemasangan DAM (Batu Beronjong) Belakang Posyandu Depan STIE Agus Salim Jangkak	Terlaksananya Pemasangan DAM (Batu Beronjong) Belakang Posyandu Depan STIE Agus Salim Jangkak	1 paket	-		- anggaran terbatas
1 '03 17 06	Pendaman Pinggir Jalan Koto Bawah Sampai Koto Ateh	Terlaksananya Pendaman Pinggir Jalan Koto Bawah Sampai Koto Ateh	1 paket	1 paket	100%	
1 '03 17 07	Pembuatan Dam/Bronjong Di Belakang Lapangan Atas Ngarai	Terlaksananya Pembuatan	1 paket	-		- anggaran terbatas



KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dam/Bronjong Di Belakang Lapangan Atas Ngarai				
1	'03	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan					
1	'03	18	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Terpeliharanya Jalan Dalam Kota	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	18	02	Pemeliharaan Jembatan Dalam Kota	Terpeliharanya Jembatan dalam Kota	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	18	03	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (Sisa DAK 2010-2013)	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (Sisa DAK 2010-2013)	1 Tahun	-	-	Tidak bisa dilaksanakan karena juklak/juknis tidak ada.
1	'03	18	04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Trotoar	Terpeliharanya Trotoar Dalam Kota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	18	05	Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK 2015)	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Bukittinggi (DAK 2014)	1 Tahun	1 Tahun	100%	
1	'03	19		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya					
1	'03	19	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Terwujudnya DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	19	04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Infrastruktur irigasi 2015)	Terwujudnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Infrastruktur irigasi 2015)	1 Paket	1 Paket	100%	sebagian kegiatan putus kontrak
1	'03	20		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					
1	'03	20	04	Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksananya Sosialisasi Sanitasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	
1	'03	20	05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK 2015)	Terwujudnya DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (DAK 2015)	3 Paket	3 Paket	100%	teping dengan PDAM tidak boleh mengerjakan pipa induk
1	'03	20	06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (DAK 2015)	Terwujudnya DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (DAK 2015)	3 Paket	3 Paket	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1	'03	20	07	Peningkatan Sanitasi Lingkungan (Luncuran DAK 2013)	Terwujudnya Peningkatan Sanitasi Lingkungan (Luncuran DAK 2013)	1 Paket	-	-	Tidak bisa dilaksanakan karena juklak/juknis tidak ada.
1	'03	20	08	Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	20	09	Penambahan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SPAM Panorama Baru	Terwujudnya Penambahan Pemasangan Sambungan Rumah (SR) SPAM Panorama Baru	1 Paket	1 Paket	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1	'03	20	10	Penambahan dan Perbaikan Sambungan Rumah (SR) SPAM Kelurahan Kayu Kubu	Terlaksananya Penambahan dan Perbaikan Sambungan	1 Paket	-	-	lahan tidak ada



KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1				2	3	4	5	6	7
					Rumah (SR) SPAM Kelurahan Kayu Kubu				
1	'03	21		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
1	'03	21	01	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Terwujudnya Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	21	02	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Terlaksananya Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	1 Paket	-		- Batal/ gagal tender
1	'03	21	03	Penunjang Even-Even Daerah dan Nasional	Terwujudnya Event-Event Daerah dan Nasional	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai even yang dilaksanakan
1	'03	22		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum					
1	'03	22	02	Rehab jenjang Kampung Baru Kayu Kubu	Terlaksananya Rehab jenjang Kampung Baru Kayu Kubu	3 Paket	3 Paket	100%	
1	'03	22	03	Pembangunan mushalla al-huda gulai bancah	Terwujudnya lanjutan pembangunan mushalla al-huda gulai bancah	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	04	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Gulai Bancah	Terwujudnya Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Gulai Bancah	1 paket	1 paket	100%	
1	'03	22	05	Lanjutan Pembangunan Monumen Angkatan 66 Ahmad Karim	Terwujudnya Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Gulai Bancah	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	06	Pembangunan Portal dan Gardu Jaga Kantor Balaikota Bukittinggi	TerwujudnyaPembangunan Portal dan Gardu Jaga Kantor Balaikota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	07	Perencanaan Kantor Lurah Campago Guguak Bulek	Tersedianya dokumen Perencanaan Kantor Lurah Campago Guguak Bulek	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1	'03	22	08	Rehab Kantor Lurah ATTS	Terlaksananya Rehab Kantor Lurah ATTS	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	09	Perencanaan Kantor Lurah Belakang Balok	Tersedianya dokumen Perencanaan Kantor Lurah Belakang Balok	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1	'03	22	10	Pemasangan Dam dan Pagar Kantor Lurah Kubu Gulai Bancah	Terlaksananya Pemasangan Dam dan Pagar Kantor Lurah Kubu Gulai Bancah	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	11	Pembuatan Saluran dan Pagar Lapangan Bola Volley Metra	Terlaksananya Pembuatan Saluran dan Pagar Lapangan Bola Volley Metra	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	12	Perencanaan Gerbang Balaikota Bukittinggi dan Pedestrian	Tersedianya dokumen Perencanaan Gerbang Balaikota Bukittinggi dan Pedestrian	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1	'03	22	13	Perencanaan Ruang Terbuka Hijau pada Parkiran TMP Kusuma BHakti	Tersedianya dokumen Perencanaan Ruang Terbuka Hijau TMP Kusuma BHakti	1 paket dokumen	1 paket dokumen	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1	'03	22	14	Pembangunan Dam - Tebing Musholla Perumahan Ganting Permai	Terlaksananya Pembangunan Dam - Tebing Musholla Perumahan Ganting Permai	1 Paket	1 Paket	100%	



KODE				URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
					INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1				2	3	4	5	6	7
1	'03	22	15	Pembangunan Pagar SD 06 Parak Congkak	Terlaksananya Pembangunan Pagar SD 06 Parak Congkak	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	16	Pembuatan Pagar SD 07 Gulai Bancah	Terlaksananya Pembuatan Pagar SD 07 Gulai Bancah	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	22	17	Rehab Balai Pemuda Kampuang Pulasan	Terlaksananya Rehab Balai Pemuda Kampuang Pulasan	1 Paket	-	-	lokasi tidak sesuai
1	'03	22	18	Rehab Balai Pemuda Campagi Ipuh	Terlaksananya Rehab Balai Pemuda Campagi Ipuh	1 Paket	-	-	lokasi tidak sesuai
1	'03	22	19	Rehab Balai Pemuda Birugo Puhun	Terlaksananya Rehab Balai Pemuda Birugo Puhun	1 Paket	-	-	lokasi tidak sesuai
1	'03	22	20	Rehab Balai Pemuda Kelurahan Kubu Tanjung	Terlaksananya Rehab Balai Pemuda Kelurahan Kubu Tanjung	1 Paket	-	-	lokasi tidak sesuai
1	'03	22	21	Rehab Kantor Pemuda ATTS	Terlaksananya Rehab Kantor Pemuda ATTS	1 Paket	-	-	lokasi tidak sesuai
1	'03	22	22	Pembuatan Pagar dan Kanopi Kantor Pemuda Gulai Bancah	Terlaksananya Pembuatan Pagar dan Kanopi Kantor Pemuda Gulai Bancah	1 Paket	-	-	lokasi tidak sesuai
1	'03	22	23	Pemasangan Paving Blok Kantor Lurah ATTS	Terlaksananya Pemasangan Paving Blok Kantor Lurah ATTS	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	23		Program Pengaturan Jasa Konstruksi					
1	'03	23	01	Pendamping Kegiatan P2KP	Tersedianya Laporan Pendamping Kegiatan P2KP	12 laporan	12 laporan	100%	
1	'03	23	02	pendampingan kegiatan SANIMAS	Terwujudnya Pendamping kegiatan sanimas 2012	1 Paket	-	-	kegiatan sanimastidak ada
1	'03	23	03	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pembangunan Perumahan dan kawasan Pemukiman (RP3KP)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pembangunan Perumahan dan kawasan Pemukiman (RP3KP)	1 Paket	1 Paket	100%	
1	'03	23	04	Pendampingan Kegiatan BSPS	Terwujudnya Pendampingan Kegiatan BSPS	1 Paket	1 Paket	100%	kegiatan dari pusat tidak ada
1	'03	25		Program Pengendalian Banjir					
1	'03	25	01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali	Terlaksananya Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Teresebar di Kota Bukittinggi	Teresebar di Kota Bukittinggi	100%	sesuai kebutuhan
1	'03	26		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur					
1	'03	26	01	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD Luar SKPD Dinas PU Dengan Nilai Kecil Dari 100 Juta	terlaksananya penyusunan biaya perencanaan pekerjaan fisik SKPD, Luar SKPD Dinas PU dengan nilai kecil dari 100 juta	1 paket	1 paket	100%	kegiatan fisik banyak dikerjakan oleh konsultan perencanaan
1	'03	26	03	Pembuatan Lager Jalan (Sistim informasi jaringan jalan)	terwujudnya pembuatan leger jalan (sistem informasi jaringan jalan)	1 Dokumen	-	-	dihapus di P-APBD



KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '03 26 04	Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Terlaksanannya Operasionalisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	1 paket	1 paket	100%	keterbatasan waktu
1 '03 26 05	Aktualisasi Data Jalan	Tersusunnya dokumen Aktualisasi Data Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
1 04	URUSAN WAJIB PERUMAHAN					
1 04 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan					
1 '04 16 01	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Terwujudnya Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	5Paket	5Paket	100%	
1 '04 16 02	Pembangunan Riol	Terwujudnya Pembangunan Riol	1 Paket	1 Paket	100%	
1 '04 16 03	Rehab/Peningkatan Riol	Terwujudnya Rehab/Peningkatan Riol	1 Paket	1 Paket	100%	
1 '04 16 04	DAK Perumahan dan Pemukiman (DAK 2015)	TerwujudnyaDAK Perumahan dan Pemukiman (DAK 2015)	1 Paket	1 Paket	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '04 16 05	Peningkatan Jalan Lingkungan Aur Kuning Samping Soto Surabaya	Terlaksanannya Peningkatan Jalan Lingkungan Aur Kuning Samping Soto Surabaya	1 Paket	-	-	telah dikerjakan PNPM
1 '04 16 06	Peningkatan Jalan Lingkungan Kompleks Kejaksaan (Jl. Havid Jalil)	Terlaksanannya Peningkatan Jalan Lingkungan Kompleks Kejaksaan (Jl. Havid Jalil)	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 07	Peningkatan Jalan Lingkungan Kirab Remaja III	Terlaksanannya Peningkatan Jalan Lingkungan Kirab Remaja III	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 08	Peningkatan Jalan Lingkungan dari Bukit Cangang ke Kantor Telkom (SMP 1).	Terlaksanannya Peningkatan Jalan Lingkungan dari Bukit Cangang ke Kantor Telkom (SMP 1).	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 09	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Komplek Perumahan Pulau Residence I dan II Kelurahan Pulau Anak Air.	Terlaksanannya Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Komplek Perumahan Pulau Residence I dan II Kelurahan Pulau Anak Air.	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 10	Perbaikan jalan Cor dari Medan Tapi Bukit Cangang- Ktr Telkom (SMPN 1)	Terlaksanannya Perbaikan jalan Cor dari Medan Tapi Bukit Cangang- Ktr Telkom (SMPN 1)	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 11	Pengapungan Jalan Campago Inkorba	Terlaksanannya Pengapungan Jalan Campago Inkorba	1 Paket	1 Paket	1	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '04 16 12	Pengapungan (Pengecoran) Jalan Gang Kasiak, Guguak Randah	Terlaksanannya Pengapungan (Pengecoran) Jalan Gang Kasiak, Guguak Randah	1 Paket	1 Paket	1	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '04 16 13	Pengecoran Jalan Lingkungan Perumahan Villa Gita Permai	Terlaksanannya Pengecoran Jalan Lingkungan Perumahan Villa Gita Permai	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 14	Pengecoran Jalan Lingkungan Perumahan Muslim Garegeh	Terlaksanannya Pengecoran Jalan Lingkungan Perumahan Muslim Garegeh	1 Paket	1 Paket	1	



KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '03 15 14	Pengecoran Jalan RW IV Koto Bawah Kelurahan Pulai Anak Air	Terlaksanannya Pengecoran Jalan RW IV Koto Bawah Kelurahan Pulai Anak Air	1 Paket	1 Paket	1	
1 '03 15 14	Pengecoran Jalan Lingkar Griya Madani RW 1 Garegeh	Terlaksanannya Pengecoran Jalan Lingkar Griya Madani RW 1 Garegeh	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 15	Pengecoran Jalan Lingkungan RT 02 RW 03 Kelurahan Kayu Kubu	Terlaksanannya Pengecoran Jalan Lingkungan RT 02 RW 03 Kelurahan Kayu Kubu	1 Paket	1 Paket	1	
1 '04 16 16	Perencanaan Jalan Lingkungan RT 01 RW 01 Kelurahan Parit Antang ABTB 200 M	Tersusunnya dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan RT 01 RW 01 Kelurahan Parit Antang ABTB 200 M	1 Dokumen	1 Dokumen	1	
1 '04 16 17	Perencanaan Riol Lingkungan RW 05 Kelurahan Birugo ABTB 200 M	Tersusunnya dokumen Perencanaan Riol Lingkungan RW 05 Kelurahan Birugo ABTB 200 M	1 Dokumen	1 Dokumen	1	
1 05	URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG					
1 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang					
1 '05 15 01	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terwujudnya Pembuatan Keterangan Rencana Kota	1350 PKRK	1350 PKRK	100%	
1 '05 15 02	Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terwujudnya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	50 sertifikat	-	-	kurangnya pemahaman masyarakat
1 '05 15 03	Pembuatan blok Blad kelurahan	Adanya Peta Blok Blad Kawasan	1 dok.	1 dok.	100%	efisiensi pagu kontrak kerja
1 '05 15 04	Penyusunan Perda RDTR MKS dan Guguak Panjang	Terlaksananya Penyusunan Perda RDTR MKS dan Guguak Panjang	1 perda	1 perda	100%	menunggu Perda RTRW
1 '05 15 05	Pengadaan Peta Citra Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pengadaan Peta Citra Kota Bukittinggi	1 paket	-	-	dihapus di P-APBD
1 '05 15 07	Penyusunan RDTR dan PZ kecamatan ABTB	Terlaksananya Penyusunan RDTR dan PZ kecamatan ABTB	1 paket	1 paket	100%	
1 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
1 '05 17 01	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	100%	sesuai kebutuhan
1 '05 17 02	Pendataan Bangunan Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pendataan Bangunan Kota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	putus kontrak
1 '05 17 03	Penyediaan Biaya Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	Terwujudnya Pengadaan Cetak Peta Tata Ruang	1 paket	-	-	menunggu proses revisi RTRW
1 '05 17 04	Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun Tanpa IMB	Terwujudnya Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun Tanpa IMB	1 paket	1 paket	100%	
1 06	URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1 06 16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					



KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TOLOK UKUR KINERJA				PERMASALAHAN
		INDIKATOR KELUARAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 '06 16 19	Pendamping Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	Tersedianya Dana Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Bukittinggi	1 Paket	1 Paket	100%	sesuai kebutuhan
1 '06 16 20	Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	Terlaksananya Review dan Sinkronisasi RPIJM Kota Bukittinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	pembuatannya tidak melibatkan pihak ketiga
1 '06 16 21	DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan RSUD Bukittinggi	1 Dokumen	-	-	menunggu hasil FS.
	GRAND TOTAL BELANJA LANGSUNG					

Dari segi realisasi keuangan realisasi belanja Dinas pekerjaan Umum Pada Tahun 2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (2014) dimana persentase realisasi adalah 77,29% meningkat dari tahun 2014 yang hanya 70,83%. Untuk belanja tidak langsung terealisasi 97,88% dan belanja tidak langsung 74,70% yang meningkat dari Tahun 2014 yaitu sebesar 68,36%.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Keuangan DPU Tahun 2015

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PORSENTASE
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
B	BELANJA DAERAH	64.192.178.971	40.337.983.322	77,29
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.833.856.459	5.703.163.565	97,88
2.1.1	Belanja Pegawai	5.833.856.459	5.703.163.565	97,88
2.2	BELANJA LANGSUNG	46.366.703.817	34.634.819.757	74,70
2.2.2	Belanja Pegawai	2.450.810.000	1.918.561.000	78,28
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	12.665.071.252	9.475.754.015	74,82
2.2.4	Belanja Modal	31.250.822.565	23.240.504.742	74,37

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014 yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2010-2015 dapat dilihat dalam **lampiran 1** Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan bagian dari sistem perencanaan Kota Bukittinggi yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional dimana diperlukan sinergitas dalam pencapaian prioritas pembangunan antara daerah/kota dengan prioritas provinsi dan nasional. Komitmen ini terlihat dari penerapan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilakukan oleh daerah sesuai dengan target minimal IKK yang harus dicapai dalam kurun waktu penerapan.

Profil pemenuhan pencapaian/kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengalami perubahan standar yang semula diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010 direvisi dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Disamping itu terkait dengan pelaksanaan pelayanan bidang perumahan rakyat diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dimana ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu Rumah layak huni dan terjangkau; serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Untuk mengukur/menganalisis capaian kinerja pelayanan minimal yang terkait Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan laporan SPM dimaksud dapat diuraikan berikut:

1. Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

a. Pelayanan Sumber Daya Air; Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat

- 1) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
Tersedianya kapasitas sumber daya air yang dimiliki PDAM Kota Bukittinggi Tahun 2012 untuk melayani 80% jumlah penduduk administratif sebagaimana target MDGs yaitu 90.855 jiwa, adalah sebesar 199 lt/detik. Sedangkan kapasitas sumber daya air yang seharusnya dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk adalah 274 lt/detik. Capaian ini didapat dari adanya ketersediaan air pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Salayan.
- 2) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sampai tahun 2014 sebesar 458 lt/dtk atau 99,56%. Dengan target 100% capaian kinerja indikator ini termasuk kategori sangat berhasil. Untuk luas areal realisasi tanam di Kota Bukittinggi merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian.

b. Pelayanan Jalan;

▪ Jaringan :

- 1) Aksesibilitas :
Pada tahun 2015, tidak ada rencana penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2015 ini sepanjang 194,22 kilometer. Jika dibandingkan dari tahun 2011 hingga 2015 tidak terjadi penambahan ruas jalan yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan. Hal ini disebabkan Kota Bukittinggi tidak ada rencana penambahan ruas jalan, dan hanya menganggarkan perbaikan, peningkatan ataupun rehabilitasi jalan yang ada.
- 2) Mobilitas :
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan. Target pada tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi adalah 80% dan realisasi sebesar 71,34%. Realisasi ini sama dari tahun 2010, hal ini disebabkan tidak terjadi penambahan ruas jalan selama tahun tersebut.
- 3) Keselamatan :

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat. Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. target tersebut dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dan laik fungsi.

▪ **Ruas :**

1) **Kondisi Jalan :**

Kondisi jalan ditentukan oleh kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan. Kondisi jalan ini harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman.

Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. Target tersebut dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan. Panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan.

2) **Kecepatan :**

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Kriteria kecepatan ini adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya. Nilai SPM berdasarkan prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah.

Target capaian sesuai dengan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah 80% dan realisasi sebesar 80,22%. Target tersebut dapat terealisasi karena banyaknya kegiatan yang dilakukan berupa perbaikan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada. Dari total ruas jalan 194,22 km yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan yang ada di Bukittinggi, 155,8 km panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan. Panjang ruas jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan

c. Pelayanan Air Minum

Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Pada pelayanan air minum dengan jaringan perpipaan, untuk tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi adalah sebesar 120.491 jiwa. Jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2015 adalah 44.621 jiwa sesuai dengan target 37,64% yang tercantum dalam Dokumen SPAM.

d. Pelayanan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)**1) Air Limbah Permukiman**

- Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Sistem pembuangan air limbah setempat merupakan sistem pembuangan air limbah secara individual yang dioleh dan dibuang di tempat, yang meliputi cubluk, tangki septik dan resapan dan sistem setempat lainnya, sarana pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja.

Target capaian jumlah infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman pada tahun 2015 adalah 89% dan realisasi 82%. Realisasi dari tahun 2011 hingga 2015 tidak terjadi peningkatan karena Kota Bukittinggi belum memiliki unit pengolahan tinja atau IPLT. Begitupun juga dengan kendaraan operasional, masyarakat Bukittinggi masih mengandalkan kendaraan operasional dari pihak swasta.

- Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota untuk indikator ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Sanitasi Lingkungan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai sekarang. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan MCK untuk kapasitas 20-25 KK. Sedangkan untuk sistem air limbah skala kawasan atau kota Kota Bukittinggi baru melakukan kegiatan pembangunan pada tahun 2013 yang berlokasi pada kelurahan Belakang Balok. Sesuai dengan rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum 2010-2015 target infrastruktur dasar yang disediakan pada kawasan permukiman adalah 89% pada tahun 2014.

2) Drainase

- Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sistem jaringan saluran-saluran air yang digunakan untuk pematusan air hujan, yang berfungsi menghindarkan genangan (inundation) yang berada dalam suatu kawasan atau dalam batas administratif kota. Definisi Operasional tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase, baik bersifat struktural yaitu pencapaian pembangunan fisik yang mengikuti pengembangan perkotaan, maupun bersifat non-struktural yaitu terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan drainase oleh pemerintah yang berupa fungsionalisasi institusi pengelola drainase dan penyediaan peraturan yang mendukung penyediaan dan pengelolaannya.

Target capaian prosentase atau panjang drainase, talub/turap/bronjong dan riol sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi pada tahun 2014 adalah 87%. Indikator ini dilaksanakan dengan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong dan peningkatan, pemeliharaan drainase.

e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikatornya berupa berkurangnya luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan. Permukiman adalah lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Luasan permukiman kumuh sebagai acuan pencapaian target SPM, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan kondisi yang disesuaikan dengan tahun diterbitkannya Peraturan Menteri PU tentang SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan mengacu pada standar teknis yang berlaku.

Berdasarkan keputusan Walikota, terdapat 2 kelurahan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh perkotaan yaitu Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai. Untuk merealisasikan indikator ini dilaksanakan Kegiatan BSPS, bedah rumah dan kegiatan lainnya.

f. Penataan Bangunan dan Lingkungan**1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

SPM Penataan Bangunan dan Lingkungan (IMB) bertujuan untuk meningkatnya jumlah bangunan gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota untuk memenuhi ketentuan administratif dan ketentuan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan yang andal serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pengurusan IMB mulai tahun 2008 telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Data jumlah IMB yang telah diterbitkan oleh BP2TPM pada tahun 2014 adalah 435 izin, sedangkan rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB tidak dimiliki oleh BP2TPM.

2) Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) harus tersedia di kabupaten/kota sehingga mendukung pencapaian sasaran penyelenggaraan bangunan gedung melalui penyediaan HSBGN yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Definisi Operasional Harga Satuan Bangunan Gedung Negara merupakan biaya maksimum per-m² pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan bangunan gedung negara khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat.

Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kota Bukittinggi, indikator ini dilaksanakan dengan Penyusunan Buku Standart Harga Bangunan Negara yang dilakukan setiap tahunnya, sehingga realisasi 100%.

g. Jasa Konstruksi**1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)**

IUJK diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM)

untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Sesuai dengan SOP pada KPPT waktu penerbitan IUJK adalah 6 hari. Jumlah permohonan IUJK yang masuk sebanyak 35 izin atau realisasi 100%, dengan menerbitkan IUJK sebanyak 35 Izin.

2) Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Sistem informasi jasa konstruksi adalah sekumpulan komponen dari informasi mengenai jasa konstruksi yang saling terintegrasi untuk menyajikan data dan informasi mengenai jasa konstruksi. Hingga tahun 2015 Kota Bukittinggi belum memiliki Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang jelas yang menjelaskan tugas dan fungsinya.

h. Penataan Ruang

1) Informasi Penataan Ruang

Indikator dari Informasi Penataan Ruang adalah tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Informasi berupa Peta Analog dan Peta Digital adalah bentuk informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rincinya dalam bentuk cetakan yang dapat digandakan, mudah diakses pada jam kerja, dan tanpa dipungut biaya. Informasi mengenai keberadaan Peta Analog dan Peta Digital disebarluaskan melalui berita di media massa. Peta analog dapat terdiri dari peta RTRW Kabupaten/Kota dan peta Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. peta analog harus memuat informasi rencana struktur dan pola ruang dengan skala minimal 1 : 50.000 (RTRW Kabupaten), 1 : 25.000 (RTRW Kota), dan 1: 5.000 (rencana rinci), yang dilengkapi dengan legenda peta.

Kota Bukittinggi pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Karena revisi tersebut maka kegiatan ketersediaan peta analog belum dilakukan. Tetapi untuk mendukung SPM ini Kota Bukittinggi telah melaksanakan sebanyak 6 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan RTBL.

2) Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR

Pelibatan peran masyarakat berupa konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang dan program penataan ruang sebagai bentuk participatory planning yang memenuhi syarat inklusif dan mampu menjangkau aspirasi masyarakat.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik untuk penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Aur Biugo Tigo Baleh, dan Konsultasi Publik untuk penyusunan Dokumen Revisi RTRW.

3) Izin Pemanfaatan Ruang

Indikator dari izin pemanfaatan ruang adalah terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya. Setiap Kabupaten/Kota diharapkan telah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya yang dilengkapi dengan peta, dan untuk kemudian dapat dijadikan dasar untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target Izin Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2015 adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan dari indikator tersebut sebesar 100%, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2011, sehingga pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang yang seharusnya berpedoman pada Peraturan Daerah, dapat dilaksanakan.

4) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Indikatornya berupa terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari

Untuk merealisasikan SPM ini, kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dari pengaduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, 80% dapat ditangani.

5) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Indikatornya adalah tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai tahun 2030.

Kota Bukittinggi dengan luas wilayah ± 25 km², memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik yang berupa RTH Publik ataupun RTH Privat. Sepanjang kawasan Ngarai Sianok telah dijadikan Kawasan RTH dan telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

2. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat.

a. Rumah Layak Huni dan Terjangkau

1) Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator ini dilakukan dengan Pelayanan ketersediaan rumah layak huni, yaitu jumlah layak huni di bagi dengan jumlah rumah. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi criteria kehandalan bangunan yang menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Pada tahun 2013 jumlah rumah yang ada di Kota Bukittinggi sebanyak 21.067 unit, dan yang layak huni sebesar 19.027 unit.

2) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

Rumah layak huni yang terjangkau merupakan pembagian antara Rumah Tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau dengan jumlah rumah MBR. Pada tahun 2013, jumlah rumah MBR di Kota Bukittinggi sebanyak 2.867 unit, dan jumlah RT MBR yang menempti rumah layak huni yang terjangkau sebanyak 1.040 unit.

b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

SPM ini merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang meliputi jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja waktu tertentu. SPM ini



merupakan perbandingan jumlah lingkungan yang didukung PSU dengan jumlah lingkungan perumahan.

Tabel 2.4

Profil Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2015.

Form Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tahun 2016										
No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	2014	2015	Ket	
			Indikator	Nilai						
I	Sumber Daya Air	Prioritas Utama penyediaan Air untuk kebutuhan masyarakat		1	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014	73.1%	71.7%	
				2	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2014	99.56	99.56	
II	Jalan	Jaringan	Aksesbi litas	3	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	2014	100.00	100.00	
			Mobilit as	4	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2014	71.51	71.51	
			Kesela matan	5	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	60%	2014	80.22	80.22	
		Ruas	Kondisi Jalan	6	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2014	80.22	80.22	
			Kecepat an	7	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	60%	2014	80.22	80.22	
III	Air minum	Cluster Pelayanan		8	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari			37.64	38.91	
		Sangat buruk				40%	2014			
						50%				
						70%				
						80%				
						100%				
IV	Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan	Air Limbah Permukiman		9	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2014	82.54	82.39	
				10	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota	5%	2014	0.00	0.00	
		Pengelolaan Sampah		11	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	2014	0.99	0.99	Persampahan merupakan Tupoksi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)



No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	2014	2015	Ket
			Indikator	Nilai					
			12	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	2014	79.65	79.65	Persampahan merupakan Tupoksi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP)
		Drainase	13.1	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	2014	43.41	43.41	
			13.2	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	37.08	37.08	
V	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		14	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	2014	44.97	44.97	penetapan Pemukiman Kumuh melalui SK Walikota Bukittinggi No.188.45-300-2014 tanggal 19 September 2014
VI	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan	15	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2014	0	0	Target oleh B2TPM
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	16	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di Kabupaten /kota	100%	2014	100	100	
VII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	17	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2014	100	100	
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	18	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	0	0	belum tersedianya Sitem Informasi Jasa Konstruksi
VIII	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	19.1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog	100%	2014 Kab. /Kota	0	0	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2014 Kecamatan	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2014 (Kelurahan)	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
			19.2	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital	100%	2014 Kab. /Kota	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2014 Kecamatan	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW
					100%	2014 (Kelurahan)	0.00	0.00	Sedang dlm Revisi RTRW



No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	2014	2015	Ket	
			Indikator	Nilai					
		Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR	20.1	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR	100%	2014	50	40	Perda RTRW telah disahkan pada tahun 2011, tahun 2015 dalam penyusunan RDTR dan Revisi RTRW
			20.2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	50	60	Perda RTRW telah disahkan pada tahun 2011, tahun 2015 dalam penyusunan RDTR dan Revisi RTRW
		Izin Pemanfaatan Ruang	21	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	2014 (Kabupate n /Kota)	100	100	
		Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	100%	2014 (Kab. /Kota dan Kecamatan n	80.39	73.13	
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2014	23.09	23.20	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping faktor kualitas lingkungan hidup, image dan masyarakat (budaya). Sementara itu kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam penentuan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, dan efisiensi pemerintah. Berdasarkan word economic forum 2008-2009, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dengan demikian maka tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing daerah dalam konteks regional dapat membaik.

Salah satu isu strategis yang dihadapi adalah bagaimana membangun infrastruktur yang dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan pembangunan antara kawasan pusat kota dengan kawasan pinggiran kota, menguarai kemacetan di pusat Kota, penyediaan RTH dan mengatasi banjir/genangan di beberapa kawasan strategis Kota, dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, dimana Kota Bukittinggi sebagai Kota yang mempunyai beragam fungsi mesti bisa menyelaraskan struktur dan pola ruang dengan rencana pembangunan infrastruktur kota yang diharapkan akan menciptakan keseimbangan lingkungan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Selain itu penyediaan infrastruktur bukan hanya untuk Penduduk Kota Bukittinggi namun juga untuk melayani masyarakat sekitarnya, karena faktanya terdapat peningkatan jumlah penduduk pada siang hari sekitar 3 s/d 4 kali lipat dari jumlah penduduk malam hari sebagai penduduk yang tercatat dalam administrasi Kota.

Menghadapi tantangan diatas maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dapat mendukung ekonomi kota secara efektif dan efisien. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum kedepan juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan, yaitu bagaimana menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Isu lainnya adalah perlu adanya perhatian serius tahun kedepan adalah pentingnya seluruh aparatur ke PU an untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas yang disokong secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas birokrasi dan mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima dan meningkatkan inovasi dalam ke PU an mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan maupun pelaporan serta pemahaman yang kuat terhadap TUPOKSI masing-masing aparatur.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Kota Bukittinggi adalah kendala alamiah berupa wilayah geografis Kota yang hanya seluas 25,239 Km2 dengan luas potensial pembangunan hanya sebesar 80% (selebihnya kawasan lindung ngarai) serta karakter lahan yang pada umumnya dimiliki oleh kaum adat sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembebasan lahan sehingga menjadi salah satu kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi.

Sesuai dengan rancangan prioritas pembangunan Kota Bukittinggi Tahun 2016 yang mengacu kepada Rancangan RPJMD Kota Bukittinggi 2016-2021, terdapat 2 (dua) misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum saat ini.

SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
---------	-----------	------	------	----------	----------------



SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 3: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOATA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN					
Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan					
Terpenuhinya RTH Kota	1. % RTH public 2. % RTH private	7,78% 5%	20% 10%	1. Membangun dan mengembangkan taman kota, taman tematik dan hutan kota yang dapat dijadikan taman rekreasi dan taman bermain anak 2. Optimalisasi Penataan Ruang	1. Penyediaan dan pembelian lahan untuk penyediaan RTH public dan taman bermain anak 2. Pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau
					3. Penyediaan dan pembelian lahan untuk penyediaan RTH public dan taman bermain anak 4. Pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai ruang terbuka hijau 5. Mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai serta jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, gedung perkantoran dan fasilitas publik 6. mendorong masyarakat untuk ikut berperan dalam peningkatan RTH Privat 7. Penyempurnaan dan Penerapan regulasi untuk penyediaan RTH private



SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Fasilitas Sosial yang memenuhi standar lingkungan Pemenuhan target universal access (air minum, kawasan kumuh dan sanitasi)	% fasilitas sosial yang representative dan memenuhi standar lingkungan (Puskesmas, Sekolah, Pasar, Taman Rekreasi) 1. % air minum layak 2. % kawasan kumuh	70.50% 90,64%	90% 100%	1. Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas sosial yang lebih representatif memenuhi standar lingkungan 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan fasilitas sosial 3. pengembangan sistem air minum perpipaan 4. Penataan kawasan permukiman kumuh	1. Melakukan kerjasama dengan instansi / dunia usaha 2. Menyiapkan regulasi yang mendukung pemenuhan sarana prasarana fasilitas sosial yang mendukung keindahan kota 3. Menyiapkan sistem pengelolaan fasilitas umum secara elektronik
					4. Meningkatkan kualitas jaringan pipa air bersih 5. Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum 6. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang aman dan sehat
					7. Menyediakan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) kawasan 8. Penataan rumah sewa yang layak huni 9. Pengembangan rumah susun sewa 10. menyediakan regulasi yang jelas dan tegas mengenai penataan kawasan permukiman dan penduduknya
	% sanitasi layak	93,12%	100%	1. ketersediaan sarana prasarana sanitasi dasar, berupa persampahan, drainase dan air limbah	1. mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase 2. memperkuat kelembagaan AMPL/ Pokja Sanitasi 3. mengembangkan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat 4. meningkatkan cakupan layanan air limbah melalui pembangunan



SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					perpipaan dan IPAL terpusat 5. mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL Komunal dan IPLT standar lingkungan hidup 6. pemeliharaan sarana dan prasarana drainase 7. mengembangkan gerakan sungai bersih
Tujuan 2 : Meningkatkan penataan ruang kota					
Pengendalian pemanfaatan ruang kota	1. % pemanfaatan ruang kota sesuai RTRW 2. % pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan			1. pengembangan sistem informasi geo spasial 2. Optimalisasi penegakan PERDA tata ruang	1. menerapkan sistem informasi spasial berbasis web 2. Memaksimalkan peran dan fungsi PPNS 3. Pembentukan satgas pengendalian tata ruang
Tujuan 4 : Terwujudnya pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu					



SASARAN	INDIKATOR	2015	2021	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	1. Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum 2. % Fasilitas Keselamatan Jalan 3. % jalan berkondisi baik	80% \ 70% 100%	85% 76% 100%	1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi 2. Penataan Angkutan Umum Reguler 3. Penataan sistem transportasi 4. Penataan sistem perparkiran 5. pengembangan prasarana jalan	1. Meningkatkan sarana prasarana sistem transportasi 2. Melaksanakan rekayasa lalu lintas 3. mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan angkutan antar daerah 4. pengendalian dan keselamatan transportasi 5. penertiban terminal bayangan angkot dan angdes 6. Peremajaan angkot 7. pengembangan pedestrian 8. menyediakan data base perhubungan 9. menerapkan taman dan gedung parkir dipuat-pusat kegiatan 10. pengembangan dan pemeliharaan Area Traffic Control System 11. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan 12. Menata kawasan perparkiran

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwa program dan kegiatan SKPD merupakan kompilasi dari mekanisme/prinsip perencanaan teknokratis, politis, top down dan bottom up. Mekanisme bottom up yang dilakukan berupa menjangking usulan dari masyarakat pada Musrenbang tahun 2016 sesuai wewenang dan tugas fungsi ke PU an. Proses penjangkingan usulan ini telah dilakukan secara berjenjang semenjak dari musrenbang kelurahan, kecamatan dan Kota dengan serangkaian diskusi dan tinjauan lapangan sehingga menghasilkan usulan yang benar-benar prioritas dan layak serta dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bukittinggi yang disejajarkan dengan kebijakan politis kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta mensinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan nasional dan sektoral lainnya seperti RPIJM.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut setelah dilakukan berbagai proses penjangkingan dan pembahasan dikompilasikan kedalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang



terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Kompilasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI	KETERANGAN
1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
1	03	15	01	Peningkatan Trotoar	
			-	Rehab Trotoar dan Bandar sepanjang Jl. Ibrahim Musa	ATTS/ Dlm proses Identifikasi
			-	Perbaikan Trotoar sepanjang jalan Bukit Apit	Bukit Apt Puhun/ dlm Proses Identifikasi
			-	Perbaikan Trotoar Jalan ST. Syahrir	Tarok Dipo/ Dlm Proses Identifikasi
			-	Peningkatan Trotoar Simpang Surau Gadang s/d Simpang Jirek	Campago Ipih/ Dlm Proses Identifikasi
1	03	15	02	Pembangunan Trotoar	
			-	Pembuatan Trotoar dari Rakik sampai ke Batas Jalan Koto Selayan	Ladang Cakiah/ Dlm proses Identifikasi
			-	Trotoar di Kiri Jalan Tambuo Pakan Labuah	Pakan LABuah/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembuatan Trotoar dari Batas Nagari Kubang Putih ke Kapalo Koto	Pakan Labuah/ Dlm proses Identifikasi
			-	Lanjutan Pembangunan Trotoar Jalan Sudirman (simpang Yarsi s/d Simpang DPRD)	BCKR/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuatan trotoar jl bahar kamil	manggis ganting/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuatan trotoar dari depan mushalla at taufig ke simpang by pass koto dalam	pulai anak air/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuatan trotoar dari simpang gudmulap sampai SDN 12	puhun pintu kabun/ Dlm proses Identifikasi
			-	lanjutan pembuatan trotoar rt 1 rw 1 jirek	kubu gulai bancha/ Dlm proses Identifikasi
1	03	15	03	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Diluar DAK
			-	Perbaikan Jalan dan Jembatan Pasar Bendi mulai dari Pasar Bendi sampai ke Tugu Adipura (Jl. Syeh Arrasuli)	ATTS/ Dlm proses Identifikasi
			-	Peningkatan Jalan Kemuning RT 01 RW I	Aur Kuning/ Dlm proses Identifikasi
			-	Peninggian Badan Jalan RT 02 RW I Parit antang	Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pengaspalan Jalan Labuah Baru Parit Antang di Kelurahan Parit Antang	Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pengecoran Bahu Jalan Sertu Kamarudin	Sapiran/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pengaspalan/ Peningkatan Badan Jalan Tengah Jua	Aur Kuning/ Dlm proses Identifikasi
			-	Peningkatan Jalan Baru (Manunggal 2016) Talao	Campago Guguk Bulek/ Dlm proses Identifikasi



KODE				PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI	KETERANGAN
			-	Pengaspalan Jalan lanjutan RW 3 RT 3 RT 4 Puhun Tembok	Puhun Tembok/ Dlm proses Identifikasi
			-	Peningkatan Jalan Simpang Gulidiak sampai ke perbatasan talao	manggis ganting/ Dlm proses Identifikasi
			-	pengaspalan jalan (pengulangan) dari simpang balai-balai ke lakuang dan simpang jalan batang pulai ke jl by pass	pulai anak air/ Dlm proses Identifikasi
			-	pengecoran bahu jalan perikanan rw 5	guguk bulek/ Dlm proses Identifikasi
			-	cor bahu jalan rw 01/rt01 jalan paninjauan	garegeh/ Dlm proses Identifikasi
			-	pemotoangan tikungan (jalan pabidikan) di kasiak bandaro	puhun pintu kabun/ Dlm proses Identifikasi
1	03	15	04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Diluar DAK
			-	Pengaspalan Jalan Setapak Parak Tinggi	Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembuatan Jalan Baru dari Simpang Kuburan Pincuran Gauang s/d tembus ke Bandar Balang dan Pembuatan Riol	Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pengaspalan Jalan Lingkar Usaha Tani IKPS RT 01 RW V Bukit Cegek	Bukit Apit Puhun 4/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Riol Jalan ke Lapangan Bola Kaki, Pembuatan Tribun Mini, Pembuatan Drainase Keliling Lapangan	Birugo / Dlm proses Identifikasi
			-	Pembuatan Pengaman Jalan Penurunan Ikua Labuah	Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
1	03	15	05	Pembangunan Jembatan	
1	03	15	06	Penyusunan DED Jalan Havid Jalil - Soekarno Hatta	Proses Identifikasi
1	03	18		Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
1	03	18	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	
1	03	18	03	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	
1	03	18	04	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	
1	03	21		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
1	03	21	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	
1	03	21	02	Penambahan/Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	
			-	pemasangan lampu di gapura gerbang masuk kelurahan	puhun pintu kabun/ Dlm proses Identifikasi
			-	pengadaan lampu jalan gang gloria	campago ipuh/ Dlm proses Identifikasi
1	03	21	03	Pembayaran Listrik Rekening PJU	
1	03	21	04	Event-Event Daerah dan Nasional	



KODE				PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI	KETERANGAN
1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	
1	03	16	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	
				PembaNGunan Plat Penutup Drainase di Jl. Unngek 2 ATTS	ATTS / Im proses Identifikasi
			-	Pembuatan Drainase Banda Redek sampai ke Pulai	Pakan Kurai 1/ Dlm proses Identifikasi
			-	Drainase dari Tabek Tuhua ke Panganank dan Pintu Kabun	Bukit Apit Puhun/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembuatan Drainase Lakuang RT 03 RW 03	Bukit Apit Puhun/ Dlm proses Identifikasi
			-	Saluran Drainase Got Ngarai Dekat Aliran Sungai	Kayu Kubu/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembangunan Bandar Batu Hampar - DKK - Jl. M. Yamin - Simpang Raya - By Pass	Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi
			-	Perbaikan Riol dan Pembuatan Sambungan Riol dari Ujung Bukit Baruah s/d Pakan Kurai	Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembangunan Drainase Jalan Raya Tigo Baleh	Pakan Labuah/ Dlm proses Identifikasi
			-	Drainase Jalan Labuah Baru Sampai Jembatan	Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
			-	Lanjutan Pendaman Bandar Tangkurai Koto Katiak depan Mesjid Jami'	Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembangunan Drainase Kelok Cindua	Kayu Kubu/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembuatan tali bandar dari griya madani ke jalan ranah ke batas agam	garegeh/ Dlm proses Identifikasi
			-	Pembuatan drainase rt 02/rw 03 dan rt 06/rw 01 kel. Campago guguk bulek	C. guguk bulek/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuatan drainase rw 04 kel campago guguk bulek	C. guguk bulek/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuatan pintu air bendung bandar rt 1 rw 1 koto selayan	koto selayan/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuatan drainase jl lingkari rt 01/rw III campago ipuh	campago ipuh/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuatan drainase dari koto ateh sampai koto bawah	pulai anak air/ Dlm proses Identifikasi
			-	lanjutan dam batang tambuo koto selayan	koto selayan/ Dlm proses Identifikasi
			-	pembuata drainase rt 2/rw 2 puhun tembok	puhun tembok / Dlm proses Identifikasi
			-	Pembangunan Drainase Kawasan Jalan By pass Tabek Gadang	Dlm proses Identifikasi
1	03	16	03	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	
1	03	16	04	Peningkatan Drainase	
			-	Perbaikan Drainase, Plat Beton bertulang Gang Mahoni dan Gang Apel	ATTS/ Dlm proses Identifikasi
			-	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Trotoar Rioli di Depan Reklame Budi	ATTS/ Dlm proses Identifikasi
			-	Perbaikan Rioli di Bawah Hotel Amali (Jl. Bawah Pasar)	ATTS/ Dlm proses Identifikasi
			-	Perbaikan Rioli Cor Beton di Jalan Unggek Dt Bagindo	ATTS/ Dlm proses Identifikasi



KODE			PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI	KETERANGAN
		-	Perbaikan Polongan/Jembatan Simpang Tarok dan Banda Nagari Simpang Tarok	Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Riol dan Pembagian Air RT 01/RW 05 Gurun Tanjung	Pakan Kurai/ Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Pagar Pengaman an Bandar RT 02 RW II Birugo	Birugo/ Dlm proses Identifikasi
		-	Perbaikan Riol di Depan Kemenag dan Rehab Gorong-Gorong serta perbaikan drainase Jl. Perwira Ujung, Jl. Manunggal, Jl. Prona, Jl. Hazairin	Sapiran/ Dlm proses Identifikasi
		-	Pelebaran drainase Pembangunan Drainase primer	Garegeh/ Dlm proses Identifikasi
		-	Kelanjutan drainase jl. Mandiingin	campago ipuh/ Dlm proses Identifikasi
		-	peninggian dam saluran air	puhun tembok
		-	perbaikan saluran bandar malang	campago ipuh/ Dlm proses Identifikasi
		-	perbaikan drainase puhun tembok	puhun tembok/ Dlm proses Identifikasi
1	03	25	Program Pengendalian Banjir	
1	03	25 01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	
1	03	25 03	Pembuatan Sumur Resapan	
		-	Pembuatan Sumur Resapan RT 3, RT 2, SMK Paramitha Puhun Tembok	Puhun Tembok/ Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Sumur Resapan RW II RT 03 Jl. Tabek Tuhua (menuju Mesjid Nurul Huda) Puhun Pintu Kabun	Puhun P Kabun/ / Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Sumur Resapan RW III RT 2 Jl. Pintu kabun	Puhun P Kabun/ Dlm proses Identifikasi
1	03	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	
1	03	17 04	Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	
		-	Pemasangan Dam Tebing Puskesmas Nilam Sari	Koto Selayan/ Dlm proses Identifikasi
		-	Dam Tebing Belakang Kantor Lurah Garegeh	Garegeh/ Dlm proses Identifikasi
		-	Dam Tebing dan Penutupan Pagar Pusara Panorama	Kayu Kubu / Dlm proses Identifikasi
		-	Pendaman Kiri dan Kanan Tebing Jl. A. Yani yang membelakangi Taman Benteng dan TMSBK	Benteng Pasar Atas 4 /Dlm proses Identifikasi
		-	Pendaman Tebing Batang Tambuo mulai dari Kantor Lurah Parit Antang sampai ke Mushalla Arafah Ikua Labuah	Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
		-	Melanjutkan Pendaman Tebing Puskesmas dan Kantor Lurah Parit Antang (Pemasangan Batu Bronjong)	Parit Antang / Dlm proses Identifikasi
1	03	17 05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	
		-	Pendaman Tebing Jl. Pasar Ikan Lama	Benteng Pasar Atas/ Dlm proses Identifikasi
		-	Pendaman Jalan RT 01 RW V (samping posyandu Matahari)	Bukit Apit Puhun/ Dlm proses Identifikasi



KODE			PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI	KETERANGAN
			- Pendaman dan Scrub Dinding Tebing Jalan Simp Banto Laweh menuju Ngarai	Kayu Kubu/ Dlm proses Identifikasi
			- Pembuatan Dam Jalan Samping Pekuburan Koto MAnggis	Manggis Ganting/ Dlm proses Identifikasi
1	03	18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	
1	03	18	01 Pembangunan Saluran Irigasi	Diluar DAK
			- Pembangunan Bandar Irigasi Kubu Banda	Kubu Tanjung/ Dlm proses Identifikasi
			- Pembangunan Pintu Air Stang Ulir Banda Gadang	Kubu Tanjung/ Dlm proses Identifikasi
			- Pembuatan Pintu Air di Pinggir Jalan Raya Tigo Baleh	Ladang Cakiah/ Dlm proses Identifikasi
			- pembuatan stang ulir pintu air koto selayan	koto selayan/ Dlm proses Identifikasi
1	03	18	02 Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Diluar DAK
			- Rehab Berat Saluran Banda Tengah	Kubu Tanjung/ Dlm proses Identifikasi
1	03	22	Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	
1	03	22	01 Pembangunan Kantor Lurah	
			- Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Belakang Balok	
			- Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan Kantor Lurah Ladang Cakiah	Ladang Cakiah/ Dlm proses Identifikasi
			- Lanjutan Peningkatan Pembangunan Lantai II Kantor Lurah Campago Ipuh Tahap 2	Campago Ipuh/ Dlm proses Identifikasi
			- Pembangunan Kantor Lurah Campago Guguk Bulek Tahap II	Campago Guguk Bulek/ Dlm proses Identifikasi
			- Perluasan Halaman Kantor Lurah Garegeh	Garegeh/ Dlm proses Identifikasi
			- Pembangunan Kantor Lurah Benteng Pasar Atas Lanjutan	Benteng Pasar Atas 1/ Dlm proses Identifikasi
			- Penambahan Pembuatan Aula Kantor Lurah Sapiran	Sapiran/ Dlm proses Identifikasi
			- Lanjutan Pembangunan Balai Kelurahan Tarok Dipo	Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi
1	03	22	02 Rehab Kantor Lurah	
			- Rehab Kantor Lurah Pulai Anak Air	Pulai Anak Air/ Dlm proses Identifikasi
			- Rehab Ruang Pelayanan Terpadu Kantor Lurah Pakan Kurai	Pakan Kurai/ Dlm proses Identifikasi
			- Rehab Berat Bangunan Lurah BKCKR Lanjutan	BCKR/ Dlm proses Identifikasi
			- Pembuatan Pagar Belakang Kantor Lurah Bukit Apit Puhun	Bukit Apit Puhun 2/ Dlm proses Identifikasi
			- Rehab Kantor Lurah Birugo	Birugo / Dlm proses Identifikasi
1	03	22	Pembangunan Rumah Serba Guna Koto Selayan	RW I RT 01 Kel. Koto SelayanDlm proses Identifikasi



KODE			PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI	KETERANGAN
1	03	22	Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan MKS	MKS / Dlm proses Identifikasi/ Kecamatan
1	03	22	Pembangunan Gedung Serba Guna MKS	MKS / Dlm proses Identifikasi/ Kecamatan
1	03	22	Pembangunan Gedung Terpadu RW III RT 01 Benteng Pasar Atas	BPA / Dlm proses Identifikasi/ Kecamatan
1	03	22	Pembuatan Gerai Kopi dan Gedung Pertemuan Ex. Kantor Lurah	Bukit Apit Puhun 1 /Dlm proses Identifikasi
1	03	22	Pembangunan Gerbang/Gapura	/Dlm proses Identifikasi
		-	Gerbang Kampung KB Kuriman Sejahtera Puhun Pintu Kabun	Puhun Pintu Kabun/ /Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Gapura Kampung Wisata Sanjai	/Dlm proses Identifikasi
		-	Pembangunan Gerbang Batas Kel. Kubu Tanjung dengan Kab. Agam	Kubu Tanjung/Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Gerbang Batas Wilayah Kelurahan Aur Kuning	Aur Kuning/Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Pintu Gerbang Masuk Gurun Panjang	Pakan Kurai/Dlm proses Identifikasi
		-	Pembuatan Pintu Gerbang Masuk Mesjid Darussalam Pakan Kurai	Pakan Kurai/Dlm proses Identifikasi
1	03	22	Pembangunan Tempat Wudhu Mushalla Al-Ikhlas Komplek Wisma Ganting Permai, Pulau Anak Air	Pulai Anak Air/Dlm proses Identifikasi/ Bansos
1	03	22	Lanjutan Pembangunan TPQ/TPSQ Al Akkabah Lakuang, Pulau Anak Air	Pulai Anak Air/Dlm proses Identifikasi/ Bansos
1	03	22	Pembangunan Gedung Terpadu (WC Umum, Mushalla, Poskeskel, Parkir Poskamling Benteng Pasar Atas)	Benteng Pasar Atas /Dlm proses Identifikasi
1	03	22	Pagar Pengaman Samping Balai Pemuda RW VI RT 01 Pakan Kurai	Pakan Kurai 2/Dlm proses Identifikasi
1	03	22	Rehab Balai Adat	Pakan Kurai/Dlm proses Identifikasi/Hibah
1	03	20	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
1	03	20	01 Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	DAK
		-	Pemasangan Pipa PDAM Jl. Mutiara 1 s/d Mutiara V	ATTS
		-	Pemasangan Pipa Air Minum RW 1 s/d RW 4	Kubu Tanjung
1	03	21	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau	
1	03	21	05 Pembangunan/ Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
		-	- Kawasan TMP	
		-	- Kawasan Simp. Surau Gadang	
1	03	21	Pelebaran PeNdestrian	Kominfo/ Benteng Pasar Atas 3/ Dlm proses Identifikasi
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
1	04	16	01 Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Dalam Proses Identifikasi
		-	Pemasangan Paving Block RW III RT 2 (Gang Mustika) Puhun Pintu Kabun	puhun pintu kabun
		-	Jalan menuju ke SDN 13 Bukit Sangkuik RW III RT 02	Bukit Apit Puhun 3
		-	Penutupan Riol & Pembuatan Jalan Setapak Belakang SMK PB RW II RT 04	ATTS



KODE				PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI	KETERANGAN
			-	pembuatan jalan lingkung dari jalan hotel pusako ke makam pasukan pisang manggis	manggis ganting
			-	perbaikan jalan setapak/plat beker jalan setapak SDN manggis	manggis ganting
			-	peningkatan jalan lingkung rw 2 campago guguk bulek	campago guguk bulek
			-	pengecoran jalan lingkung rt2/rw 5 puhun tembok	puhun tembok
			-	peningkatan jalan lingkung depan puskesmas anak air	pulai anak air
			-	pembuatan jalan lingkung rw 1/rt 04 campago guguk bulek	campago guguk bulek
			-	pembukaan akses jalan ke SDLB manggis ganting	manggis ganting
			-	pengecoran gang rw 01/rt 01 jalan paninjauan	garegeh
1	04	16	02	Pembangunan Riol	Dalam Proses Identifikasi
				- Pembuatan Riol Baru dari Toko Irama s/d Parak Kubang I RW VI RT 02 Tarok Dipo	tarok dipo
				- Pembuatan Riol Baru Gang Kesehatan s/d Gang Nan Tongga RW VRT 01 Tarok Dipo	tarok dipo
				pembuatan riol jalan rw 1/rt 1 koto selayan	koto selayan
1	04	16	03	Rehab/ peningkatan riol	Dalam Proses Identifikasi
				- Penutup Riol/Bandar depan SDN 03 Pakan Labuah	Pakan Labuah
				- Perbaikan Riol dari Ambun Suri s/d TK Adzkia	Tarok Dipo
1	04	16	04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Kecamatan Guguk Panjang	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Tinjauan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2014-2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Standar, SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan pertimbangan beberapa indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 sulit diimplementasikan dan diukur maka telah dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014

Berdasarkan lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota meliputi jenis pelayanan dasar Sumber Daya Air, Jalan, Cipta karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang dengan batas waktu pencapaian Tahun 2019 sebagaimana tabel 3.1 berikut;

Tabel 3.1

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota
(lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014)

No.	Jenis Pel. Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2019
A. Sub Bidang Sumber Daya Air					
	1. Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	a. persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	%	100%
			b. persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70%
B. Sub Bidang Jalan					
	1. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	%	60%
	2. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota	persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	%	100%
C. Sub Bidang Cipta Karya					
	1. Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	81,77%



No.	Jenis Pel. Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2019
	2. Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	a. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	60%
			b. persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk	20%
			c. persentase pengangkutan sampah	% Penduduk	70%
			d. persentase pengoperasian TPA	% pengope. TPA	60%
			e. persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	% penduduk	50%
	3. Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	IMB	60%
	4. Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Ha	10%
C. Sub Bidang Jasa Konstruksi					
	1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	60%
	2. Izin Usaha Jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	%	100%
D. Sub Bidang Tata Ruang					
	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi tata ruang	persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100%
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatnya ketersediaan RTH	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	50%

2. Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu :

- Rumah layak huni dan terjangkau
- Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.2

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tingkat Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional	Target Daerah 2014 (%)	Realisasi Daerah 2014 (%)
1	Rumah layak huni dan terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009 – 2025	6	1,5
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	2009 – 2025	8	2,14
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 – 2025	20	13

Tinjauan Kebijakan 100-0-100.

Target 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PU adalah target yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 dimana target tersebut adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Target tersebut secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya menjadi prioritas baik dipusat maupun di daerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Hal ini telah disikapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menjadikan target adalah 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak tersebut menjadi indikator kinerja utama RPJMD yang pelaksanaannya dijabarkan dalam renstra dan renja SKPD termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016-2021.

Penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2017 merupakan Tahun kedua perencanaan dalam periodisasi RPJMD Tahun 2016-2021, dimana RPJMD Kota Bukittinggi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum yang menjadi acuan masih dalam proses penyusunan.

▪ ***Tinjauan Visi dan Misi serta Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.***

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pengembangan Pariwisata;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu *"Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ; dengan prioritas pembangunan "Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur"*.

▪ *Tinjauan Rancangan Renstra DPU 2016-2021.*

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut maka Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi telah merumuskan rancangan renstra dengan visi : *"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal dan Taat Azaz Dalam Mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama, budaya dan berwawasan lingkungan"*.

Visi tersebut didukung dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana penunjang yang taat azaz dan ramah lingkungan
3. Meningkatkan kualitas permukiman dan prasarana lingkungan yang layak

Tabel 3.3
**Rancangan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
Dinas pekerjaan Umum 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an		
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan internal dan eksternal PU	1. Lancarnya pelayanan internal dan eksternal dinas	1. Program pelayanan administrasi perkantoran
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
		4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		5. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Daya Aparatur
	2. Meningkatnya ketersediaan peralatan dan sarana penunjang	1. Program peningkatan sarana dan prasarana ke PU an/kebinamargaan
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana penunjang yang taat azaz dan ramah lingkungan		
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penyediaan sarana penunjang yang layak bagi masyarakat, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya	1. Meningkatnya ketersediaan (kuantitas) serta kualitas jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapanya	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		3. Program Pembangunan Penerangan Lampu Jalan
		4. Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan
	2. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan (>30 cm), bahaya banjir dan dampak bencana alam lainnya (longsor).	1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		2. Program Pengendalian Banjir
		3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
		4. Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya
	3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk pertanian rakyat	1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	4. Meningkatnya penyediaan bangunan publik/Gedung pemerintah yang tertib	1. Program Pengembangan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum
2. Menyelenggarakan keterpaduan/sinergi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum guna menggerakkan sektor-sektor unggulan (pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa)		2. Program Pengelolaan Pembangunan Gedung
	5. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	6. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas serta pengelolaan Ruang Publik dan Terbuka Hijau	1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau
	1. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi serta keterpaduan pelaku usaha konstruksi	1. Program Pengaturan Jasa Konstruksi
	2. Tersedianya dokumen perencanaan, infrastruktur yang berkualitas berbasis data dan informasi yang akurat dan inovatif	1. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
3. Meningkatkan ketersediaan informasi rencana tata ruang	1. Tersedianya dokumen dan regulasi penataan ruang daerah	1. Program Perencanaan Tata Ruang
	2. Meningkatnya ketaatan terhadap dokumen tata ruang	1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatkan kualitas permukiman dan prasarana lingkungan yang layak		
1. Mengurangi proporsi permukiman kumuh di perkotaan	1. Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	1. Program Pengembangan Perumahan
		2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas pekerjaan umum secara substansi merupakan usaha untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bukittinggi menjadi masyarakat yang berekonomi mapan. Berdasarkan hal tersebut maka pada umumnya program dan kegiatan yang akan diselenggarakan adalah kegiatan-kegiatan dalam upaya memberikan akses dan penunjang untuk peningkatan perekonomian tersebut, seperti peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan, drainase dan lain-lain.

Namun selain berdasarkan upaya untuk pencapaian visi kepala daerah tersebut, kegiatan dan program yang akan diselenggarakan merupakan penjabaran dari beberapa dokumen perencanaan yang ada seperti RTRW, RPIJM, Master Plan Drainase, Dokumen RP4D, maupun dokumen perencanaan lainnya. Namun hal yang paling penting adalah kegiatan dan program ini merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun 2010-2015 sebagai acuan pelayanan dalam jangka menengah (lima tahun).

Sebagai penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan dan permukiman, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan strategis yang sebagian besar berdasarkan kegiatan bottom up sesuai usulan kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang tahun 2015 pada tataran kelurahan, kecamatan dan penyaringan melalui musrenbang kota yang diselaraskan dengan usulan dari SKPD dan usulan strategis lainnya serta mensinergikan dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan urusan ini akan disesuaikan kembali dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa terkait dengan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang nomenklaturnya berubah menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berupa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Namun karena operasional aturan terkait belum tersedia berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, maka dalam dokumen perencanaan ini masih memakai nomenklatur lama.

Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, direncanakan akan memuat 19 program strategis, yang terangkum dalam 2 urusan yaitu, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang serta Perumahan dan Pemukiman, dengan akumulasi program dan kegiatan yang ditampung dalam renja sebagaimana tabel berikut;

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan Tahun 2015 dan perkiraan Tahun 2016 serta Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Pemukiman dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta bersinergi dengan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 serta Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum 2016 – 2021 disamping mensinkronkan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan menjadi bahan pembahasan Musrenbang Kota dengan mengkompilasikan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu teknoratis, politis, partisipatif serta top down dan bottom up. Untuk itu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam penyusunan anggaran (DPA) Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebagai pedoman program kegiatan serta kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan pemukiman yang taat azas sesuai konsep penataan ruang dalam menunjang Bukittinggi sebagai kota wisata, pendidikan, perdagangan dan jasa.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

SYAHRIZAL, ST

Nip. 19611212 198602 1 002



Matrik Rancangan Program & Kegiatan Prioritas

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi

Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal dan Taat Azaz Dalam Mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama, budaya dan berwawasan lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRA M/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SAT.	RENCANA TAHUN 2017		PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018		KET
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1.	MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an											9.572.237.285		13.988.312.149	
	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan internal dan eksternal PU	1. Lancarnya pelayanan internal dan eksternal dinas	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi kantor yang didukung SDM yang sesuai	1	03	01		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran admnistrasi perkantoran tiap tahunnya		100%	5.030.215.975	100%	8.107.415.267	
				1	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat	jenis	4	6.050.000	4	6.655.000	
				1	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunik asi yang yang dibayar	jenis	4	1.000.000.000	4	3.659.040.000	
					1	03	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang	buah	42	817.284.710	43	899.013.181



								dilaksanakan						
			1	03	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	Kantor	1	150.820.615	1	165.902.677	
			1	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara	jenis	88	18.150.000	90	19.965.000	
			1	03	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	jenis	131	60.000.000	131	72.135.844	
			1	03	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggunaan yang dilaksanakan	jenis	61	62.000.000	61	75.201.500	
			1	03	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli	Kantor	1	9.000.000	1	11.900.350	
			1	03	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli	paket	1400	36.289.550	1400	39.918.505	
			1	03	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Tahun'	1	450.000.000	1	495.000.000	



			1	03	01	21	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	org	59	1.654.488.000	59	1.819.936.800	
			1	03	01	22	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan	Kantor	1	132.000.000	1	145.200.000	
			1	03	01	31	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	paket	126	363.000.000	126	399.300.000	
			1	03	01	34	Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	paket	126	121.133.100	126	133.246.410	
			1	03	01	34	Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur	paket	150	150.000.000	150	165.000.000	
			1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung		75%	1.105.000.000	80%	2.265.500.000	
			1	03	02	01	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	2	1.000.000.000	1	150.000.000	*



			1	03	02	09	Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	paket	1	50.000.000	1	55.000.000	
			1	03	02	22	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor dan Lanscape	paket	1	-	-	2.000.000.000	
			1	03	02	23	Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	paket	2	55.000.000	2	60.500.000	
			1	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas	1 stel/tahun	1 stel/tahun	65.250.000	2 stel/tahun	316.448.441	
			1	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	145	65.250.000	145	72.500.000	
			1	03	04		Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Daya Aparatur	Tingkat ketersediaan SDM sesuai bidang keahlian	%	70%	100.000.000	80%	110.000.000	
			1	03	03	01	Diklat Teknis Bidang ke PU an	Jumlah/jenis diklat ke PU an yang dilaksanakan	jenis	1	100.000.000	145	110.000.000	



				1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas		100%	21.771.310	100%	23.948.441	
				1	03	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	laporan.	2	10.890.000	2	11.979.000	*
				1	03	06	03	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis laporan.	2	4.907.100	2	5.397.810	
				1	03	06	05	Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	dok	2	5.974.210	2 dokumen	6.571.631	
				1	03	06	07	Penyusunan Renstra SKPD dan Revisi	Jumlah dokumen Renstra DPU 2015-2020`	dok	-	-	-	-	
		2. Meningkatkan ketersediaan peralatan dan sarana penunjang	Tingkat ketersediaan alat berat dan sarana/prasarana ke PU an	1	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana ke PU an/kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat ke PU an / Kebinamargaan		75%	3.250.000.000	75%	3.275.000.000	



				1	03	23	04	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat berat	jenis	14	3.000.000.000	1	3.000.000.000	*
				1	03	23	05	Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah pemeliharaan alat berat	jenis	4	250.000.000	4	275.000.000	
2.	MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana penunjang yang taat azaz dan ramah lingkungan											43.700.660.600		78.125.840.940	
	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penyediaan sarana penunjang yang layak bagi masyarakat, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya	1. Meningkatnya ketersediaan (kuantitas) serta kualitas jalan dan jembatan bangunan pelengkap nya	Persentase tingkat kondisi jalan dengan kondisi baik/ sedang	1	03	15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	Km		14.129.625.000		18.825.000.000	
				1	03	15	01	Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	Km		5.079.625.000		5.500.000.000	
								- Rehab Trotoar dan Bandar sepanjang Jl. Ibrahim Musa	M'	0		-			dikerjakan Tahun 2016
								- Perbaikan Trotoar sepanjang jalan Bukit Apit	M'	750		-			Bukit Apt Puhun/ dlm Proses Identifikasi
								- Perbaikan Trotoar Jalan ST. Syahrir	M'	400		330.000.000			Tarok Dipo/ Dlm Proses Identifikasi
								- Peningkatan Trotoar Simpang Surau Gadang s/d	M'	885		730.125.000			Campago Ipih/ Dlm Proses Identifikasi



							Simpang Jirek						i
							- Jl. Guru Tuo	M'	200	165.000.000			
							- Jl. H. Miskin	M'	0	aset prop.			
							- Jl. Pemuda	M'	0	aset prop.			aset provinsi
							- Jl. Hamka	M'	800	pending			
							- Jl. Bukit Apit	M'	0	-			
							- Jl. Sudirman	M'	1883	1.553.475.000			
							- Jl. A. Rivai	M'	535	441.375.000			
							- Jl. Guru Hamzah- M. Syafei, Jl. Urip Sumoharjo	M'	382	-			
							- Jl. Mandiangin	M'	400	330.000.000			
							- Jl. Veteran	M'	642	529.650.000			
							- Jl. Kesehatan	M'	489	pending			
							- Jl. Soekarno - Hatta	M'	1200	1.000.000.000			
							- Jl. Agus Salim	M'	393	pending			



								-	Jl. Imam Bonjol	M'	273	-	pending			
								-	Jl. Panorama	M'	901	-	pending			kiri/kanan
				1	03	15	02	Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	Km			2.000.000.000		5.500.000.000	
								-	Pembuatan Trotoar dari Rakik sampai ke Batas Jalan Koto Selayan	m	0	-				Ladang Cakiah/lahan tidak mencukupi
								-	Trotoar di Kiri Jalan Tambuo Pakan Labuah (Trotoar Jalan dari Simp. By Pass ke Pakan Labuah	m	500	412.500.000				Pakan Labuah/ Dlm proses Identifikasi
								-	pembuatan trotoar jl bahar kamil	m	500	412.500.000				manggis gantung/ Dlm proses Identifikasi
								-	pembuatan trotoar dari depan mushalla at taufiq ke simpang by pass koto dalam	m	150	123.750.000				pulai anak air/ Dlm proses Identifikasi



						- pembuatan trotoar dari simpang gudmulap sampai SDN 12	m	500	412.500.000			puhun pintu kabun/ Dlm proses Identifikasi
						- Pembuatan Trotoar dari Batas Nagari Kubang Putih ke Kapalo Koto	m	500	-			Pakan Labuah/ Lahan merupakan saluran irigasi
						- Lanjutan Pembangunan Trotoar Jalan Sudirman (simpang Yarsi s/d Simpang DPRD)	m					BCKR/ Dlm proses Identifikasi
						- lanjutan pembuatan trotoar rt 1 rw 1 Jirek	m					kubu gulai bancah/ Dlm proses Identifikasi
						<u>Reses DPRD</u>						
						- Pembangunan trotoar dan taman sepanjang Mutiara Indah I – Unggek Dt. Bagindo I (penutupan bandar.	M'	250	500.000.000			Kecamatan Guguak Panjang
						- Perbaikan jalan dan pembuatan trotoar jalan ke	M'					Ladang Cakiah Aur Birugo



								Kubu Tabak						Tigo Baleh
								- Meningkatkan jalan di jalan raya "Tabek si En"						Ladang Cakiah Aur Birugo Tigo Baleh
								- Perbaikan jalan dari simpang Sumua sampai Rakik kira 25 M						Ladang Cakiah Aur Birugo Tigo Baleh
								- Perbaikan jalan di Prumahan Bukittinggi Indah						Pakan Labuah Aur Birugo Tigo Baleh
								- Perbaikan jalan dan trotoar di tigo baleh						Aur Birugo Tigo Baleh
								- Pembangunan trotoar dimuka kampus stisipol						ATTS
								- Pemasangan Paving Slope Trotoar Jl. U. Dt. Bagindo RT 03 RW 03						ATTS
								- Perbaikan trotoar Kel. Pakan Kurai. di jl. Prof Hamka						Kel. Pakan Kurai. di jl. Prof Hamka
				1	03	15	03	Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan	M'	2350	3.000.000.000	3.450.000.000	Diluar DAK
								Musrenbang						



						-	Jl. Syech Arrasuli (dari Pasar Bendi ke Tugu Adipura)	M'	200	376.481.000			ATTS/ Dlm proses Identifikasi
						-	Jl. Kemuning RT 01	M'	50	33.750.000			Aur Kuning/ Dlm proses Identifikasi
						-	Peningggian Badan Jalan RT.02 RW 1 Parit Antang	M'	50	33.750.000			Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
						-	Pengaspalan Jalan Labuah Baru - Parit Antang	M'	300	202.500.000			Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
						-	Pengaspalan Jalan Peningkatan Badan Jalan Tengah Jua	M'	1000	675.000.000			Aur Kuning/ Dlm proses Identifikasi
						-	Peningkatan Jalan Simp. Gulidiak sampai Perbatasan Talao	M'	450	303.750.000			manggis gantung/ Dlm proses Identifikasi
						-	Pengasapalan Simp. Balai- Balai ke	M'	500	337.500.000			pulai anak air/ Dlm proses



							Lakuang						Identifikasi
							- Pengecoran bahu Jalan Jl. Sertu Kamaruddin	M'	800				Sapiran/ Dlm proses Identifikasi
							- Pengecoran Bahu Jalan Sertu Kamarudin	M'	800				Sapiran/ Dlm proses Identifikasi
							- Peningkatan Jalan Baru (Manunggal 2016) Talao	M'	800				Campago Guguk Bulek/ Dlm proses Identifikasi
							- Pengaspalan Jalan lanjutan RW 3 RT 3 RT 4 Puhun Tembok	M'	750				Puhun Tembok/ Dlm proses Identifikasi
							- pengecoran bahu jalan perikanan rw 5	M'					guguk bulek/ Dlm proses Identifikasi
							- cor bahu jalan rw 01/rto1 jalan paninjauan	M'					garegeh/ Dlm proses Identifikasi
							- pemotongan tikungan (jalan pabidikan) di	M'					puhun pintu kabun/ Dlm



							kasiak bandaro						proses Identifikasi
							Identifikasi Bidang			-			
						-	Jl. Banto Darano	M'	465	309.180.433			
						-	Jl. Perawat, I, II,V	M'	600	275.307.413			
						-	JL. Hazairin II	M'	179,5	110.129.866			
						-	Jl. Nangka (Ruas I s/d III)	M'	608,5	98.109.678			
						-	Jl. Bukit Cindai	M'	122	112.577.351			
						-	Jl. Hujerat (ruas 1 dan 2)	M'	140,5	278.814.334			
						-	Jl. Sijolang I	M'	103,2	84.526.343			
						-	Jl. Sitopo Raya	M'	169	94.345.434			
						-	Jl. TDR	M'	395	297.464.000			
		185				-	Jl. Padat Karya II.B	M'	625	345.672.000			
						-	Jl. Padat Karya I.A	M'	575	321.160.000			
						-	Jl. Padat Karya II	M'	135	105.451.000			



							-	Jl. Padat Karya II.A	M'	625	345.672.000			
							-	Jl. Padat Karya II.B	M'	575	321.160.000			
							-	Jl. Padat Karya III.A	M'	580	323.611.000			
							-	Jl. Padat Karya III.B	M'	515	291.745.000			
							-	Jl. Tabek Tuhua	M'	790	426.563.000			
								Reses DPRD						
							-	Pengaspalan jalan lingkung di Kelurahan Tarok Dipo	M'					
							-	Pengaspalan jalan penghulu basa dibelakang kampus stisipol	M'					
							-	Jalan di depan komplek bedeng indah (mohon didirikan tiang – tiang lampu jalan dan jalannya di aspal)	M'					



								- Peningkatan jalan Eks Manunggal Sakato Komplek Cendana PLN – Komplek Guci Manda RT 02 RW 01 dan Jl. Ranah samping Mushalla Darul Muttaqin RT 02 RW 01	M'	3000					Garegeh MKS
								- Pemeliharaan jalan kecamatan MKS	M'	3500					MKS
				1	03	15	04	Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun	Km		2.500.000.000		2.875.000.000	Diluar DAK
								Musrenbang				-			
								- Pengaspalan Jalan Setapak Parak Tinggi	M'	600					Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi
								- Pembuatan Jalan Baru dari Simpang Kuburan Pincuran Gauang s/d tembus ke Bandar Balang dan Pembuatan Riol	M'	200					Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi



							- Pengaspalan Jalan Lingkar Usaha Tani IKPS RT 01 RW V Bukit Cegek	M'					Bukit Apit Puhun 4/ Dlm proses Identifikasi
							- Pengaspalan Jalan dan Pembuatan Riol Jalan ke Lapangan Bola Kaki, Pembuatan Tribun Mini, Pembuatan Drainase Keliling Lapangan	M'					Birugo / Dlm proses Identifikasi
							- Pembuatan Pengaman Jalan Penurunan Ikua Labuah	M'	100				Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
							Identifikasi Bidang				-		
							- Jl. Swadaya By Pass	M'	206,5	240.591.600			
							- Ipuah Loweh	M'	452,5	364.248.000			
							- Jl. Manunggal	M'	293,5	424.005.600			
							- Jl. Gulai Bancah (Kubu)	M'	63	85.638.000			



							-	Jl. Manunggal (Talao)	M'	800	1.320.000.000			
							-	Pengaspalan jalan lanjutan RW3 RT 3,4 Puhun Tembok	M'	750	742.500.000			
							-	Jl. Syech Arrasuli (dari Pasar Bendi ke Tugu Adipura)	M'	200	396.000.000			
							-	Jl. Simp. Balaiz ke Lakuang	M'	0	-			
							-	Jl. Dt Majo Basa Nan Kuniang	M'	0	-			
							-	Simp. Jl. Batang Pulai ke By Pass	M'	0	-			
				1	03	15	05	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Unit	850.000.000		1.500.000.000	
							-	Jembatan Sanjai Dalam II	paket	1	850.000.000			
								Reses DPRD						
							-	Pembangunan jembatan penghubung Pakan Kurai-Sawah Paduan						
				1	03	15	06	Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang	Unit	700.000.000		1.500.000.000	



								dibangun						
								- Box Culver Syech Jamil Jambek	paket	1	700.000.000			
								Reses DPRD						
								- Jl. Hakam Kari Sulaiman RT 03 RW 03 Tengah Jua Aur Kuning	paket	1				
								- Jl. Banda Kubu RT 03 RW 03 Tengah Jua Aur Kuning	paket	1				
				1	03	15	07	Penyusunan DED Jalan Havid Jalil - Soekarno Hatta	Jumlah DED yang disusun	paket	1	-	-	- Proses Identifikasi
				1	03	18		Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan	Km		1.603.535.600	1.844.065.940	
				1	03	18	01	Rehabilitasi/Pemeli- haraan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin	Km		818.267.200	941.007.280	
				1	03	18	03	Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/	M'		319.943.900	367.935.485	



								Pemeliharaan						
				1	03	18	04	Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin	Km		465.324.500		535.123.175
				1	03	18	05	Pemeliharaan berkala jalan dalam Kota (DAK 2017)	Panjang Jalan yang dilaksanakan pemeliharaan berkala	Paket	18	-		-
				1	03	18	06	Peningkatan jalan dalam Kota (DAK 2017)	Panjang Jalan yang dilaksanakan peningkatan	Paket	9	-		-
				1	03	21		Program Pembangunan Penerangan Lampu Jalan	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	%		8.912.500.000		7.019.625.000
				1	03	21	01	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	titik	3300	750.000.000	3630	1.100.000.000
				1	03	21	02	Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi	titik	50	600.000.000	55	660.000.000



						- pemasangan lampu di gapura gerbang masuk kelurahan puhun pintu kabun	Lampu	5				puhun pintu kabun/ Dlm proses Identifikasi
						- pengadaan lampu jalan gang gloria	tiang	3				campago ipuh/ Dlm proses Identifikasi
						<u>Reses DPRD</u>						
						- Penerangan jalan untuk Bukit Cangang	paket	1				
						- Pengantian lampu jalan di daerah sumua tigo baleh	paket	1				
						- Pemasangan lampu jalan Solar Cell Jl. Manunggal belakang SMIP Paramita	unit	10				Puhun Tembok MKS
						- Penerangan jalan dalam gang RT 05 RW 02 Campago Ipuah	titik	20				RT 05 RW 02 Campago Ipuah
						Perbaikan lampu jalan wisata Jalan Asrama PHB Kel. Bukit Cangang Kayu						



									Ramang						
				1	03	21	03	Revitalisasi Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum direvitalisasi			3.500.000.000	1	3.850.000.000	
								-	Jl. Soekarno - Hatta	Paket	1	3.500.000.000			
				1	03	21	04	Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar	rekening	1	4.062.500.000	1	5.078.125.000	
				1	03	22		Program Sistim Informasi / Data Base Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan	%	20%	0 1.200.000.000	60%	-	
				1	03	22	01	Aktualisasi Data Jalan Kota Bukittingi	Persentase jalan yang di aktualisasi	paket	1	-	1	-	
				1	03	22	02	Aktualisasi Data Jembatan Kota Bukittingi	Persentase jalan yang di aktualisasi	paket	1	-	1	-	
				1	03	22	03	Penyusunan Leger Jalan	jumlah dokumen leger jalan	dokumen	1	- 1.200.000.000	0	-	



				1	03	21		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	%	60%	100.000.000	80%	181.500.000	
				1	03	22	05	Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan	event	5	100.000.000	5	181.500.000	
		2. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan (>30 cm), bahaya banjir dan dampak bencana alam lainnya (longsor).	Penurunan Jumlah wilayah/titik yang terkena dampak genangan (banjir) dan longsor	1	03	16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	%		5.100.000.000		5.865.000.000	
				1	03	16	01	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	Km	0	2.500.000.000	0	2.875.000.000	
								- Pembangunan Drainase Jalan Raya Tigo Baleh	M'	200	232.500.000				Pakan Labuah/ Dlm proses Identifikasi
								- Pembuatan Saluran Drainase depan TK Garegeh ke	M'	300	429.000.000				



								Tambuo						
							-	Pembuatan drainase rt 02/rw 03 dan rt 06/rw 01 kel. Campago guguk bulek	M'	400	478.400.000			C. guguk bulek/ Dlm proses Identifikasi
							-	Lanjutan Pembangunan Dainase/ Trotoar dari Simp. Limau ke Simpang Gantiang	M'	150	234.000.000			
							-	Pembuatan Drainase dari Simp. Aua ke depan Mesjid Jamiak Tarok Dipo	M'	150	200.000.000			
							-	Pembuatan Drainase Jalan melati	M'	150	200.000.000			
							-	Pembuatan Drainase Bukit Apit (Pipa 15Inchi)	M'	400	240.000.000			
							-	Pembuatan Drainase Jl. Gurun Panjang	M'	175	250.000.000			
							-	pembuatan drainase rw 04 kel campago guguk bulek	M'	300	375.000.000			C. guguk bulek



							- pembuatan drainase jl lingkar rt 01/rw III campago ipuh	M'	350	450.000.000				campago ipuh
							- PembaNGunan Plat Penutup Drainase di Jl. Unngek 2 ATTS	M'						ATTS / Im proses Identifikas i
							- Pembuatan Drainase Lakuang RT 03 RW 03	M'						Bukit Apit Puhun/ Dlm proses Identifikas i
							- Perbaikan Riol dan Pembuatan Sambungan Riol dari Ujung Bukit Baruah s/d Pakan Kurai	M'	50					Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikas i
							- Drainase Jalan Labuah Baru Sampai Jembatan	M'	300					Parit Antang/ Dlm proses Identifikas i
							- Lanjutan Pendaman Bandar Tangkurai Koto Katiak depan Mesjid Jami'	M'	30					Parit Antang/ Dlm proses Identifikas i
							- Pembuatan tali bandar dari griya madani ke jalan ranah ke	M'	1,5					garegeh/ Dlm proses Identifikas



							batas agam						i
							- pembuatan pintu air bendung bandar rt 1 rw 1 koto selayan	M'	8x10				koto selayan/ Dlm proses Identifikasi
							- Pembangunan Bandar Batu Hampar - DKK - Jl. M. Yamin - Simpang Raya - By Pass	M'	200				DAK 2016
							- pembuatan drainase dari koto ateh sampai koto bawah	M'	500				pulai anak air/ Dlm proses Identifikasi
							- Pembuatan Drainase Banda Redek sampai ke Pulai	M'					lahan tidak bebas
							- Drainase dari Tabek Tuhua ke Panganank dan Pintu Kabun	M'					lahan tidak bebas
							- Saluran Drainase Got Ngarai Dekat Aliran Sungai	M'	100				Sudah dilaksanakan
							- Pembangunan Drainase Kelok Cindua	M'	350				Sudah dilaksanakan
							- lanjutan dam batang tambuo	M'	200				koto selayan/ Dlm



								koto selayan						proses Identifikasi
								- pembuata drainase rt 2/rw 2 puhun tembok	M'					puhun tembok / Dlm proses Identifikasi
								- Pembangunan Drainase Kawasan Jalan By pass Tabek Gadang	M'					Dlm proses Identifikasi
				1	03	16	03	Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara	M'	5700	600.000.000	5700	690.000.000
				1	03	16	04	Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan	M'	2755	2.000.000.000	5000	2.300.000.000
								- Peningkatan Drainase balai banyak	M'	200	150.000.000			
								- perbaikan Gorong-Gorong (5 lokasi)	lokasi	5	120.000.000			
								- Kelanjutan drainase jl. Mandiangin	M'	650	900.000.000			campago ipuh/ Dlm proses Identifikasi



													i
						-	Pembuatan Pagar Pengamanan Bandar RT 02 RW II Birugo	M'	100	50.000.000			Birugo/ Dlm proses Identifikasi
						-	Pelebaran drainase Pembangunan Drainase primer	M'	900	575.000.000			Garegeh/ Dlm proses Identifikasi
						-	Perbaikan Drainase, Plat Beton bertulang Gang Mahoni dan Gang Apel	M'	200				ATTS/ Dlm proses Identifikasi
						-	Normalisasi Saluran dan Pembuatan Trotoar Riol di Depan Reklame Budi	M'	100				ATTS/ Dlm proses Identifikasi
						-	Perbaikan Riol di Bawah Hotel Amali (Jl. Bawah Pasar)	M'	100				ATTS/ Dlm proses Identifikasi
						-	Perbaikan Riol Cor Beton di Jalan Unggek Dt Bagindo	M'	150				ATTS/ Dlm proses Identifikasi
						-	Perbaikan Polongan/Jembatan Simpang Tarok dan	M'	12x8				Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi



							Banda Nagari Simpang Tarok						i
							- Pembuatan Riol dan Pembagian Air RT 01/RW 05 Gurun Tanjung	M'	200x2				Pakan Kurai/ Dlm proses Identifikasi
							- peninggian dam saluran air	M'					puhun tembok
							- perbaikan saluran bandar malang	M'	100				campago ipuh/ Dlm proses Identifikasi
							- perbaikan drainase puhun tembok	M'					puhun tembok/ Dlm proses Identifikasi
							- Lanjutan Drainase depan fakultas hukum Muhamadiyah	M'	250	-			2016
							- Perbaikan Riol di Depan Kemenag dan Rehab Gorong- Gorong serta perbaikan drainase Jl. Perwira Ujung, jl. Manunggal, Jl. Prona, Jl. Hazairin	M'		-			2016
							Reses DPRD						



							- Perbaikan drainase Koto Dalam dan Sumurapak						
							- Pembangunan roil di ujung Bukik Baruah melalui Pakan Kurai dan Pulai Anak Air						
							- Penangan banjir di Masjid Baiturrahman						
							- Penanganan banjir di Tabek Tuhua						
							- Penanganan luapan air yang berasal dari drainase di Tambuo (Jl. Tanjakan menuju simpang tugu Tigo Baleh)						
							- Penanganan banjir di Koto Katiak di depan Masjid Jami' Tigo Baleh						
							- Renovasi drainase yang bocor di Banda Pusaro						Pakan Labuah Aur Birugo Tigo Baleh
							- Perbaikan drainase di Kapalo Koto						Pakan Labuah Aur Birugo



												Tigo Baleh
						-	Peninjauan Banda Tengah dan Banda Ladang Putuih					Pakan Labuah Aur Birugo Tigo Baleh
						-	Pembuatan roiol / got Gang Cemara	M'	400			
						-	Perbaikan riol Belakang SMA 3	M'	200			
						-	Renovasi drainase dari simpang Kubu menuju Koto Selayan	M'				
						-	Peningkatan Drainase Jl. Loweh RT4 RW2	M'				Campago Ipuah
						-	Peningkatan Drainase Gang Ramura RW 2	M'				Campago Ipuah
						-	Perbaikan riol	M'				
						-	Plat beton bertulang saluran dijadikan trotoar dan taman Jl. Mutiara I RT 04 RW 03	M'	250			Tarok Dipo



							-	Plat beton bertulang saluran dijadikan akses jalan tembus ke jln belakang gudang pupuk Pusri Jl. Mutiara RT 04 RW 03	M'	200					Tarok Dipo
							-	Plat beton bertulang saluran dijadikan trotoar dan taman Jl. U Dt. Bagindo I RT 04 RW 02	M'	200					Jl. U Dt. Bagindo I RT 04 RW 02
							-	Plat beton bertulang saluran dijadikan akses jalan tembus dari Jl. Syekh Jamil Jambek ke ATTS	M'	100					Jl. Sy. Jamil Jambek samping SMP 8 RT 04 RW 02
							-	Plat beton bertulang saluran dijadikan trotoar - Jl. Mutiara III RT 04 RW 03 dan - Jl. Mutiara IV RT 04 RW 03	M'	400					Jl. Mutiara III dan - Jl. Mutiara IV Tarok dipo
							-	Perbaikan drainase RT 02 RW 06 Puhun Tembok	M'						Puhun Tembok



								- Lanjutan pembuatan drainase Komplek Perumahan Guguak Randah RT 05 RW 02	M'	600					Kel. Campago Guguak Bulek
								- perbaikan drainase Mulai dari area mushalla Ath Thayyibah, Bandar Nagari RT 02 RW III, RT 01 RW III sampai polsekta							
								- perbaikan drainase sekitar tanah si apau RT 01, RW II							
				1	03	25		Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan	%		550.000.000		632.500.000	
				1	03	25	01	Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali	M	20000	250.000.000	20000	287.500.000	
								- Rutin (pembersihan sungai)	M'	20000		200.000.000		-	
								- Pengerukan Riol Memotong Jalan di Samping Kantor Kodim	M'	100		50.000.000			



								0304 Agam.						
				1	03	25	03	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibangun	paket	1	300.000.000	1	345.000.000
								- Pembuatan Sumur Resapan Gudmulap		paket	1	300.000.000		
								- Pembuatan Sumur Resapan RT 3, RT 2, SMK Paramitha Puhun Tembok		titik	1	-		2016
								- Pembuatan Sumur Resapan RW II RT 03 Jl. Tabek Tuhua (menuju Mesjid Nurul Huda) Puhun Pintu Kabun		unit	1	-		Lahan tidak bebas
								- Pembuatan Sumur Resapan RW III RT 2 Jl. Pintu kabun		titik	3	-		Lahan tidak bebas
								<u>Reses DPRD</u>						
								- Revitalisasi Tambuo dari Bukik Garegeh sampai Manggih Gantiang						



								-	Penaggulangan banjir di beberapa titik, seperti di depan gudang peluru, di depan rumah Tek Pin, di Mesjid Nurul Wathan, dan Tsanawiyah						
								-	Penanganan luapan air yang berasal dari drainase di Tambuo (Jl. Tanjakan menuju simpang tugu Tigo Baleh)						
								-	Penanganan banjir di Koto Katiak di depan Masjid Jami' Tigo Baleh						
				1	03	17			Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	%		4.000.000.000		4.600.000.000
				1	03	17	04		Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun	M'		2.000.000.000	2585	2.300.000.000
								-	Pemasangan Dam Tebing Puskesmas Nilam Sari		M'	150			Koto Selayan/ Dlm proses Identifikas



													i
						-	Dam Tebing Belakang Kantor Lurah Garegeh	M'	10x50				Garegeh/ Dlm proses Identifikasi
						-	Dam Tebing dan Penutupan Pagar Pusara Panorama	paket	2				Kayu Kubu / Dlm proses Identifikasi
						-	Pendaman Kiri dan Kanan Tebing Jl. A. Yani yang membelakangi Taman Benteng dan TMSBK						Benteng Pasar Atas 4 /Dlm proses Identifikasi
						-	Pendaman Tebing Batang Tambuo mulai dari Kantor Lurah Parit Antang sampai ke Mushalla Arafah Ikua Labuah	m	300				Parit Antang/ Dlm proses Identifikasi
						-	Melanjutkan Pendaman Tebing Puskesmas dan Kantor Lurah Parit Antang (Pemasangan Batu Bronjong)	m	50				Parit Antang / Dlm proses Identifikasi



				1	03	17	05	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	M'	2350	2.000.000.000	2585	2.300.000.000	
								- Pemotongan Tikungan dan Penedaman Jalan Pabidikan (Kasiak Badoro)	Paket	1		200.000.000			
								- Dam Pekuburan Koto Manggis	Paket	1		200.000.000			
								- Pendaman Tebing Jl. Pasar Ikan Lama	M'	144					Benteng Pasar Atas/ Dlm proses Identifikasi
								- Pendaman Jalan RT 01 RW V (samping posyandu Matahari)							Bukit Apit Puhun/ Dlm proses Identifikasi
								- Pendaman dan Scrub Dinding Tebing Jalan Simp Banto Laweh menuju Ngarai	m	3000					Kayu Kubu/ Dlm proses Identifikasi
								- Pembuatan Dam Jalan Samping	m	450					Manggis Ganting/ Dlm



								Pekuburan Koto MAnggis							proses Identifikasi
								Reses DPRD							
								- Penguatan tebing Jl. Puding Mas belakang panti							kel. Aur Kuning
								RPIJM							
				1	03	17	04	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	titik	1	-	1	-	BPBD*
				1	03	19		Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/normalisasi	%	47%	1	555.000.000	65%	610.500.000
				1	03	19	01	Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	M'		555.000.000	300	610.500.000	
								- Lanjutan Dam/ Lenning Sungai Batang Agam	M'	300	555.000.000				
		3.	Meningkatnya cakupan air irigasi untuk pertanian	1	03	18		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan	Persentase DI yang beririgasi teknis	%		488.000.000		561.200.000	



		pertanian rakyat	rakyat					Jaringan Pengairan Lainnya							
				1	03	18	01	Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun	M'		288.000.000		331.200.000	Diluar DAK
								- Pembangunan Bandar Irigasi Kubu Banda		M'	300	250.000.000			Kubu Tanjung/ Dlm proses Identifikasi
								- Pembangunan Pintu Air Stang Ulir Banda Gadang		unit	2	5.000.000			Kubu Tanjung/ Dlm proses Identifikasi
								- Pembuatan Pintu Air di Pinggir Jalan Raya Tigo Baleh		M'	1	16.500.000			Ladang Cakiah/ Dlm proses Identifikasi
								- pembuatan stang ulir pintu air koto selayan		unit	1	16.500.000			koto selayan/ Dlm proses Identifikasi
								Reses DPRD							
								- Pembangunan/ perbaikan saluran irigasi Pakan Labuah Aur Birugo Tigo							



								Baleh							
				1	03	18	02	Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan	M'		200.000.000		230.000.000	Diluar DAK
								- Rehab Berat Saluran Banda Tengah	Rehab Berat Saluran Banda Tengah	M'	1000	200.000.000			Kubu Tanjung/ Dlm proses Identifikasi
		4. Meningkatkan penyediaan bangunan publik/Gedung pemerintah yang tertib	Jumlah gedung yang dibangunan	1	03	22		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	unit		800.000.000		6.650.000.000	
				1	03	22	01	Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangunan	Unit	7	-			* ke SKPD masing- masing
								- Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Belakang Balok	Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Belakang Balok			1.600.000.000			



								-	Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan Kantor Lurah Ladang Cakiah	m2	300	1.100.000.000	3	5.000.000.000	Ladang Cakiah/ Dlm proses Identifikasi
								-	Lanjutan Peningkatan Pembangunan Lantai II Kantor Lurah Campago Ipuh Tahap 2			550.000.000			Campago Ipuah/ Dlm proses Identifikasi
								-	Pembangunan Kantor Lurah Campago Guguk Bulek Tahap II			1.600.000.00 0			Campago Guguk Bulek/ Dlm proses Identifikasi
								-	Perluasan Halaman Kantor Lurah Garegeh	m	20	250.000.000			Garegeh/ Dlm proses Identifikasi
								-	Pembangunan Kantor Lurah Benteng Pasar Atas Lanjutan			500.000.000			Benteng Pasar Atas 1/ Dlm proses Identifikasi
								-	Penambahan Pembuatan Aula Kantor Lurah Sapiran			200.000.000			Sapiran/ Dlm proses Identifikasi
								-	Lanjutan Pembangunan Balai Kelurahan Tarok Dipo	m	60	500.000.000			Tarok Dipo/ Dlm proses Identifikasi



															i
				1	03	22	02	Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab	unit	5	-	3	1.650.000.000	* ke SKPD masing-masing
								- Rehab Kantor Lurah Pulai Anak Air				500.000.000			Pulai Anak Air/ Dlm proses Identifikasi
								- Rehab Ruang Pelayanan Terpadu Kantor Lurah Pakan Kurai				150.000.000			Pakan Kurai/ Dlm proses Identifikasi
								- Rehab Berat Bangunan Lurah BKCKR Lanjutan				500.000.000			BCKR/ Dlm proses Identifikasi
								- Pembuatan Pagar Belakang Kantor Lurah Bukit Apit Puhun				100.000.000			Bukit Apit Puhun 2/ Dlm proses Identifikasi
								- Rehab Kantor Lurah Birugo				500.000.000			Birugo / Dlm proses Identifikasi
				1	03	22	02	Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi	Terlaksanannya Pembangunan RSUD Kota Bukittinggi	unit	1	-	-	-	DKK



				1	03	22	03	Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Terlaksanannya Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	unit	1	-	-	-	Sekwan DPRD
				1	03	22	04	Pembangunan Pustaka Daerah	Terlaksanannya Pembangunan Pustaka Daerah	unit	1	-	-	-	Arsip
				1	03	22	05	Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup	Terlaksanannya Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup	unit	1	-	-	-	LH
				1	03	22	06	Pembangunan Musabata	Terlaksanannya Pembangunan Musabata	unit	1	-	-	-	Arsip/Bud par
				1	03	22	07	Pembangunan Pendopo Rumah Dinas Walikota	Terlaksanannya Pembangunan Pendopo Rumah Dinas Walikota	unit	1	-	-	-	Sekretariat
				1	03	22	08	Pembuatan Halte	Jumlah Halte terbangun	unit	4	-	-	-	KOMINFO
				1	03	22	09	Pembangunan Rumah Serba Guna Koto Selayan	Luas Bangunan yang dibangun	m2	63	-	-	-	* ke SKPD masing-masing
				1	03	22	10	Pembuatan Gerai Kopi dan Gedung Pertemuan Ex. Kantor Lurah	Unit Gerai Kopi dan Gedung Pertemuan Ex. Kantor Lurah	unit	1	-	-	-	* ke SKPD masing-masing
				1	03	22	11	Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan MKS	Jumlah luas gedung yang dibangun	unit	-	-	-	-	MKS / Dlm proses Identifikasi/ Kecamatan



				1	03	22	12	Pembangunan Gedung Serba Guna MKS	Jumlah luas gedung yang dibangun	unit			-			MKS / Dlm proses Identifikasi/ Kecamatan
				1	03	22	13	Pembangunan Gedung Terpadu RW III RT 01 Benteng Pasar Atas	Jumlah luas gedung yang dibangun	unit			-			BPA / Dlm proses Identifikasi/ Kecamatan
				1	03	22	14	Pembuatan Gedung Rawat Inap Puskesmas Nilam Sari	Jumlah luas gedung yang dibangun	unit	8x4		-			DKK
				1	03	22	15	Pembangunan Gerbang/Gapura	Gapura terbangun;	unit	9					/Dlm proses Identifikasi
								-	Gerbang Kampung KB Kuriman Sejahtera Puhun Pintu Kabun	unit	1	40.000.000				Puhun Pintu Kabun/ /Dlm proses Identifikasi
								-	Pembuatan Gapura Kampung Wisata Sanjai	unit	1	40.000.000				/Dlm proses Identifikasi
								-	Pembangunan Gerbang Batas Kel. Kubu Tanjung dengan Kab. Agam	unit	1	40.000.000				Kubu Tanjung/Dlm proses Identifikasi



								-	Pembuatan Gerbang Batas Wilayah Kelurahan Aur Kuning	unit	1	40.000.000				Aur Kuning/Dlm proses Identifikasi
								-	Pembuatan Pintu Gerbang Masuk Gurun Panjang	unit	1	40.000.000				Pakan Kurai/Dlm proses Identifikasi
								-	Pembuatan Pintu Gerbang Masuk Mesjid Darussalam Pakan Kurai	unit	1	40.000.000				Pakan Kurai/Dlm proses Identifikasi
									Reses DPRD			-				
									Pembangunan gapura di Kubu Tanjung (Batas antara Kubu Tanjung dengan Kubu Ketaping)	unit	1	40.000.000				Kubu Tanjung
									Pembangunan gapura Kabun Pulasan Puhun Tembok	unit	1	40.000.000				Puhun Tembok
									pembangunan Gapura RT 01 RW II . Kel. Pakan Kurai		1	40.000.000				RT 01 RW II . Kel. Pakan Kurai
				1	03	22	16	Pembangunan Gedung Terpadu (WC Umum, Mushalla, Poskeskel, Parkir Poskamling	Jumlah gedung dibangun	unit	1	-				Benteng Pasar Atas /Dlm proses Identifikasi



								Benteng Pasar Atas)							i
				1	03	22	17	Pagar Pengaman Samping Balai Pemuda RW VI RT 01 Pakan Kurai	Jumlah pagar terbangun	unit	12	-			Pakan Kurai 2/Dlm proses Identifikasi
				1	03	22	18	Pembangunan Tempat Wudhu Mushalla Al-Ikhlas Komplek Wisma Ganting Permai, Pulai Anak Air	Jumlah unit terbangun	unit	8x3	-			Pulai Anak Air/Dlm proses Identifikasi/ Bansos
				1	03	22	19	Lanjutan Pembangunan TPQ/TPSQ Al Akkabah Lakuang, Pulai Anak Air	Jumlah unit terbangun	unit	10x5	-			Pulai Anak Air/Dlm proses Identifikasi/ Bansos
				1	03	22	20	Rehab Balai Adat	Jumlah unit terbangun	unit	20x12	-			Pakan Kurai/Dlm proses Identifikasi/Hibah
							21	RPIJM							
				1	03	22	22	Revitalisasi Kawasan dan Rumah Kelahiran Bung Hatta	Revitalisasi Kawasan dan Rumah Kelahiran Bung Hatta	paket	0	-	0	-	BudPar
				1	03	22	23	Revitalisasi Bangunan Pusaka	Revitalisasi Bangunan Pusaka	paket	1	-	1		BudPar



				1	03	22	24	Revitalisasi Jenjang se Bukittinggi (Jenjang Dalam Kota)	Revitalisasi Jenjang se Bukittinggi (Jenjang Dalam Kota)	paket	0	-	0	-	BudPar
				1	03	22	25	Revitalisasi Jam Gadang	Revitalisasi Jam Gadang	paket	0	-	0	-	BudPar
				1	03	22	26	Insentif Bangunan Pusaka Kota Bukittinggi	Insentif Bangunan Pusaka Kota Bukittinggi	paket	1	-	1		BudPar
				1	03	22	27	Pembangunan Gedung Hijau Percontohan	Pembangunan Gedung Hijau Percontohan	paket	0	-	0	-	KLH
				1	03	22	28	Revitalisasi Bangunan dan Kawasan Pasar Atas	Revitalisasi Bangunan dan Kawasan Pasar Atas	unit	0	-	0	-	DPP Rp. 138.440.625.000,-
				1	03	22	29	Revitalisasi Bangunan dan Kawasan Pasar Bawah	Revitalisasi Bangunan dan Kawasan Pasar Bawah	unit	0	-	0	-	DPP Rp. 79.593.750.000,-
				1	03	22	30	Revitalisasi Bangunan dan Kawasan Pasar aua Tajungkang	Revitalisasi Bangunan dan Kawasan Pasar aua Tajungkang	unit	0	-	0	-	DPP Rp. 88.715.000.000,-
				2	03	22	31	Rehabilitasi Eks. Bioskop Gloria untuk Parkir kend. Roda 2 (Lantai 2)	Sarana Parkir yang dibangun	paket		800.000.000			
		Jumlah gedung yang layak fungsi		1	03	23		Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	% Gedung negara dan swasta yang laik fungsi		30	400.000.000	3002%	425.000.000	



				1	03	26	06	Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Jumlah Kegiatan Operasionalisasi terlaksana	TABG/S LF	30	250.000.000	30	275.000.000	
				1	03	26	07	Penyusunan Ranperda	Jumlah RanPerda tersusun	ranperda	2	150.000.000	1 Ranperda	150.000.000	
								- Penyusunan RanPerda Cagar Budaya Kota Bukittinggi	ranperda		1	-			*
								- Penyusunan RanPerda Non Bangunan Kota Bukittinggi	ranperda		1	150.000.000			
		5. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air minum permukiman perkotaan	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	1	03	20		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman			1.250.000.000		25.338.750.000	
			persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai						persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai						
				1	03	20	01	Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Terlaksanannya Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum			1.000.000.000		16.500.000.000	APBD (target RPJM)
								- Pemasangan Pipa PDAM Jl. Mutiara 1 s/d							ATTS



									Mutiara V							
								-	Pemasangan Pipa Air Minum RW 1 s/d RW 4	m	1600		400.000.000			Kubu Tanjung
									<u>Reses DPRD</u>	paket	1					
								-	pengadaan jaringan pipa air kompleks mutiara indah							
				1	03	20	02	Pemeliharaan Sarana Air Minum	Terlaksanannya Pemeliharaan Sarana Air Minum	Pkt	1		-		1.100.000.000	DAK/PDA M
				1	03	20	03	Pembangunan Sarana Sanitasi	Terlaksanannya Pembangunan Sarana Sanitasi	Pkt	1		-		5.500.000.000	DAK
				1	03	20	04	Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Terlaksanannya Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Pkt	1		-		1.100.000.000	DAK
				1	03	20	05	Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi	Pkt	1		250.000.000		275.000.000	
								RPIJM - 1								
				1	03	20	06	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Air Limbah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Air Limbah	Dok.	1		75.000.000		-	* dibahas kembali
				1	03	20	08	Penyusunan Perda Pengelolaan Drainase	Penyusunan Perda Pengelolaan Drainase	Dok.	1		50.000.000		-	* dibahas kembali



				1	03	20	09	Sosialisasi peraturan dan perundangan tentang pengolahan drainase	Sosialisasi peraturan dan perundangan tentang pengolahan drainase	Keg.	0	-	1	50.000.000	* dibahas kembali
				1	03	20	11	Pembangunan Sistem Informasi Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terintegrasi	Pembangunan Sistem Informasi Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terintegrasi	SIM	1	75.000.000	-	-	* dibahas kembali
				1	03	20	13	Fisik Pengolahan Air Limbah	Fisik Pengolahan Air Limbah	keg.	1	200.000.000	-	-	* dibahas kembali
				1	03	20	17	Pembangunan Tangki Septik Komunal (Sanimas Reguler)	terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Komunal (Sanimas Reguler)	paket	1	315.000.000	-	-	* dibahas kembali
				1	03	20	22	Pemipaan (SR) Masyarakat	Pemipaan (SR) Masyarakat	SR	400	100.000.000	400	105.000.000	* dibahas kembali
				1	03	20	23	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	paket	1	225.000.000	1	236.250.000	* dibahas kembali
				1	03	20	24	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	paket	1	225.000.000	1	236.250.000	* dibahas kembali
				1	03	20	25	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	paket	1	225.000.000	1	236.250.000	* dibahas kembali



									Apit)						
				1	03	20	28	Optimalisasi SPAM Kawasan Ngarai Sianok	Optimalisasi SPAM Kawasan Ngarai Sianok	paket	1	-	-	-	Kepastian Lokasi
				1	03	20	29	Pembangunan/Peningkatan SPAM Regional	Pembangunan/Peningkatan SPAM Regional	paket	1	200.000.000	-	-	* dibahas kembali
		6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pengelolaan Ruang Publik dan Terbuka Hijau	Jumlah penyediaan RTH dan Non RTH	1	03	21		Program Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang terbuka Hijau/ Non Hijau	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau/ non hijau			2.000.000.000		2.200.000.000	
				1	03	21	05	Pembangunan/Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksanannya Pembangunan/Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	paket		2.000.000.000	1	2.200.000.000	
								-	Kawasan TMP	paket	1	1.000.000.000			
								-	Kawasan Simp. Surau Gadang	paket	1	1.000.000.000			
								RPIJM							
				1	03	21	06	Pembangunan RTH di Sepanjang Jalan By. Pass Kawasan	Terlaksananya Pembangunan RTH di Sepanjang	paket	0	-	-	-	DKP



								Pasar Aur Kuning	Jalan By. Pass Kawasan Pasar Aur Kuning						
				1	03	21	07	Pembangunan RTH di Bawah Fly Over	Terlaksannya Pembangunan RTH di Bawah Fly Over	paket	0	-	-	-	DKP
				1	03	21	10	Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	Terlaksannya Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata	paket	0	-	0	-	Budpar
				1	03	21	13	Penataan Kota Pusaka	Terlaksannya Penataan Kota Pusaka	paket	1	-	1		Budpar
				1	03	21	14	Pelebaran/ Pembangunan Pedestrian	Panjang Pendetriaan yang dibangun	paket	1	-	1		Benteng Pasar Atas 3/ Dlm proses Identifikasi
	2. Menyelenggarakan keterpaduan /sinergi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum guna menggerakkan sektor-sektor unggulan (pariwisata, pendidikan,	1. Meningkatkan ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi serta keterpaduan pelaku usaha konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	1	03	23		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pelaku usaha jasa konstuksi yang dibina			400.000.000		440.000.000	
				1	03	23	03	Pendamping Kegiatan P2KP	Pendamping Kegiatan P2KP di tahun 2016	Keg.	1	100.000.000	1	110.000.000	



	kesehatan, perdagangan dan jasa)			1	03	23	05	Pendamping kegiatan BSPS	Pendamping kegiatan BSPS yang dilaksanakan	Keg.	1	100.000.000	1	110.000.000	
				1	03	23	06	Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Keg.	1	200.000.000	1	220.000.000	
		2. Tersedianya dokumen perencanaan, infrastruktur yang berkualitas berbasis data dan informasi yang akurat dan inovatif	Dokumen perencanaan infrastruktur (non DED) yang disusun/diupdate.	1	03	26		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	%		400.000.000	20%	660.000.000	
				1	03	26	01	Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Tersedianya dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	paket	125	100.000.000	125	110.000.000	
				1	03	26	05	Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Terlaksananya Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	dokumen	4	100.000.000	4	110.000.000	
				1	03	26	08	Penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur kelurahan	Dokumen perencanaan infrastruktur kelurahan yang disusun	Kelurahan	3	200.000.000	6	440.000.000	*



3.	Meningkatkan ketersediaan informasi rencana tata ruang	1.	Tersedianya dokumen dan regulasi penataan ruang daerah	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	1	05	15		Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah			1.460.000.000		2.770.000.000	
					1	05	15	01	Pembuatan Keterangan Rencana Kota	terlaksananya Pembuatan Keterangan Rencana Kota	PKRK	350	60.000.000	350	65.000.000	
					1	05	15	02	Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	sertifikat	60	120.000.000	80	140.000.000	
					1	05	15	04	Pendampingan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	terlaksananya Pendampingan Penyusunan Perda RDTR	perda	1	250.000.000	1	200.000.000	
					1	05	15	05	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana	1 paket	1	-	1	330.000.000	*
					1	05	15	08	Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang	peta	1	30.000.000	1	35.000.000	
					1	05	15	09	Pendataan Bangunan	Terlaksananya Penataan Bangunan	dokumen	1	350.000.000	1	380.000.000	
					1	05	15	11	Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	keg.	1	250.000.000	1	200.000.000	



				1	05	15	12	Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan	keg.	1	-	1	110.000.000	
				1	05	15	13	Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah	Terlaksanannya Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah	keg.	1	100.000.000	1	110.000.000	
				1	05	15	10	RTBL Kawasan Strategis	Jumlah dokumen RTBL Kawasan Strategis yang tersusun	Kawasan	1	300.000.000	-	-	
								- Penyusunan RTBL Kawasan Simpang Aur Kuning dan sekitarnya	dokumen	1	300.000.000	-	-	-	
								- Penyusunan RTBL Kawasan Koridor Jl. Soekarno Hatta	dokumen	1			1	300.000.000	
								- Penyusunan RTBL Kawasan Koridor Kereta Api (jl. Havid Jalil Sd Sukarno Hatta)	dokumen	1			1	300.000.000	
								- Penyusunan RTBL Kawasan Koridor By Pass	dokumen	1			1	300.000.000	



								-	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kaw. Panorama Baru	dokumen	1		1	300.000.000	
				1	05	15			Penataan dan Revitalisasi Kawasan dan Bangunan Eks. Penjara	Jumlah kawasan yang dilakukan Penataan dan Revitalisasi	Kawasan	1	-	-	-
		2. Meningkatkan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	1	05	17			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				352.000.000	294.700.000	
				1	05	17	01		Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan yang dilaksanakan	tahun	1	1	200.000.000	130.000.000
				1	05	17	02		Audit Pemanfaatan Ruang	Dokumen Audit Pemanfaatan Ruang yang tersusun	keg.	1	1	77.000.000	84.700.000
				1	05	17	03		Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas lereng/ tebing	Jumlah billboard yang dibuat	paket	1	1	75.000.000	80.000.000



3.	MISI 3 : Meningkatkan kualitas permukiman dan prasarana lingkungan yang layak											2.200.000.000		17.530.000.000	
	1. Mengurangi proporsi permukiman kumuh di perkotaan	1. Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	1	04	17		Program Pengembangan Perumahan				-		15.000.000.000	
				1	04	17	01	Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Bukit Apit	Jumlah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang dibangun	unit	1	-	1	15.000.000.000	dari Total Rp. 25.000.000.000,-
				1	04	17	02	Pembangunan Rumah Susun Khusus Kawasan TNI	Rumah Susun Khusus Kawasan TNI yang dibangun	unit	1	-			dari Total Rp. 10.000.000.000,-
				1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	% Jalan dengan riol yang sehat	%		2.200.000.000		2.530.000.000	
				1	04	16	01	Peningkatan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan	Tersedianya Jalan Lingkungan Perumahan	Km		1.000.000.000		1.150.000.000	Dalam Proses Identifikasi
								- Pemasangan Paving Block RW III RT 2 (Gang Mustika) Puhun Pintu Kabun							puhun pintu kabun
								- Jalan menuju ke SDN 13 Bukit Sangkuik RW III RT 02							Bukit Apit Puhun 3



							- Penutupan Riol & Pembuatan Jalan Setapak Belakang SMK PB RW II RT 04						ATTS
							- pembuatan jalan lingkung dari jalan hotel pusako ke makam pasukuan pisang manggis						manggis gantung
							- perbaikan jalan setapak/plat beker jalan setapak SDN manggis	m	1200				manggis gantung
							- peningkatan jalan lingkung rw 2 campago guguk bulek						campago guguk bulek
							- pengecoran jalan lingkung rt2/rw 5 puhun tembok	m	100				puhun tembok
							- peningkatan jalan lingkung depan puskeskel anak air						pulai anak air
							- pembuatan jalan lingkung rw 1/rt 04 campago guguk bulek	m	75				campago guguk bulek
							- pembukaan akses jalan ke SDLB manggis	m	3x65				manggis gantung



								ganting						
								- pengecoran gang rw 01/rt 01 jalan paninjauan						garegeh
								- Jl. Di belakang Gedung Serbaguna Komplek Inkorba	m	4x100				campago guguk bulek
								Reses DPRD						
								- Pengecoran jalan Karan / Parak Tingga	M'	150				Garegeh
								- Pengecoran jalan lingkung RW 01 Guguk Bulek MKS	M'	300				Guguk Bulek MKS
								- Peningkatan jalan lingkung Bukik Cegek	M'	850				Bukit Apit Puhun Guguk Panjang
								- Peningkatan jalan Manunggal Cendana	M'	550				Garegeh
								- Pengecoran jalan lingkung RT 04 RW 02 Campago Ipuah	M'	120				Campago Ipuah
				1	04	16	02	Pembangunan Riol	Terwujudnya pembangunan	Km		700.000.000	805.000.000	Dalam Proses Identifikas



								riol						i
								- Pembuatan Riol Baru dari Toko Irama s/d Parak Kubang I RW VI RT 02 Tarok Dipo	m	200				tarok dipo
								- Pembuatan Riol Baru Gang Kesehatan s/d Gang Nan Tongga RW VRT 01 Tarok Dipo	m	500				tarok dipo
								pembuatan riol jalan rw 1/rt 1 koto selayan	m	250				koto selayan
				1	04	16	03	Rehab/ peningkatan riol	Terwujudnya Perbaikan/ peningkatan riol	Km		500.000.000	575.000.000	Dalam Proses Identifikasi
								- Penutup Riol/Bandar depan SDN 03 Pakan Labuah	M'	40				Pakan Labuah
								- Perbaikan Riol dari Ambun Suri s/d TK Adzkia	M'	250				Tarok Dipo
								Reses DPRD						
								Rehab riol dan cor beton tutup roil dan pasang paving slope	M'	550				Jl. Sijolang dan Jl. Bai'aturrid



									(trotoar)							wan Tarok Dipo
				1	04	16	04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Kecamatan Guguak Panjang	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan Kecamatan Guguak Panjang	kawasa n	2	-	-	-		
				1	04	16	06	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	PPIP	paket	1	-	1			Dana APBN
												55.472.897.885		109.644.153.089		

Bukittinggi, Mei 2016

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

SYAHRIZAL, ST

NIP. 19611212 198602 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional Rencana Strategis (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan rencana tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat gambaran umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Isu-isu strategis, visi, misi, sasaran dan strategi kebijaksanaan pembangunan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 dilakukan melalui pengolahan data dan informasi terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan dengan mensinergikan dengan konsep penataan ruang kota. Disamping itu dilakukan telaahan kondisi infrastruktur daerah yang dilanjutkan dengan proses analisis terhadap variabel potensi kinerja dan faktor-faktor eksternalitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, arahan RPJMD 2016-2021, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat pekerjaan Umum yang terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pertanahan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat ditur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Melalui rangkaian proses kompilasi dan analisis data ini diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap penentuan arah dan kebijakan strategis dan konstruktif untuk pelaksanaan program pemenuhan sarana dan prasarana publik secara simultan selama periode Renstra tahun 2018 – 2021 sehingga menjadi perencanaan yang bersifat implementatif (action plan) dan memiliki hubungan yang sinergis dengan kebijakan program Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menunjang pencapaian Visi Daerah “TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar DalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (lembaran Negara)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor)
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2014, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
- r. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- s. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- u. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
- v. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2012-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 tahun 2011);
- w. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
- x. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- y. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- z. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor:188.45-233-2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- aa. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 180/6/Huk-E/2017 tentang Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Disertai Indikasi Pendanaan Tahun 2016-2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan daerah dibidang ke PU-an yang terdapat pada RPJMD tahun 2018 -2021 terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Pertanahan sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan yang berorientasi pada program dan kegiatan.

Secara khusus Renstra ini mempunyai Tujuan sebagai berikut:

1. Memantapkan keberadaan, posisi serta peranan SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi tahun 2018 - 2021 sebagai salah satu institusi kelembagaan dalam lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi (SKPD) yang mengemban fungsi yang lebih profesional, arif dalam menyikapi perubahan internal maupun eksternal dan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur Kota.
2. Mengendalikan proses pembangunan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun kedepan. Program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ini sebagai bagian dari program pembangunan jangka panjang, sehingga dapat diperhatikan keterkaitan antar ruang, waktu dan anggaran.
3. Memberi masukan bagi masyarakat dalam menyusun daftar usulan pembangunan melalui mekanisme perencanaan daerah secara berjenjang.
4. Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis
5. Sebagai pedoman untuk meningkatkan Kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;
6. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah tentang upaya-upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan serta upaya penataan ruang kota selama kurun waktu lima tahun kedepan.
7. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam mengalokasikan anggaran pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyampaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 mulai dari pengolahan data/ informasi, analisis dan perumusan dalam bentuk dokumen mengacu kepada Lampiran 4 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyajian Rencana Strategis (Renstra) dimaksud , disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 2.5. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.
- 3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi dan KLHS
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 2.6. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi
- 2.8. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum penetapan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam mendukung kebijakan pimpinan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yaitu fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan Teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

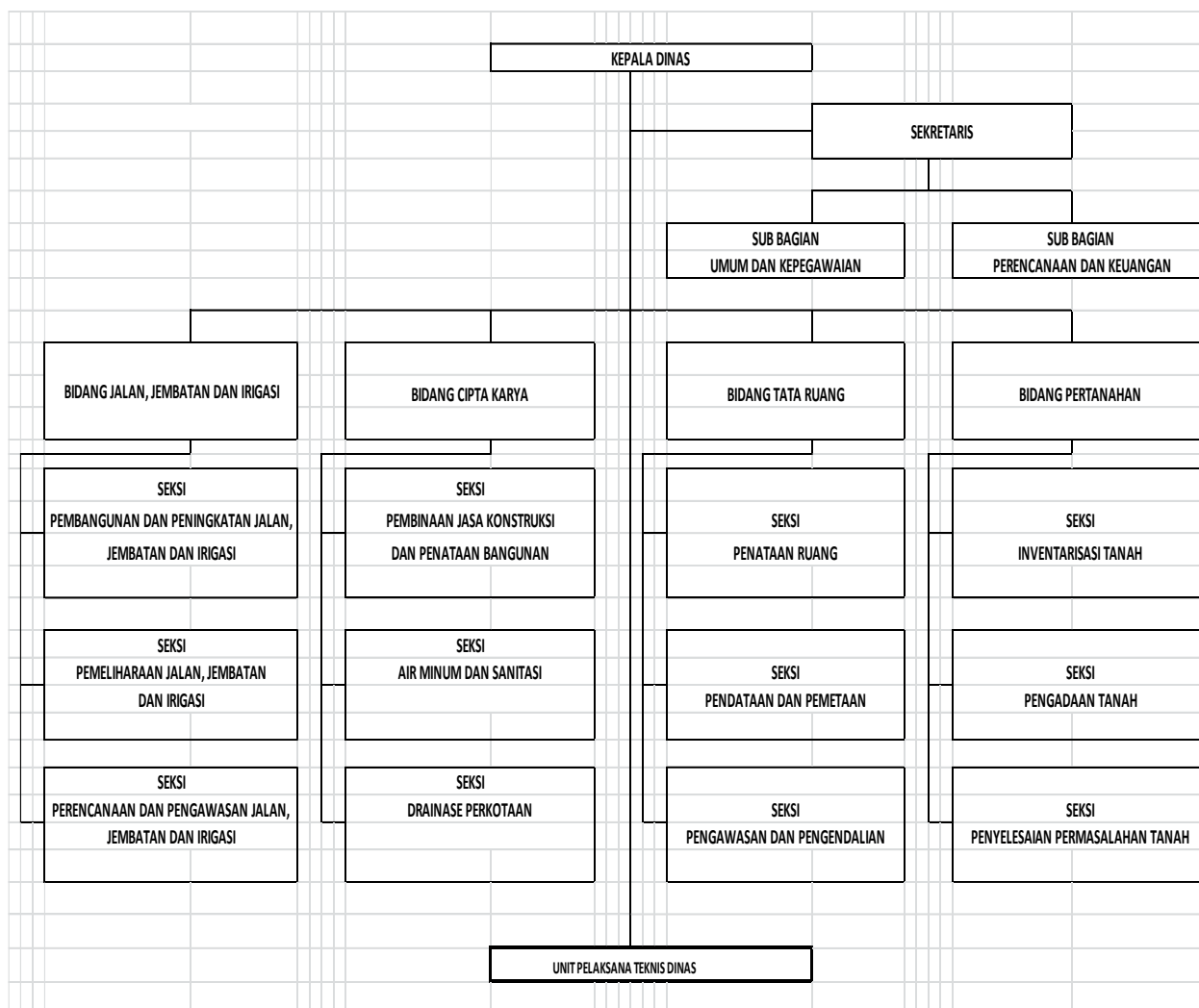
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktural tersebut mengacu kepada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan rencana strategis (Renstra) , rencana kerja (Renja) dan penetapan kinerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan ;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang

- dan pertanahan;
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
 - f. Pengkoordinasian kebijakan dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset
 - b. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan dinas;
 - c. Perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra dinas;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas;
 - e. Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
 - f. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup dinas; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1 Rincian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas, perencanaan dan evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan umum, kepegawaian dan perencanaan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. Penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai;
 - e. Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, pemberian informasi dan komunikasi, pengetikan/ penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokol;
 - f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/ prasarana, keamanan serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. Pengelolaan aset di lingkungan dinas;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/ sarana kerja; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas- tugas urusan perencanaan dan keuangan;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - f. Penyiapan berkas- berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - g. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Jalan ,Jembatan dan Irigasi

- (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang prasarana jalan, jembatan, dan irigasi dengan optimal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jalan, Jembatan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan bidang jalan, jembatan dan irigasi sesuai renstra dan renja agar kegiatan relevan dengan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Pembagian tugas kepada masing-masing kepala seksi di bidang agr pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - e. Pembuatan laporan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban dan penilaian atasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1 Tugas Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Jembatan dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Rician Tugas Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi

- (1) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan jalan, jembatan

- dan irigasi;
- c. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh lampu penerangan pada jalan dan jembatan;
- d. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- f. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
- g. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemeliharaan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3 Rincian Tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi

- (1) Seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - b. Penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi;
 - c. Pembagian tugas kepada staf di seksi agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan kepada staf agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Penyusunan konsep rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan irigasi agar tidak terjadi penyimpangan dan mengetahui pemecahan masalah;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG CIPTA KARYA

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang keciptakaryaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan teknis dan program penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan sanitasi dan drainase perkotaan;
 - c. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah negara, prasarana dan sarana air minum dan sanitasi perkotaan dan drainase perkotaan;
 - d. Pemberian pembagian tugas, memimpin, memberi petunjuk dan pendayagunaan dalam pelaksanaan tugas seksi penataan bangunan, seksi air minum dan sanitasi

- dan seksi drainase perkotaan;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah- langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1 Rincian Tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan

- (1) Seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pembinaan jasa konstruksi dan penataan bangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis penataan bangunan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan teknis pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah daerah;
 - c. Pemberian bantuan teknis pembangunan gedung negara;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - e. Perumusan penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran bangunagedung negara;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan tim ahli bangunan gedung (TABG);
 - h. Pelaksanaan pengelolaan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan;
 - i. Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - j. Penghimpun, pengkajian dan pelaksanaan diseminasi aturan dan kebijakan usaha jasa konstruksi;
 - k. Pengembangan sumberdaya jasa konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan bentuk lainnya;
 - l. Penertiban dan pemberian rekomendasi terhadap penerbitan izin usaha jasa konstruksi;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Rincian Tugas Seksi Air Minum dan Sanitasi

- (1) Seksi air minum dan sanitasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring evaluasi di bidang air minum dan sanitasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi air minum dan sanitasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penyediaan prasarana sarana air minum dan air limbah/ sanitasi tingkat perkotaan;

- d. Pelaksanaan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum termasuk kepada badan usaha milik daerah (operator); dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3 Rincian Tugas Seksi Drainase Perkotaan

- (1) Seksi drainase perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi serta pelaksanaan kegiatan di bidang drainase perkotaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi drainase perkotaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan program dan perencanaan teknis prasarana drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan drainase tingkat perkotaan diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ);
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir diluar drainase yang berada pada ruang milik jalan (RMJ); dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG TATA RUANG

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pendataan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasi kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai bidang tata ruang urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan sesuai urusan/ kewenangan Pemerintah Daerah bidang tata ruang kota;
 - c. Perumusan, pelaksanaan serta pengkoordinasian kebijakan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi penyelenggaraan operasi lapangan bidang teknis tata ruang kota;
 - d. Pengumpulan data, sebagai bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama bidang tata ruang kota sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. Perumusan, penganalisaan, evaluasi dan pelaporan program tata ruang;
 - f. Pelaksanaan, pengkoordinasian perencanaan pembangunan bidang tata ruang;
 - g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan serta pencapaian target program dan atau kegiatan/ tugas bidang tata ruang;
 - h. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugas dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Rincian Tugas Seksi Penataan Ruang

- (1) Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan,

perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi penataan ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
 - b. Penyusunan bahan peraturan zonasi (zoning map dan zoning teks) sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang (RDTR)
 - c. Penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/ kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dibidang penataan ruang;
 - g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
 - h. Penyiapan bahan penerbitan keterangan atau rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan tata ruang kota;
 - i. Penyiapan surat keterangan rencana kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang dan ketentuan lainnya;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
 - k. Melaksanakan monitoring dan pengendalian bangunan sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK), rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
 - l. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
 - m. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kesadaran, tanggungjawab, dan peran serta masyarakat dalam perencanaan penataan ruang;
 - n. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang; dan
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Rincian Tugas Seksi Pendataan dan Pemetaan

- (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendatan dibidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendataan dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pemetaan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporanlingkup pendataan dan pengukuran;
 - d. Pelaksanaan pembinaan lingkup pelaksanaan orientasi lapangan, pengukuran dan pemetaan, serta pengelolaan peta dasar;
 - e. Pelaksanaan pembuatan usulan teknis perencanaan peletakan bangunan untuk keterangan rencana kota (KRK);
 - f. Pelaksanaan pendataan bangunan dan pemanfaatan ruang;
 - g. Pengelolaan data, dokumentasi dan peta tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pendataan bangunan dan

- pemanfaatan ruang kota; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3 Rincian Tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendataan terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan, serta penanganan, penertiban, penyegehan, pembongkaran terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengecekan kesesuaian tata ruang dan kesesuaian persyaratan teknis bangunan;
 - b. Pendataan penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pengawasan sebagai tindak lanjut atas terdapatnya indikasi pelanggaran peraturan daerah dan / atau peraturan walikota;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan pelaporan pengawasan tata ruang dan bangunan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penyegehan bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai dengan dokumen rencana tata ruang;
 - h. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota terutama kawasan lindung, agro wisata, jalur hijau, sungai dan perbukitan yang memiliki kemiringan tidak layak bangun;
 - i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas kota;
 - j. Pelaksanaan pengawasan terhadap kawasan/ lahan yang belum dimanfaatkan yang mengakibatkan terganggunya kebersihan dan keindahan kota dan/ atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - k. Pelaksanaan evaluasi terhadap pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan pertimbangan untuk melakukan revisi rencana tata ruang;
 - l. Penyelenggaraan penertiban terhadap kegiatan membangun bangunan gedung maupun bangunan bukan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sesuai dengan hirarki pelaksanaan penertiban berdasarkan peraturan bangunan dan petunjuk pelaksanaannya;
 - m. Pengumpulan bahan untuk dilakukan koordinasi penertiban bangunan dengan instansi terkait; dan
 - n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PERTANAHAN

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pelayanan dan penyelenggaraan di bidang

pertanahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data base di bidang pertanahan;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi tanah;
 - c. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
 - d. Pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah aset pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - f. Pelaksanaan tukar menukar tanah aset pemerintah daerah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.1 Rincian Tugas Seksi Inventarisasi Tanah

- (1) Seksi Inventarisasi Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang inventarisasi tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi inventarisasi tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi aset tanah Pemerintah Daerah;
 - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan tanah dari satuan kerja untuk kepentingan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi tanah kosong dan tanah ulayat;
 - e. Pelaksanaan kompilasi data dan informasi peta pola penggunaan tanah, peta wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;
 - g. Pelaksanaan koordinasi terhadap draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;
 - h. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Rincian Tugas Seksi Pengadaan Tanah

- (1) Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang pengadaan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis inventarisasi tanah;
 - b. Pelaksanaan proses kegiatan pengadaan/ pembebasan tanah dan proses sertifikasi untuk aset daerah;
 - c. Pelaksanaan proses pengadaan tanah dan proses sertifikasi untuk kepentingan/ fasilitas umum;
 - d. Pelaksanaan proses administrasi serah terima pengadaan tanah;
 - e. Pelaksanaan proses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah

- serta ganti rugi;
- f. Pelaksanaan proses tukar menukar aset pemerintah daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.3 Rincian Tugas Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah

- (1) Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah mempunyai tugas menyusun program, melaksanakan kebijakan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi, inventarisasi, pemberian sosialisasi di bidang penyelesaian permasalahan tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan perencanaan teknis penyelesaian permasalahan tanah;
 - b. Penerima, peneliti, dan pengkaji laporan pengaduan konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - c. Pencegahan meluasnya dampak konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penetapan langkah-langkah penanganan penyelesaian konflik/ sengketa tanah dan permasalahan tanah;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan perundangan pertanahan;
 - g. Pelaksanaan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian pertanahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum keadaan per 30 April 2017 adalah sebanyak 112 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 25 orang dan 61 orang staf serta didukung oleh 41 orang tenaga honorer.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 31 Des 2015 (orang)	Porsentase (%)
IV	3	2,68
III	37	33,03
II	27	24,11
I	4	3,57
Honor	41	36,61
Jumlah	112	100%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, April 2017

Komposisi Pegawai pada Dinas PUPR per April Tahun 2017 didominasi oleh tenaga PNS dari golongan I, II, III dan IV yaitu sebanyak 63,39 % dengan komposisi paling besar diisi oleh

golongan III, sedangkan paling sedikit diisi oleh PNS golongan IV. Dari 71 personil PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan diisi oleh PNS berpendidikan S1 yaitu sebanyak 39,44% dan berpendidikan SLTA sebanyak 38,03% sedangkan paling sedikit berpendidikan SLTP dengan persentase 2,82% dan SD dengan persentase yang sama sebesar 2,82%. Untuk peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjejaran pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur padamasyarakat.

Tabel 2.1
Komposisi PNS DPUPR berdasarkan latar belakang pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Porsentase (%)
S3	0	0,0%
S2	5	7,04%
S1	28	39,44%
D III	7	9,86%
D II	0	0,0%
D I	0	0,0%
SLTA	27	38,03%
SLTP	2	2,82%
SD	2	2,82%
JUMLAH	71	100,0%

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, April 2017

2.2.2 Sarana Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Disamping sumber daya manusia (man) yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana (machine) merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dan menyelenggarakan urusan wajib pekerjaan umum, urusan penataan ruang, pertanahan dan urusan-urusan lainnya

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengelola aset yang cukup banyak, begitu juga dengan aset yang termasuk sarana dan prasarana pendukung dalam peningkatan kinerja organisasi peralatan dan mesin serta gedung yang digunakan sebagai peralatan pendukung urusan pekerjaan umum dalam rangka membangun fasilitas dan dalam upaya memberikan pelayanan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukittinggi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mempedomani Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2010 direvisi dengan Peraturan Menteri No.01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa fokus layanan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya Pelayanan Sumber Daya Air ; Pelayanan Jalan; Pelayanan Air Minum; Pelayanan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan); Penataan Bangunan dan Lingkungan; Jasa Konstruksi; Penataan Ruang; Rumah Layak Huni dan Terjangkau; Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Tahun 2015 yang dikompilasikan dengan Laporan SPM Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pelayanan Sumber Daya Air;.

▪ Air Minum

Kapasitas sumber daya air yang dimiliki PDAM Kota Bukittinggi Tahun 2012 untuk melayani 80% jumlah penduduk administratif sebagaimana target MDGs yaitu 90.855 jiwa, adalah sebesar 199 lt/detik. Sedangkan kapasitas sumber daya air yang seharusnya dimiliki untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduk adalah 274 lt/detik

▪ Irigasi

Untuk ketersediaan air irigasi sampai tahun 2014 sebesar 458 lt/dtk atau 99,56% dengan target 100%, dimana kondisi saat ini panjang irigasi 775,75 M' dengan kondisi baik 90% dengan Panjang saluran irigasi ½ teknis pada tahun 2016 sepanjang 36473 M'

2. Kinerja Pelayanan Jalan;

▪ Jalan;

Sampai dengan tahun 2016, tidak ada penambahan ruas jalan baru. Panjang jalan eksisting yang ada hingga tahun 2016 ini sepanjang 160,71 kilometer yang terdiri dari 375 ruas dengan 9,86 Km Jalan Nasional, 5,145 Km Jalan Provinsi dan 145,71 Km Jalan Kota.

Tabel 2.3
Data Jalan Kota Bukittinggi

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
1	Jln. Sudirman	1,772	P	ABTB	12,00	Aspal	B
2	Jln. Birugo Puhun	0,461	K	ABTB	4,00	Aspal	B
3	Jln. Birugo Puhun I	0,422	K	ABTB	4,00	Aspal	B
4	Jln. H.Burhan	0,365	K	ABTB	4,00	Aspal	S
5	Jln. H.Burhan I	0,098	K	ABTB	4,00	Aspal	S
6	Jln. H.Burhan II	0,177	K	ABTB	4,00	Aspal	S
7	Jln. Adinegoro	0,389	K	ABTB	5,50	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
8	Jln. Adinegoro - M. Yamin	0,618	K	ABTB	5,50	Aspal	S
9	Jln. Adinegoro dari M. Yamin ke By Pass	0,198	K	ABTB	5,50	Aspal	S
10	Jln. Adinegoro I	0,325	K	ABTB	3,00	Aspal	S
11	Jln. Adinegoro II	0,379	K	ABTB	3,00	Aspal	S
12	Jln. Samping Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,124	K	ABTB	3,00	Aspal	S
13	Jln. Belakang Mesjid Jamiak Aur Kuning	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
14	Jln. Birugo Bungo	0,404	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
15	Jln. Komplek Sungai Puar	0,149	K	ABTB	3,00	Aspal	B
16	Jln. Abd. Hafid Jalil	1,274	K	ABTB	6,00	Aspal	S
17	Jln. Samping SD Masyitah	0,131	K	ABTB	3,00	Aspal	S
18	Jln. Hakam Kari Sulaiman	0,386	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
19	Jln. Hakam Kari Sulaiman I	0,097	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
20	Jln. Hakam Kari Sulaiman II	0,052	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
21	Jln. Banda Kubu	0,153	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
22	Jln. Lubuk Gadang	0,104	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
23	Jln. Lubuk Tengah	0,091	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
24	Jln. Surau Ketek Kuning	0,093	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
25	Jln. Kesemek	0,101	K	ABTB	3,00	Aspal	S
26	Jln. Tangah Jua	0,517	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
27	Jln. Tangah Jua I	0,388	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
28	Jln. Tangah Jua II	0,353	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
29	Jln. Alpukat	0,131	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
30	Jln. Birugo Indah	0,338	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
31	Jln. Birugo Indah I	0,162	K	ABTB	4,00	Aspal	RR
32	Jln. Birugo Indah II	0,095	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
33	Jln. Komplek PU	0,156	K	ABTB	4,00	Aspal	S
34	Jln. Jambu Mente	0,219	K	ABTB	3,00	Aspal	S
35	Jln. Rambutan	0,172	K	ABTB	3,00	Aspal	S
36	Jln. Apel	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	S
37	Jln. Belakang RRI	0,138	K	ABTB	3,00	Aspal	S
38	Jln. Durian	0,598	K	ABTB	3,00	Aspal	S
39	Jln. Jeruk	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	S
40	Jln. Salak	0,152	K	ABTB	4,00	Aspal	S
41	Jln. Anggur	0,077	K	ABTB	3,00	Aspal	S
42	Jln. Duku	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
43	Jln. Mangga	0,146	K	ABTB	3,00	Aspal	S
44	Jln. Manggis	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
45	Jln. Markisa	0,092	K	ABTB	3,00	Aspal	S
46	Jln. Pepaya	0,228	K	ABTB	3,00	Aspal	S
47	Jln. Saos	0,104	K	ABTB	3,00	Aspal	S
48	Jln. Nangka	0,193	K	ABTB	3,00	Aspal	S
49	Jln. Sawo	0,084	K	ABTB	3,00	Aspal	S
50	Jln. Kelapa	0,080	K	ABTB	3,00	Aspal	S
51	Jln. Tomat	0,424	K	ABTB	3,00	Aspal	S
52	Jln. Sukun	0,259	K	ABTB	3,00	Aspal	S
53	Jln. Belimbing	0,260	K	ABTB	3,00	Aspal	S
54	Jln. Cermai	0,139	K	ABTB	3,00	Aspal	S
55	Jln. Pendidikan	0,545	K	ABTB	4,00	Aspal	B
56	Jln. Panca Budi	0,328	K	ABTB	3,00	Aspal	S
57	Jln. Komplek KOREM	1,951	K	ABTB	4,00	Aspal	B
58	Jln. Sertu Komarudin	0,318	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
59	Jln. Tabek Gadang	0,890	K	ABTB	4,00	Aspal	B
60	Jln. Taruko Tabek Gadang	0,186	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
61	Jln. Bukittinggi-By Pass	6,800	N	ABTB	12,00	Aspal	S
62	Jln. Prof. M. Yamin SH	1,254	K	ABTB	7,00	Aspal	S
63	Jln. Samping Bengkel IDI Daya Motor	0,181	K	ABTB	2,50	Aspal	RB
64	Jln. B. St. Rajo Ameh	0,944	K	ABTB	4,00	Aspal	S
65	Jln. Batu Turak	0,440	K	ABTB	3,00	Aspal	S
66	Jln. DKK Aur Kuning	0,163	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
67	Jln. Belakang DKK	0,387	K	ABTB	3,50	Aspal	RR
68	Jln. Komplek Shahiral Ilmi	0,174	K	ABTB	3,00	Aspal	S
69	Jln. Komplek Bukittinggi Indah	0,732	K	ABTB	3,00	Aspal	S
70	Jln. Diponegoro	0,681	K	ABTB	6,00	Aspal	B
71	Jln. Tigo Baleh	1,390	K	ABTB	6,00	Aspal	S
72	Jln. Puskesmas 13	0,121	K	ABTB	4,00	Aspal	B
73	Jln. Koto Katiak	0,559	K	ABTB	4,000	Aspal	B
74	Jln. Parit Antang	0,289	K	ABTB	4,00	Aspal	B
75	Jln. Ladang Cakiah	0,630	K	ABTB	3,00	Aspal	S
76	Jln. Kubu Tanjung	1,012	K	ABTB	6,00	Aspal	B
77	Jln. Sumur	1,300	K	ABTB	3,50	Aspal	B
78	Jln. Daujung (PDRI)	1,216	K	ABTB	3,00	Aspal	B
79	Jln. Pabeloan	0,480	K	ABTB	3,50	Aspal	B
80	Jln. Kurai	1,106	K	ABTB	4,00	Aspal	B
81	Jln. Lingkung By Pass Aur Kuning	2,106	K	ABTB	3,00	Aspal	RB

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
82	Jln. Batang Masang	0,435	K	ABTB	5,00	Aspal	S
83	Jln. Komplek UNP	0,075	K	ABTB	4,00	Aspal	S
84	Jln. Bayangkara I	0,320	K	ABTB	3,00	Aspal	S
85	Jln. Bayangkara II	0,242	K	ABTB	3,00	Aspal	S
86	Jln. Bayangkara III	0,159	K	ABTB	4,00	Aspal	S
87	Jln. Komplek RSUP	0,280	K	ABTB	3,00	Aspal	RB
88	Jln. Manunggal Belakang Balok	0,121	K	ABTB	3,00	Aspal	S
89	Jln. Kehakiman	0,714	K	ABTB	3,00	Aspal	B
90	Jln. Kehakiman I	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
91	Jln. Kehakiman II	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
92	Jln. Perwira	0,546	K	ABTB	12,00	Aspal	B
93	Jln. Perwira I	0,202	K	ABTB	3,00	Aspal	B
94	Jln. Perwira II	0,197	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
95	Jln. Perwira III	0,152	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
96	Jln. Perwira I Dalam	0,056	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
97	Jln. Perwira Ujung	0,097	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
98	Jln. Perwira Ujung I	0,050	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
99	Jln. Perwira Ujung II	0,129	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
100	Jln. Perwira Ujung III	0,115	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
101	Jln. Perawat	0,299	K	ABTB	3,00	Aspal	S
102	Jln. Perawat I	0,132	K	ABTB	3,00	Aspal	S
103	Jln. Perawat II	0,159	K	ABTB	3,00	Aspal	S
104	Jln. Perawat III	0,054	K	ABTB	3,00	Aspal	S
105	Jln. Perawat IV	0,088	K	ABTB	3,00	Aspal	S
106	Jln. Perawat V	0,094	K	ABTB	3,00	Aspal	S
107	Jln. Perawat VI	0,128	K	ABTB	3,00	Aspal	S
108	Jln. Perawat VII	0,044	K	ABTB	3,00	Aspal	S
109	Jln. Prof. Hazairin	0,309	K	ABTB	4,00	Aspal	S
110	Jln. Komplek PLN Belakang Balok	0,341	K	ABTB	6,00	Aspal	S
111	Jln. Kejaksaan Belakang Balok	0,217	K	ABTB	4,00	Aspal	S
112	Jln. Kejaksaan Dalam I Belakang Balok	0,086	K	ABTB	4,00	Aspal	S
113	Jln. Kejaksaan Dalam II Belakang Balok	0,082	K	ABTB	4,00	Aspal	S
114	Jln. Kejaksaan Dalam III Belakang Balok	0,166	K	ABTB	4,00	Aspal	S
115	Jln. Guguk Panjang	0,081	K	ABTB	2,00	Aspal	RR
116	Jln. Batang Ombilin	0,306	K	ABTB	6,00	Aspal	B
117	Jln. Batang Ombilin I	0,099	K	ABTB	3,00	Aspal	B
118	Jln. Batang Ombilin II	0,143	K	ABTB	3,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
119	Jln. Batang Ombilin III	0,076	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
120	Jln. Batang Ombilin IV	0,109	K	ABTB	3,00	Aspal	RR
121	Jln. Batang Agam	0,378	K	ABTB	6,00	Aspal	B
122	Jln. Batang Agam I	0,077	K	ABTB	4,00	Aspal	B
123	Jln. Batang Antokan	0,350	K	GP	3,00	Aspal	B
124	Jln. Bagindo Aziz Chan	0,090	K	GP	3,00	Aspal	B
125	Jln. Tan Malaka	0,264	K	GP	4,00	Aspal	S
126	Jln. Jend. Urip Sumohardjo	0,462	K	GP	9,00	Aspal	B
127	Jln. Nawawi	0,228	K	GP	6,00	Aspal	B
128	Jln. Guru Hamzah	0,158	K	GP	4,00	Aspal	B
129	Jln. Sutan Syahril	1,508	K	GP	8,00	Aspal	B
130	Jln. M. Syafei	0,634	K	GP	8,00	Aspal	B
131	Jln. Melati	0,419	K	GP	3,00	Aspal	RR
132	Jln. Pusri	0,072	K	GP	4,00	Aspal	RR
133	Jln. Imam Bonjol	0,311	K	GP	12,00	Aspal	S
134	Jln. Depan DPRD	0,111	K	GP	7,00	Aspal	S
135	Jln. Panorama	0,910	P	GP	8,00	Aspal	B
136	Jln. H. Agus Salim	0,401	K	GP	6,00	Aspal	B
137	Jln. Setia Budi	0,227	K	GP	4,00	Aspal	B
138	Jln. Tk. Rao	0,184	K	GP	4,00	Aspal	S
139	Jln. Parak Kopi	0,077	K	GP	4,00	Aspal	RR
140	Jln. Tuanku Kurai	0,134	K	GP	4,00	Aspal	S
141	Jln. Binuang	1,087	K	GP	4,00	Aspal	B
142	Jln. Banto Laweh	0,496	K	GP	4,00	Aspal	S
143	Jln. Rabain	0,373	K	GP	4,00	Aspal	RB
144	Jln. Istana	0,274	K	GP	9,00	Aspal	B
145	Jln. Lenggogeni	0,223	K	GP	5,00	Aspal	RR
146	Jln. Yos Sudarso	0,228	K	GP	7,00	Aspal	S
147	Jln. Tengku Nan Renceh	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
148	Jln. Ahmad Karim	0,289	K	GP	6,00	Aspal	B
149	Jln. Teuku Umar	0,217	K	GP	6,00	Aspal	B
150	Jln. Angkatan 45	0,708	K	GP	5,00	Aspal	S
151	Jln. Tarok Tarandam	0,145	K	GP	3,50	Aspal	RR
152	Jln. Pincuran Gaung	0,526	K	GP	3,00	Aspal	RR
153	Jln. Hamka	1,587	K	GP	8,00	Aspal	B
154	Jln. Konsolidasi Batu Hampa	1,146	K	GP	3,00	Aspal	B
155	Jln. I. Teja Sukmana	0,361	K	GP	5,00	Aspal	B
156	Jln. I. Teja Sukmana Menuju SD Depan	0,077	K	GP	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
	SMK 1						
157	Jln. Komplek STM Negeri Bukittinggi	0,348	K	GP	3,00	Aspal	RR
158	Jln. Komplek Insan Kamil	0,177	K	GP	4,00	Aspal	S
159	Jln. Komplek Pemda Belakang SMK 1 Bukittinggi	0,140	K	GP	3,00	Aspal	S
160	Jln. Parak Kubang	0,334	K	GP	4,00	Aspal	S
161	Jln. Parak Kubang I	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
162	Jln. Parak Kubang II	0,484	K	GP	4,00	Aspal	RB
163	Jln. AURI	0,167	K	GP	4,00	Aspal	RB
164	Jln. Pasar Aur	0,298	K	GP	4,00	Aspal	RB
165	Jln. Belakang Pasar Sayur	0,250	K	GP	5,00	Aspal	RR
166	Jln. Sumurapak	0,511	K	GP	5,00	Aspal	S
167	Jln. Sumurapak I	0,239	K	GP	4,00	Aspal	RR
168	Jln. Teja Sukmana I	0,241	K	GP	4,00	Aspal	B
169	Jln. Tanjung I	0,142	K	GP	4,00	Aspal	RB
170	Jln. Tanjung II	0,140	K	GP	4,00	Aspal	RB
171	Jln. Tanjung III	0,138	K	GP	4,00	Aspal	RB
172	Jln. Tanjung IV	0,179	K	GP	4,00	Aspal	RB
173	Jln. Tanjung V	0,181	K	GP	4,00	Aspal	RB
174	Jln. Barumbuang I	0,092	K	GP	4,00	Aspal	RB
175	Jln. Barumbuang II	0,119	K	GP	4,00	Aspal	RB
176	Jln. Barumbuang III	0,146	K	GP	4,00	Aspal	RB
177	Jln. Barumbuang IV	0,131	K	GP	4,00	Aspal	RB
178	Jln. Barumbuang V	0,155	K	GP	4,00	Aspal	RB
179	Jln. Bonjo Baru	0,483	K	GP	4,00	Aspal	RB
180	Jln. Ujung Bukit	0,456	K	GP	4,00	Aspal	RR
181	Jln. Anggrek	0,296	K	GP	3,00	Aspal	S
182	Jln. Dahlia	0,191	K	GP	3,00	Aspal	S
183	Jln. Komplek SMK KOSGORO	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
184	Jln. Komplek SMK MUHAMMADIYAH	0,057	K	GP	3,00	Aspal	S
185	Jln. Komplek Az Hadi	0,139	K	GP	3,00	Aspal	S
186	Jln. Darussalam	0,731	K	GP	3,00	Aspal	RR
187	Jln. Syech Ibrahim Musa	0,635	K	GP	5,00	Aspal	B
188	Jln. Syech Ibrahim Musa I	0,251	K	GP	4,00	Aspal	B
189	Jln. Syech Ibrahim Musa II	0,098	K	GP	4,00	Aspal	B
190	Jln. Syech Ibrahim Musa III	0,166	K	GP	4,00	Aspal	B
191	Jln. Syech Ibrahim Musa IV	0,043	K	GP	4,00	Aspal	B
192	Jln. Syech Ibrahim Musa V	0,347	K	GP	4,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
193	Jln. Sijolang	0,131	K	GP	4,00	Aspal	B
194	Jln. Sijolang I	0,110	K	GP	4,00	Aspal	B
195	Jln. Syech Arasulli	0,609	K	GP	6,00	Aspal	B
196	Jln. Perintis Kemerdekaan	0,758	K	GP	12,00	Aspal	S
197	Jln. Mesjid Agung	0,131	K	GP	3,00	Aspal	RB
198	Jln. Umar Gafar	0,204	K	GP	4,00	Aspal	RR
199	Jln. Umar Gafar I T. Sawah	0,672	K	GP	3,00	Aspal	RR
200	Jln. Umar Gafar II T. Sawah	0,091	K	GP	3,00	Aspal	RR
201	Jln. Umar Gafar III T. Sawah	0,180	K	GP	3,00	Aspal	RR
202	Jln. Umar Gafar IV T. Sawah	0,136	K	GP	3,00	Aspal	RR
203	Jln. Umar Gafar V T. Sawah	0,099	K	GP	3,00	Aspal	RR
204	Jln. Mutiara I	0,185	K	GP	3,00	Aspal	RR
205	Jln. Mutiara II	0,113	K	GP	3,00	Aspal	RR
206	Jln. Mutiara III	0,228	K	GP	3,00	Aspal	RR
207	Jln. Mutiara IV	0,059	K	GP	3,00	Aspal	RR
208	Jln. Mutiara V	0,056	K	GP	3,00	Aspal	RR
209	Jln. U. DT Bagindo	0,208	K	GP	4,00	Aspal	RR
210	Jln. U. DT Bagindo I	0,143	K	GP	4,00	Aspal	S
211	Jln. Baitul Ridwan	0,325	K	GP	4,00	Aspal	S
212	Jln. Syech Jamil Jambek	0,529	K	GP	8,00	Aspal	S
213	Jln. K.H Ahmad Dahlan	0,472	K	GP	3,00	Aspal	B
214	Jln. Samping SMA 1	0,330	K	GP	3,00	Aspal	RR
215	Jln. Komplek Pertanian	0,625	K	GP	4,00	Aspal	S
216	Jln. Konsolidasi Belakang Dangau GON Raya Lama	0,415	K	GP	3,00	Aspal	RB
217	Jln. Situpo Raya	0,752	K	GP	4,00	Aspal	B
218	Jln. Parik Natuang	0,903	K	GP	3,00	Aspal	RR
219	Jln. Pramuka	0,111	K	GP	6,00	Aspal	B
220	Jln. Sawah Paduan	1,328	K	GP	3,00	Aspal	B
221	Jln. Ahmad Yani	0,734	K	GP	12,00	Aspal	B
222	Jln. Minangkabau	0,232	K	GP	6,00	Aspal	S
223	Jln. Muka Pasar	0,366	K	GP	2,50	Aspal	B
224	Jln. Kumango	0,162	K	GP	4,00	Aspal	RB
225	Jln. Belakang Pasar	0,181	K	GP	3,00	Aspal	RR
226	Jln. Syech Bantam	0,462	K	GP	6,00	Aspal	RB
227	Jln. Syekh D. Rasyidi	0,309	K	GP	6,00	Aspal	S
228	Jln. Dr. Rivai	0,639	P	GP	8,00	Aspal	B
229	Jln. Lapangan Ateh Ngarai	0,190	K	GP	5,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
230	Jln. Belakang Lapangan Ateh Ngarai	0,136	K	GP	2,50	Beton	S
231	Jln. Tentara Pelajar	0,468	K	GP	6,00	Aspal	B
232	Jln. Benteng	0,207	K	GP	4,00	Aspal	S
233	Jln. PMI	0,118	K	GP	5,00	Aspal	B
234	Jln. Bung Tomo	0,334	K	GP	3,50	Aspal	B
235	Jln. Singgalang	0,076	K	GP	3,00	Aspal	B
236	Jln. Sago	0,157	K	GP	3,00	Aspal	S
237	Jln. Talang	0,069	K	GP	3,00	Aspal	S
238	Jln. Pasaman	0,073	K	GP	3,00	Aspal	RR
239	Jln. Tandikat	0,084	K	GP	3,00	Aspal	RR
240	Jln. Cindua Mato	0,464	K	GP	5,00	Aspal	S
241	Jln. Pemuda	0,633	K	GP	10,00	Aspal	B
242	Jln. Sukarno Hatta	3,062	N/K	GP	8,00	Aspal	B
243	Jln. Abu Bakar	0,084	K	GP	4,00	Aspal	S
244	Jln. Kesehatan	0,537	K	GP	10,00	Aspal	B
245	Jln. Veteran	1,824	P	GP	8,00	Aspal	B
246	Jln. Bukit Apit	0,574	K	GP	4,00	Aspal	B
247	Jln. SMP Bukit Apit	0,226		GP	4,00	Aspal	RR
248	Jln. Jambak Dalam	0,705	K	GP	3,00	Aspal	S
249	Jln. Jambak Muko	0,222	K	GP	3,00	Aspal	S
250	Jln. Bukit Sangkut	0,966	K	GP	4,00	Aspal	B
251	Jln. Padat Karya II	0,255	K	GP	2,50	Aspal	B
252	Jln. Merapi	0,152	K	GP	3,00	Aspal	B
253	Jln. Angku Basa	0,359	K	GP	5,50	Aspal	S
254	Jln. Komplek Pemda Angku Basa	0,383	K	GP	3,00	Aspal	RR
255	Jln. Kabun Pulasan	0,880	K	GP	4,00	Aspal	B
256	Jln. Kabun Pulasan Dalam	0,754	K	GP	3,00	Aspal	RR
257	Jln. TDR	0,340	K	GP	4,00	Aspal	B
258	Jln. IKPS	0,220	K	GP	3,00	Aspal	S
259	Jln. Koto Barangai	0,631	K	GP	3,00	Aspal	RR
260	Jln. Panganak	0,300	K	GP	4,00	Aspal	B
261	Jln. SD Negeri 10 Pintu Kabun	0,094	K	GP	3,00	Aspal	S
262	Jln. Ranjau	0,623	K	GP	3,00	Aspal	B
263	Jln. Bukit Cegek	0,547	K	GP	3,50	Aspal	B
264	Jln. Tabek Tuhua	0,671	K	GP	3,00	Aspal	B
265	Jln. Padat Karya IIB	0,520	K	GP	3,00	Aspal	B
266	Jln. Padat Karya IIIA	0,580	K	GP	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
267	Jln. Kirab Remaja	0,364	K	MKS	3,00	Aspal	S
268	Jln. Jangkak Dalam	0,523	K	MKS	3,00	Aspal	S
269	Jln. Bundo Kandung	0,412	K	MKS	4,00	Aspal	S
270	Jln. Dt. M. B. Nan Kuniang	0,711	K	MKS	4,00	Aspal	B
271	Jln. Kosolidasi Pulai Anak Air	0,689	K	MKS	3,00	Aspal	S
272	Jln. Atas Panganak	0,760	K	MKS	4,00	Aspal	B
273	Jln. Koto Selayan	0,731	K	MKS	4,00	Aspal	S
274	Jln. Dt. Mangkuto Ameh	1,733	K	MKS	4,00	Aspal	S
275	Jln. Parak Tinggi Karatu	0,445	K	MKS	4,00	Aspal	S
276	Jln. Parak Tinggi - Jl. PDRI	0,846	K	MKS	4,00	Aspal	S
277	Jln. Komplek Polisi Gulidiak	1,169	K	MKS	4,00	Aspal	S
278	Jln. Komplek Mahkota Mas	0,728	K	MKS	3,00	Aspal	B
279	Jln. Paninjauan	0,745	K	MKS	4,00	Aspal	B
280	Jln. Samping STAIN	0,229	K	MKS	3,00	Aspal	B
281	Jln. Komplek STAIN	0,239	K	MKS	3,00	Aspal	B
282	Jln. Gulidiak	0,691	K	MKS	3,00	Aspal	S
283	Jln. Saadudin Jambek	0,803	K	MKS	6,00	Aspal	B
284	Jln. Komplek Perumahan Taman Primavera (Parak Kaco)	0,967	K	MKS	3,00	Aspal	B
285	Jln. Koto Dalam	0,274	K	MKS	3,00	Aspal	S
286	Jln. Koto Bawah	0,255	K	MKS	3,00	Aspal	S
287	Jln. Lakuang	0,416	K	MKS	3,00	Aspal	S
288	Jln. Asrama Polisi Pulai	0,463	K	MKS	3,00	Aspal	RR
289	Jln. Manunggal Karya I Pulai Anak Air	0,550	K	MKS	3,00	Aspal	S
290	Jln. Belakang Masjid Manggis Ganting	0,676	K	MKS	3,00	Aspal	S
291	Jln. Bahar kamil	0,344	K	MKS	6,00	Aspal	B
292	Jln. Bahar kamil Menuju Hotel Pusako	0,273	K	MKS	4,00	Aspal	S
293	Jln. Pondok Batu Bata Pulai Anak Air	0,175	K	MKS	3,00	Aspal	S
294	Jln. Sukarno Hatta -Hotel Pusako	0,216	K	MKS	4,00	Aspal	S
295	Jln. Mr Assaat	1,047	K	MKS	6,00	Aspal	S
296	Jln. Sanjai	0,871	K	MKS	3,00	Aspal	S
297	Jln. Banto Darano	0,643	K	MKS	4,00	Aspal	RB
298	Jln. Talao	1,178	K	MKS	4,00	Aspal	S
299	Jln. Komplek Pemda Guguk Bulek	0,374	K	MKS	4,00	Aspal	S
300	Jln. Dr. A.K Gani	0,602	K	MKS	6,00	Aspal	S
301	Jln. Komplek Primavera	0,596	K	MKS	3,00	Aspal	S
302	Jln. Flamboyan	0,326	K	MKS	3,00	Aspal	S
303	Jln. Flamboyan I	0,271	K	MKS	3,00	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
304	Jln. Flamboyan II	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S
305	Jln. Flamboyan III	0,196	K	MKS	3,00	Aspal	S
306	Jln. Flamboyan IV	0,188	K	MKS	3,00	Aspal	S
307	Jln. Kamboja	0,339	K	MKS	3,00	Aspal	S
308	Jln. Kamboja I	0,057	K	MKS	3,00	Aspal	S
309	Jln. Kamboja II	0,095	K	MKS	3,00	Aspal	S
310	Jln. Aster	0,507	K	MKS	3,00	Aspal	S
311	Jln. Anggrek Guguk Bulek	0,230	K	MKS	3,00	Aspal	S
312	Jln. Melati Guguk Bulek	0,228	K	MKS	3,00	Aspal	S
313	Jln. Nusa Indah	0,153	K	MKS	3,00	Aspal	S
314	Jln. Komplek PUSIDO	0,283	K	MKS	3,00	Tanah	S
315	Jln. Sarajo	0,287	K	MKS	4,00	Aspal	S
316	Jln. Jalan Ke SD 18	0,256	K	MKS	2,50	Aspal	B
317	Jln. H. Abdul Manan	1,189	K	MKS	6,00	Aspal	B
318	Jln. Komplek Pesantren Al Munawwarah	0,341	K	MKS	3,00	Aspal	S
319	Jln. Munggu Tarapuang	1,023	K	MKS	3,00	Aspal	RB
320	Jln. GOR Bermawi	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	B
321	Jln. Pusido	0,198	K	MKS	3,00	Aspal	RR
322	Jln. Belakang Baitul Jalal	0,715	K	MKS	3,00	Aspal	S
323	Jln. Mandiangin	0,986	K	MKS	6,00	Aspal	B
324	Jln. Swadaya	0,354	K	MKS	3,00	Aspal	B
325	Jln. Samping Mesjid Sukra	0,086	K	MKS	3,00	Aspal	B
326	Jln. Dahlia Depan Mesjid Sukra	0,530	K	MKS	3,00	Aspal	S
327	Jln. Bahder Johan	0,805	K	MKS	3,50	Aspal	S
328	Jln. Pasar Pagi Tembok	0,271	K	MKS	4,50	Aspal	RR
329	Jln. SD Inpres Jangkak	0,141	K	MKS	3,00	Aspal	B
330	Jln. Resevoir	0,084	K	MKS	3,00	Aspal	B
331	Jln. Bukit Mandiangin	1,343	K	MKS	2,50	Aspal	RR
332	Jln. H. Miskin	0,931	K	MKS	6,00	Aspal	B
333	Jln. Kusuma Bhakti	1,447	K	MKS	6,00	Aspal	B
334	Jln. Bukit Gulai bancah	2,032	K	MKS	8,00	Aspal	S
335	Jln. Komplek Gulai Bancah	0,565	K	MKS	3,00	Aspal	S
336	Jln. Komplek Pemda Bukittinggi	0,336	K	MKS	3,00	Aspal	RR
337	Jln. Manunggal Sakato Gulai Bancah	0,272	K	MKS	3,00	Aspal	S
338	Jln. Luak Anyia	0,523	K	MKS	6,00	Aspal	B
339	Jln. Veteran-Kantor Balai Kota Bukittinggi	0,177	K	MKS	8,00	Aspal	S
340	Jln. Ipuah	0,251	K	MKS	3,50	Aspal	S

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
341	Jln. Cempaka	0,206	K	MKS	3,00	Aspal	S
342	Jln. Cendana	0,619	K	MKS	3,00	Aspal	S
343	Jln. Cendana I	0,118	K	MKS	3,00	Aspal	S
344	Jln. Lingkar Gulai Bancah	0,355	K	MKS	3,00	Aspal	S
345	Jln. Samping Mesjid Al Wustha	0,207	K	MKS	3,00	Aspal	RR
346	Jln. lingkar Batang Agam	0,281	K	MKS	3,00	Aspal	RR
347	Jln. Guru Tuo	0,560	K	MKS	4,00	Aspal	B
348	Jln. Guru Tuo ke SD 05 Pintu Kabun	0,249	K	MKS	3,00	Aspal	RR
349	Jln. Manunggal I Pintu Kabun	0,345	K	MKS	3,00	Aspal	S
350	Jln. Pintu Kabun	0,495	K	MKS	5,00	Aspal	B
351	Jln. Melati Pintu Kabun	0,106	K	MKS	3,00	Aspal	S
352	Jln. Kemuning Pintu Kabun	0,184	K	MKS	3,00	Aspal	S
353	Jln. Kemuning I Pintu Kabun	0,146	K	MKS	3,00	Aspal	S
354	Jln. Kemuning II Pintu Kabun	0,166	K	MKS	3,00	Aspal	S
355	Jln. Kemuning III Pintu Kabun	0,145	K	MKS	3,00	Aspal	S
356	Jln. Mawar Pintu Kabun	0,177	K	MKS	3,00	Aspal	S
357	Jln. Mawar I Pintu Kabun	0,107	K	MKS	3,00	Aspal	S
358	Jln. Mawar II Pintu Kabun	0,068	K	MKS	3,00	Aspal	S
359	Jln. Mawar III Pintu Kabun	0,131	K	MKS	3,00	Aspal	S
360	Jln. Lubuk Rangkeyo	0,400	K	MKS	3,00	Aspal	B
361	Jln. Kinantan	0,950	K	MKS	5,00	Aspal	B
362	Jln. Kubu	0,247	K	MKS	2,50	Aspal	RR
363	Jln. Kubu Ateh	0,617	K	MKS	2,50	Aspal	RR
364	Jln. Padat Karya Gulai Bancah	0,393	K	MKS	2,50	Aspal	S
365	Jln. Padat Karya I a Gulai Bancah	0,723	K	MKS	3,00	Aspal	RR
366	Jln. Gumarang	0,287	K	MKS	3,00	Aspal	S
367	Jln. Bukik Umpang-umpang	0,442	K	MKS	2,50	Aspal	RR
368	Jln. Manunggal Bukik	0,631	K	MKS	2,50	Aspal	S
369	Jln. Pisang	0,478	K	MKS	3,00	Aspal	S
370	Jln. Anggur Atas Panganak	0,211	K	MKS	6,00	Aspal	S
371	Jln. Panorama Baru	3,354	K	MKS	6,00	Aspal	S
372	Jln. Taman Panorama Baru	0,659	K	MKS	5,00	Aspal	S
373	Jln. Kesehatan Gigi	0,168	K	MKS	3,00	Aspal	S
374	Jln. Padat Karya IV	0,800	K	MKS	3,00	Aspal	B
375	Jln. Padat Karya I A	0,580	K	MKS	3,00	Aspal	B
376	Jln. Padat Karya II A	0,630	K	MKS	3,00	Aspal	B
377	Jln. Padat Karya II B	0,625	K	MKS	3,00	Aspal	B

No Ruas	Nama Ruas	Panjang Ruas	Status Adm	Termasuk Kecamatan	Lebar (m)	Permukaan Jalan	
						Type	Kondisi
378	Jln. Padat Karya III A	0,478	K	MKS	5,00	Aspal	B

Sumber : Data Jalan 2016

Dari keseluruhan panjang jalan kota (yang penanganannya menjadi kewenangan pemerintah Kota Bukittinggi, sebesar 46,10% kondisi sedang, 27,49% kondisi baik, 19,41% kondisi rusak ringan dan 7,00% rusak berat.

▪ Jembatan;

Sampai dengan tahun 2016, terdapat 31 unit jembatan yang melintasi 2 (dua) sungai yaitu Batang Tambuo dan Batang Agam dengan panjang keseluruhan berjumlah 236 M'.

Tabel 2.4
Data Jembatan Kota Bukittinggi

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
	<u>BATANG AGAM</u>				
1	Sianok	Jl. Binuang	24,00	6,00	1
2	Bahder Johan	Jl. Bahder johan	6,00	4,00	1
3	Kp. Tarandam	Jl. Bagindo azischanan	6,00	4,00	1
4	Batang Masang/ Prona	Jl. Prona	5,00	4,00	1
5	St. Syahrir	Jl. Sutan Syahrir	6,00	18,00	1
6	Adinegoro	Jl. Adinegoro	6,00	8,00	1
7	Palolok	Jl. Haji Miskin	9,00	9,00	0
8	Anak Air / Sukarno - Hatta	Jl. Soekarno Hatta	3,00	15,00	0
9	Gulai Bancah	Jl. Kusuma Bhakti	8,00	8,20	1
10	Damar I (Box culvert)	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	4,00	1
11	Damar II	Jl. Soekarno Hatta	4,00	12,00	0
12	Melati	Jl. Melati	3,50	4,00	1
13	Syeh Arasuli	Jl. Syeck Arrasuli	4,00	7,50	2
14	Manunggal / By Pass	Jl. Manunggal By Pass	9,00	7,00	1
15	Prof. Hamka	Jl. Prof. Hamka	3,50	13,00	1
16	Pakan Kurai	Jl. Pakan Kurai	6,00	4,70	2
17	Unggek Datuk Bagindo	Jl. Unggek Datuk Bagindo	5,00	4,50	1
	<u>BATANG TAMBUE</u>				
18	Mr. Asaat	Jl. Mr. Assaat	3,50	10,00	2
19	AK. Gani	Jl. AK. Gani	4,50	9,50	1
20	Sanjai Dalam 1	Jl. Sanjai	3,00	5,50	1
21	Garegeh	Jl. Soekarno Hatta	10,00	14,00	1
22	Hajerat I	Jl. Hujerat	3,00	9,00	1
23	Hujerat II	Jl. Hujerat	9,00	9,00	1
24	Tabek Gadang	Jl. Tabek Gadang	9,00	9,00	0

No	Nama Jembatan	Nama Ruas	Panjang (m)	Lebar (m)	Kondisi
25	Tambuo	Jl. Diponegoro	12,50	11,50	1
26	Parit Antang	Jl. Parit Antang	21,00	10,00	1
27	Mangkuto Ameh	Jl. Mangkuto Ameh	12,00	9,00	1
28	Kurai	Jl. Kurai	14,00	10,00	1
29	Koto Selayan	Jl. Koto Selayan	5,00	6,50	1
30	Talao Dalam	Jl. Talao	11,00	7,00	1
31	Sanjai Dalam 2	Jl. Sanjai	6,50	7,50	1

▪ Trotoar

Dari 194,11 kilometer yang terdiri dari 8,85 Km Jalan Nasional, 5,09 Km Jalan Provinsi dan 180,17 Km Jalan Kota, terdapat 68,858 Km jalan telah memiliki trotoar dengan rincian 35,352 Km trotoar pada bagian kiri dan 33,506 Km pada bagian Kanan.

▪ Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

Jumlah keseluruhan lampu penerangan jalan umum Kota Bukittinggi sampai dengan Tahun 2016 berjumlah 2951 titik yang terbagi dalam 64 panel. Titik PJU dimaksud terdiri dari 1384 lampu mercuri dan 1126 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot dan jenis lainnya.

3. Pelayanan Air Minum;

Sesuai dengan dokumen SPAM, jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum yang aman pada tahun 2015 adalah 44.621 jiwa 2015 dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 120.491 jiwa atau sesuai dengan target 37,64%.

4. Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan);

Untuk sistem air limbah skala komunitas / kawasan / kota dilaksanakan dengan Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Sanitasi Lingkungan yang dilaksanakan dari tahun 2009 sampai sekarang. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan MCK untuk kapasitas 20-25 KK. Sedangkan untuk sistem air limbah skala kawasan atau kota Kota Bukittinggi baru melakukan kegiatan pembangunan pada tahun 2013 yang berlokasi pada kelurahan Belakang Balok;

5. Drainase

Sesuai dengan SPM ditargetkan bahwa sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dapat mengatasi dampak banjir sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam), dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

Sesuai dengan data bidang pengairan dan drainase dari 73339 M' saluran riol/drainase, 50% dalam kondisi baik bahwa kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M2. Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'.

Tabel 2.5
Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
I.	<u>Saluran Drainase Primer . A</u>							
1.	Drainase Birugo Puhun ke Rumah Potong	2,892	trapesium	1.60	2.00	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Batas Kota ke Tugu Adipura	2,765	Trapesium / U	1.50	1.60	Berfungsi	-	12
3.	Drainase Belakang Ambun Suri ke Tugu Adipura	1,298	trapesium	1.25	1.70	Berfungsi	-	12
4.	Drainase Depan PLN ke Bendung Rumah Potong	961	Trapesium / U	2.80	2.00	Berfungsi	-	12
5.	Drainase Tengah Jua ke Batang Tambuo	5,445	Trapesium / U	1.20	1.50	Berfungsi	-	12
6.	Drainase Samping BPR ke Simp. Jirek	2,900	Trapesium / U	2.00	1.20	Berfungsi	-	12
II.	<u>Saluran Drainase Primer . B</u>							
1.	Drainase Balai Kota / Makam Pahlawan	475	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	12
2.	Drainase Samping BRI Aur Kuning ke Bandar Surian	625	Trapesium	1.30	1.60	Berfungsi	-	12
3.	Drainase Samping Balai Kota Gulai Bancah ke Tambuo	950	U / Buis			Berfungsi	-	12
III.	<u>Saluran Drainase Sekunder A.1</u>						-	
1.	Drainase Samping Banto Laweh (jl. Binuang) ke Ngarai	1,057	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Samping Inkorba Jl. Abdul Manan ke Jl. Bay Pass	1,000	U	1.00	1.50	Berfungsi	-	4
	dan Batang Agam	-						
3.	Drainase Batas Kota Taluak Jl. Hafid Jalil ke Jembatan Besi	1,300	U	1.80	1.00	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Depan Mesjid Garegeh ke Batang Tambuo	500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Batas Kota Kapalo Koto ke Jembatan Parit Antang	1,500	U	0.70	1.00	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Bukit Apit ke kabun Palasan	300	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
7.	Drainase Samping Guguak Bulek ke guguak Randah	600	U	0.70	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. A.K. Gani	200	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Diponegoro s/d Jl. By Pass	162	Buis Ø 80	0.80		Berfungsi	-	4
10.	Drainase simpang Balai Kota Jl. Veteran ke Banda Jirek	425	Trapesium	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Jl. Saat Duddin Jambek	650	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Jl. Manunggal anak Air ke Saluran Surian	625	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
13.	Drainase Blk. Tk. Garegeh ke Tambuo	950	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
14.	Drinase Jl. Kinantan	950	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
15.	Drainase Jl. Parak Kaco	560	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
16.	Drainase Jl. Soekarno Hatta	2,235	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
17.	Drainase Jl. Mr. Assaat	400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
18.	Drainase Pasar Banto - Simpang Mandiangin	590	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
19.	Drainase Simpang Mandiangin ke Simpang Surau Gadang	1,917	U	0.80	0.95	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
20.	Drainase Komplek Pasar Banto	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
21.	Drainase Komplek Pasar Bawah	600	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
22.	Drainase Nawawi ke Depan Stasiun	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
23.	Drainase Simpang Jirek ke Jembatan Palolok	280	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
24.	Drainase Jembatan Palolok ke Jembatan Gulai Bancah	1,008	Buis Beton Ø 80	0.80	0.80	Berfungsi	-	4
26.	Drainase Simpang Aur Kuning ke Simpang Tarok	520	U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
27.	Drainase ke Belakang Pos Siskamling Jl. Perawat Blok E	35	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
	Belakang Balok	-						
28.	Drainase Sawah Paduan ke Pustaka Indonesia	500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
29.	Drainase Komplek Pasar Aur Kuning	450	U	1.00	1.00	Berfungsi	-	4
30.	Drainase Jl. Mr. Assaat di RW I	400	U	0.80	1.00	Berfungsi	-	4
31.	Drainase Jl. Barumbuang III - Jl. Mandailing	132	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
32.	Drainase TK Kutilang - Jl. Melati Stasiun	181	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
33.	Drainase Pasar Atas ke Pasar Lereng	300	U	0.50	1.00	Berfungsi	-	
34.	Drainase Samping Bank BPD ke Simpang Tembok	635	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
35.	Drainase Air Limbah Perumahan Belakang TMSBK ke Jl. A. Yani	150	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	
36.	Drainase Smp. Tarok Dipo ke Simp Mesjid Nurul hak	195	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	
37.	Drainase Simp. Nurul Haq ke Simp. Tembok	440	U	0.70	0.90	Berfungsi	-	
IV.	<u>Saluran Drainase Sekunder A.2</u>						-	
1.	Drainase Samping DPR ke Jl. Cindua Mato	2,475	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
2.	Drainase Depan PGSD Jl. Batang Masang - Jl. Ombilin	600	Trapezium / U	0.60	0.90	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Jl. Parak Kubang - Jl. By Pass ke Bandar Surian	1,400	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
4.	Drainase Samping Pengadilan ke Batang Agam	510	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
5.	Drainase Birugo Puhun ke ladang Kubu	500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
6.	Drainase Simpang Inkorba ke Batang Agam	250	U	0.70	0.90	Berfungsi	-	4
7.	Drainase Parak Kubang	1,500	U	0.60	0.80	Berfungsi	-	4
8.	Drainase Jl. Panganak Atas	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
9.	Drainase Jl. Bagindo Azizchan	245	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
10.	Drainase Jl. Kusuma Bhakti	940	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
11.	Drainase Depan Masjid Jamik Tigo Baleh	326	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
12.	Drainase Kapalo Koto ke Belakang Masjid Jamik Tigo Baleh	600	U	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
V.	<u>Saluran Drainase Sekunder B.1</u>							
1.	Drainase Pincuran Gaung	894	Trapezium / U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4

No	Jenis prasarana / Sarana	Satuan	Bentuk Penampang Saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemel. (kali/thn)
				B	H	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)		(iv)	(vii)	(vi)	(vii)
2.	Drainase Depan SD Bertingkat Belakang Balok ke SMP I	1,106	U / Buis	0.60	0.70	Berfungsi	-	4
3.	Drainase Barumbuang I ke Saluran Induk Samping By Pass	750	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
4.	Drainase dibelakang STAIN Garegeh ke Saluran Sekunder	1,500	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	4
5.	Riol Samping Jl. Angku Basa ke Bukit Pauh	350	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	4
VI.	<u>Saluran Drainase Tersier</u>						-	
1.	Riol Jenjang 40 ke Pasar Banto	91	U	0.30	0.50	Berfungsi	-	
2.	Riol komplek Pasar Atas	500	U	0.35	0.55	Berfungsi	-	
3.	Riol Samping Aur Kuning ke Jl. Parak Kubang	350	U	0.40	0.60	Berfungsi	-	
4.	Riol Kampung Jawa Lama dan Benteng ke Jl. Teuku Umar	100	U	0.50	0.70	Berfungsi	-	
VII	<u>Pintu Air</u>	24				Berfungsi	-	4
							-	
VIII.	<u>Kolam Retensi</u>	3	Trapezium	21.00	2.50	Berfungsi	-	12
							-	
IX.	<u>Trash rack / saringan sampah</u>	3				Berfungsi	-	12

6. Penataan Bangunan dan Lingkungan

▪ Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengurusan IMB mulai tahun 2008 telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan pada tahun 2014 menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu. Data jumlah IMB yang telah diterbitkan oleh BP2TPM pada tahun 2014 adalah 435 izin, sedangkan rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB tidak dimiliki oleh BP2TPM

▪ Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)

Pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kota Bukittinggi setiap tahunnya telah ditetapkan termasuk harga satuan pekerjaan konstruksi lainnya sebagai acuan perencanaan dan pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

7. Jasa Konstruksi

▪ Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

IUJK diterbitkan oleh Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) untuk menjalankan amanat perizinan satu pintu yang salah satu mekanismenya melalui rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jumlah permohonan IUJK yang masuk sebanyak 35 izin atau realisasi 100%, dengan menerbitkan IUJK sebanyak 35 izin.

- **Sistem Informasi Jasa Konstruksi**

Hingga tahun 2015 Kota Bukittinggi belum memiliki Sistem Informasi Jasa Konstruksi, hal ini disebabkan belum adanya sumber daya manusia dan struktur organisasi yang jelas yang menjelaskan tugas dan fungsinya. Pada Tahun 2016 melalui program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dilaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi bagi pelaku usaha dan pihak terkait yang terlibat termasuk di dalamnya masyarakat jasa konstruksi.

8. Penataan Ruang

- **Informasi Penataan Ruang**

Kota Bukittinggi pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2010-2030. Karena revisi tersebut maka kegiatan ketersediaan peta analog belum dilakukan. Tetapi untuk mendukung SPM ini Kota Bukittinggi telah melaksanakan sebanyak 6 kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dan RTBL.

- **Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR**

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan konsultasi publik untuk penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khusus kawasan Aur Biugo Tigo Baleh, dan Konsultasi Publik untuk penyusunan Dokumen Revisi RTRW.

- **Izin Pemanfaatan Ruang**

Pemerintah Kota Bukittinggi menetapkan target Izin Pemanfaatan Ruang pada Tahun 2015 adalah 100%, dan realisasi yang didapatkan dari indikator tersebut sebesar 100%, dengan telah disahkannya Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2011, sehingga pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang yang seharusnya berpedoman pada Peraturan Daerah, dapat dilaksanakan.

- **Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang**

Untuk merealisasikan SPM ini, kegiatan dilaksanakan oleh Bidang Tata Ruang Seksi Pengawasan dan Pengendalian. Dari pengaduan yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 80% dapat ditangani.

9. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Merupakan jumlah lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas yang meliputi jalan, drainase, sanitasi, air bersih dan listrik yang memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja waktu tertentu.

10. Pertanian

Per 31 Desember 2016 tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 389 persil tanah dengan luas 1.249.161,76 M2 berupa tanah bangunan gedung, tanah jalan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan. Dari total 389 persil tanah yang dikuasai, sebanyak 149 persil dengan luas 494.921,80 M2 telah memiliki sertifikat dan sebanyak 240 persil dengan luas 754.239,96 belum memiliki sertifikat

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam pengembangan sistem manajemen kelembagaan dan pengembangan pelayanan SKPD masih ditemui beberapa tantangan dan peluang yang bila dikelola akan berdampak signifikan terhadap pelayanan SKPD, beberapa dari hal tersebut adalah:

a. Lingkungan internal

- **Kekuatan (Strength)**
 - Tersedianya kualitas sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi berdasarkan latar belakang disiplin ilmu ke PU-an
 - Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas,
 - Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait,
 - Adanya petunjuk teknis tentang penataan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan yang didukung oleh Perda,
 - Dukungan gedung kantor dan fasilitas penunjang yang cukup.
- **Kelemahan (Weaknesses)**
 - Kurangnya Sumber daya aparatur secara kuantitas.
 - Terbatasnya kesempatan mengikuti pelatihan.
 - Kurangnya sarana dan prasarana.
 - Kurang lancarnya alur pelaporan (Evaluasi),
 - Belum terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang disusun.
 - Kurangnya pemahaman aparatur terhadap Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.
 - Masih kurangnya koordinasi antar bidang dalam lingkup internal kedinasan.

Lingkungan internal merupakan unsur-unsur penentu bagaimana mengupayakan Kinerja Staf (SDM) untuk menangani tugas-tugas kedinasan secara profesional. Dalam peningkatan pelayanan aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi, dirasa masih diperlukan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan teknik di bidang perencanaan wilayah dan kota, dan teknik sipil untuk menghadapi tugas-tugas masa depan dalam rangka melaksanakan otonomi ke level pemerintahan tingkat bawah dan menghadapi pertumbuhan / peningkatan pembangunan.

Disamping itu untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kepada masing-masing pegawai diupayakan untuk meningkatkan pemahaman dan peningkatan kemampuan kerja serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diemban.

b. Lingkungan Eksternal

- **Peluang (Opportunities)**
 - Dukungan yang tinggi dari pemerintah, instansi terkait serta masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan perkotaan sesuai dengan rencana Pekerjaan Umum secara menyeluruh dan berkesinambungan,
 - Adanya partisipasi masyarakat dan pihak terkait membantu mensosialisasikan pelaksanaan pembangunan perkotaan sesuai dengan perencanaan,
 - Adanya Perda yang mendukung penerapan rencana pembangunan perkotaan yang telah ditetapkan,

- Adanya kerjasama dengan para investor untuk merealisasikan pembangunan perkotaan,
- Adanya program kerjasama pendekatan wilayah guna kelancaran dan kesempurnaan rencana pembangunan perkotaan,
- Adanya kondisi alam dan letak Kota Bukittinggi yang strategis.
- Ancaman (Threats)
 - Sulitnya pembebasan tanah guna penerapan rencana pembangunan ruang kota secara optimal,
 - Sebahagian masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi dalam upaya merealisasikan rencana pembangunan kota, sehingga terjadi pergeseran / penyimpangan dari rencana semula,
 - Terbatasnya lahan / areal pembangunan kota yang menyebabkan sangat tingginya nilai tanah, sehingga masyarakat tidak lagi mempedulikan rencana pembangunan kota,
 - Sulitnya birokrasi antar wilayah guna kerjasama pendekatan wilayah.

Lingkungan Eksternal merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk menentukan strategi apa yang akan diambil dalam proses pencapaian visi dan misi seoptimal mungkin.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, merupakan perencanaan keberlanjutan pembangunan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Capaian kinerja renstra periode sebelumnya telah menghasilkan berbagai kemajuan dan ketersediaan infrastruktur yang cukup berarti namun masih dihadapkan berbagai permasalahan pembangunan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi berdasarkan capaian kinerja dan hambatan yang dihadapkan pada periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penunjang layanan internal kedinasan;
 - a. Terbatasnya sumber data dan informasi baik itu secara primer maupun sekunder sebagai acuan utama dalam yang penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM juga disebabkan oleh masih kurangnya kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kekuatan suatu data dan informasi
 - b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan UPTD Dinas belum optimal.
 - c. Kurangnya pemahaman Bidang-bidang pada SKPD terhadap Tupoksi masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan baik secara internal maupun secara eksternal.
 - d. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang atau meningkatkan kinerja aparatur baik peralatan kerja internal maupun peralatan untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan bidang jalan dan bangunan pelengkap;
 - a. Penurunan kondisi jalan dan jembatan; dimana 64,73% kondisi sedang, 21,39% kondisi baik, 24,03% kondisi rusak ringan dan 2,92% rusak berat dari total panjang jalan 194,11 kilometer yang terdiri dari 8,85 Km Jalan Nasional, 5,09 Km Jalan Provinsi dan 180,17 Km Jalan Kota.
 - b. Dari 194,11 kilometer jalan baru 68,858 Km jalan telah memiliki trotoar dengan rincian 35,352 Km trotoar pada bagian kiri dan 33,506 Km pada bagian Kanan;
 - c. Dari 2951 titik lampu PJU yang terbagi dalam 64 panel dimana 1384 lampu merupakan mercuri dan 1126 titik lampu TL 40 Watt dan sisa berupa lampu taman, lampu hias, lampu sorot dan jenis lainnya. Sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah akan dilakukan revitalisasi terhadap lampu-lampu jalan diatas terutama lampu mercuri.

3. Genangan dan drainase; kondisi 2016 dengan kondisi genangan sebanyak 7 titik dengan lama genangan 1 s/d 2 jam dengan luas 8000 M2. Untuk mengatasi genangan dimaksud tambahan kebutuhan saluran diestimasi 4365 M'
4. Air Minum ; dimana 93% masyarakat telah mengakses air minum yang layak dari berbagai sumber, namun baru 37,64% (kondisi 2015) cakupan layanan perpipaan. Tahun 2020 diamanatkan seluruh masyarakat (100%) memiliki ketersediaan air minum yang layak sesuai dengan pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih) .
5. Penataan Bangunan dan Lingkungan; masih banyaknya bangunan yang belum tertata serta perda RTRW dan RDTR dan dokumen teknis lainnya yang masih diperlukan dalam penataan dan pemanfaatan ruang kota;
6. Masih belum selesainya konsolidasi tanah *by pass* dan masih terdapatnya masalah pertanahan masyarakat lainnya.

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dengan kata lain, RPJM merupakan hasil visi dan misi dan program dari walikota dan Wakil Walikota pada periode tersebut, dimana Walikota Kepala Daerah Kota Bukittinggi terpilih Periode 2016 – 2021 adalah pasangan H. RAMLAN NURMATIAS, SH dan H. IRWANDI, SH. Adapun Visi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Terhadap Visi Jangka Menengah Daerah Kota tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, penataan ruang dan pertanahan serta tugas pembantuan lainnya, perlu menjabarkan, memprogramkan dan melaksanakan visi dimaksud sesuai tugas pokoknya agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan.

- **KOTA TUJUAN PARIWISATA ;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam menyediakan infrastruktur pendukung pariwisata yang layak seperti jalan akses menuju; kawasan/objek wisata, penyediaan utilitas, berupa jaringan air minum, sanitas, drainase, pedestrian/trotoar dan penerangan jalan umum. Dan penyediaan desain infrastruktur yang inovatif dan kreatif sehingga melahirkan destinasi-destinasi baru pendukung kepariwisataan;
- **KOTA TUJUAN PENDIDIKAN, KESEHATAN;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam membantu/memfasilitasi dinas terkait secara teknis dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memenuhi persyaratan teknis serta memiliki jalan akses yang cukup baik terhadap pejalan kaki maupun kendaraan, serta memelihara kawasan sarana dan prasarana bebas dari genangan dengan lingkungan yang sehat dan nyaman.

- **KOTA TUJUAN PERDAGANGAN DAN JASA;** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan berperan dalam mendorong penyediaan infrastruktur yang memadai, baik berupa penyediaan prasarana jalan dan untuk kelancaran mobilisasi orang dan barang menuju centra-centra pemasaran ataupun sebaliknya disamping memberikan saran teknis terhadap SKPD terkait.

Dalam mewujudkan pencapaian visi daerah **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** maka didukung dengan 5 (lima) misi pembangunan yaitu;

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Berdasarkan misi diatas, misi 3 “Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan” terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedang misi lainnya memiliki hubungan yang terkait secara tidak langsung.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030;

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan dokumen RTRW tersebut.

Dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, dari fungsi pariwisata, Kota Bukittinggi termasuk sebagai salah satu tujuan wisata nasional, terkait dengan karakter budaya dan sejarah kota dimasa lalu. Dalam konstelasi struktur perwilayahan nasional, Bukittinggi termasuk dalam kawasan andalan Agam-Bukittinggi dan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bagi PKL disekitarnya yaitu Padangpanjang, Lubuk Sikaping, Payakumbuh, dan Batusangkar, terkait sektor unggulan pada sektor perkebunan, pariwisata dan pertanian.

Dari segi penyediaan infrastruktur kawasan, kawasan perkotaan Bukittinggi memiliki nilai ekonomis di bidang transportasi darat. Hal ini dikarenakan oleh posisi Kota Bukittinggi yang berada pada simpul transportasi regional nasional di Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi ini merupakan simpul poros utara-selatan dan poros barat-timur. Poros utara selatan ini berupa jalan

lintas tengah (jalinteng) yang menghubungkan antara Banda Aceh hingga ke Lampung dan berpotongan dengan poros barat-timur yang berupa jalan lintas Padang-Pekanbaru. Kedua jaringan jalan ini merupakan jaringan jalan arteri primer nasional yang secara regional memiliki nilai ekonomis nasional.

Dalam konteks RTRW Pulau Sumatra dan RTRW Provinsi Sumatra, Kota Bukittinggi diarahkan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai pusat pelayanan sekunder dengan perkiraan jumlah penduduk pendukung 150.000 Jiwa pada tahun 2019. Selain fungsi lindung yang berperan cukup besar dalam konteks wilayah, terkait kondisi fisiknya, fungsi budidaya yang diarahkan mencakup fungsi permukiman perkotaan, kehutanan, perkebunan, dan pariwisata.

A. Arahan Struktur Ruang

1. Pusat Pelayanan; Pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara hirarkis beserta lokasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Pusat Pelayanan Primer
 - Kawasan Pasar Atas
 - Kawasan Aur Kuning
- 2) Pusat Pelayanan Sekunder
 - Kawasan Gulai Bancah
 - Kawasan Belakang Balok
 - Kawasan Campago Ipuah
- 3) Sub Pusat pelayanan Kota
 - Kawasan Garegeh
 - Kawasan Ladang Cakiah

Sedangkan pusat lingkungan diorientasikan dalam kegiatan sosial budaya bagi permukiman disekitarnya. Pusat lingkungan dikembangkan dengan beberapa titik utama yang bertujuan menarik perkembangan Kota Bukittinggi ke arah selatan dan timur.

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

1) Sistem jaringan jalan

Fungsi Jalan Arteri Primer terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota besar lainnya dalam ibukota provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antara satu PKN dengan PKN dalam satu provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar Pusat Pelayanan Kota (Primer) dalam wilayah Kota Bukittinggi. Adapun jalan yang berperan sebagai jalan arteri primer adalah Jl. By Pass dan Jl. Soekarno Hatta. Sedangkan Fungsi Jalan Arteri Sekunder terhadap transportasi Kota Bukittinggi adalah jalan-jalan yang dapat berfungsi sebagai jalur pengalih arus lalu lintas angkutan utama yang menuju ke dan dari Kota Bukittinggi untuk mengurangi beban jalan Arteri Primer dan kepadatan lalu-lintas di dalam kota. Selain itu berfungsi juga melayani pergerakan dari Pusat Pelayanan Kota (Primer) ke Pusat Pelayanan Kota (Sekunder). Adapun jalan arteri sekunder adalah Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Pemuda, Jl. Diponegoro, Jl. St. Syahrir, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Veteran, Jl. Jend. Soedirman, Jl. Tigo Baleh, dan Jl. Bermawi St. Rajo Ameh.

Berdasarkan arahan RTRWN (PP26/2008) tentang Jalan Bebas Hambatan, jaringan jalan bebas hambatan non tol dikembangkan dengan menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dengan melebarkan ruas jalan By Pass. Melalui upaya pelebaran ruas jalan By Pass, rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kota Bukittinggi

dilakukan dengan tanpa melakukan alihfungsi lahan-lahan pertanian dan ruang terbuka lainnya, sebagai salah satu upaya menjaga keseimbangan lingkungan kota. Untuk jalan kolektor sekunder, berfungsi menghubungkan antar pusat sekunder. Sedangkan jalan lokal merupakan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat lingkungan.

2) Sistem Perparkiran

Sebagai salah satu kota tujuan wisata dan perdagangan, Kota Bukittinggi diarahkan mempunyai sistem perparkiran khususnya pada kawasan perdagangan dan jasa serta pariwisata. Parkir bersama dalam bentuk pelataran parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dapat dibangun pada semua peruntukan lahan.

Perencanaan sistem perparkiran khusus di luar kebutuhan perparkiran untuk aktivitas sehari-hari masyarakatnya diperlukan guna mendukung fungsi pariwisata. Sistem perparkiran yang bersifat off street dikembangkan di beberapa kawasan.

3) Sistem Prasarana Perkeretaapian

Prasarana perkeretaapian terdiri atas jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api. Keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lain serta dengan moda transportasi lain dilakukan di stasiun.

Jaringan jalur kereta api yang dikembangkan dapat dibagi atas:

- Jaringan jalur kereta api antar kota, menghubungkan Jalur Padang – Padang Panjang - Bukittinggi – Payakumbuh – Pekanbaru – Dumai. Jalur KA Padang Panjang – Payakumbuh, saat ini masih berupa jalan rel non operasi (jalan mati), sesuai dengan Renstra Ditjen Perkeretaapian Tahun 2010 – 2014, terdapat Program Peningkatan Jalan KA.
- Jaringan jalur kereta api perkotaan, melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik. Sistem kereta api yang akan dikembangkan adalah kereta api gantung. Jalur wisata yang memanfaatkan kereta gantung tersebut akan menghubungkan daya tarik wisata di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam dengan salah satunya memanfaatkan daya tarik wisata alam Ngarai Sianok.

Stasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur KA antarkota dikembangkan pada stasiun KA yang telah ada yaitu di Jl. Angkatan 45 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang. Sedangkan stasiun kereta api perkotaan yang berfungsi sebagai jalur wisata dikembangkan pada beberapa titik daya tarik wisata.

3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Kelistrikan

Sistem jaringan listrik di Kota Bukittinggi terdiri dari Jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan sebagai sistem interkoneksi meliputi Gardu Distribusi yang tersebar di Kota Bukittinggi; serta Jaringan tegangan menengah 20 KV yang keluar dari gardu induk melalui saluran udara tegangan menengah maupun saluran kabel tegangan menengah

Jaringan tegangan rendah 7 KV adalah saluran transmisi kabel tegangan rendah umumnya yang mengikuti pola jaringan jalan dan Jaringan Distribusi Listrik meliputi Distribusi Rayon Bukittinggi

4. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi di Kota Bukittinggi, diarahkan sebagai berikut:

- Pusat otomatisasi sambungan telepon di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Kantor Pos Besar di Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguak Panjang
- Menara telekomunikasi (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator di Kel. Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan dan Kel. Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh. Hal ini dilakukan untuk memelihara estetika ruang udara Kota Bukittinggi.

5. Rencana Pengembangan Infrastruktur Perkotaan

1) Sistem Penyediaan Air Minum

- unit air baku; Prasarana air minum di Kota Bukittinggi memanfaatkan Mata Air Sungai Tanang, Mata Air Cingkariang, Sumur Bor Tabek Gadang, Sumur Bor Birugo, Sumur Dangkal Kubang Putih dan Air Permukaan dari Batang Sianok sebagai sumber airnya dengan Reservoir : Birugo 1, Birugo 2, Mandiangan, Benteng, Panorama Baru, dan Kuriman.
- unit produksi, meliputi unit-unit produksi yang ada saat ini dan rencana pengembangan untuk memenuhi rata-rata kebutuhan produksi di Kota Bukittinggi sebesar kurang lebih 810 liter/detik.

Terdapat juga penyediaan air minum secara konvensional yang tidak digolongkan ke dalam SPAM berupa penampungan air hujan, sumur dangkal, sumur pompa, instalasi air kemasan, dan sebagainya.

2) Sistem Jaringan Air Limbah

Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual maupun komunal. Sistem pembuangan air limbah dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik skala kawasan (modular) atau skala kota dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sistem pembuangan air limbah terpusat dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) diarahkan disebelah Timur dan Tenggara Kota Bukittinggi.

3) Sistem Jaringan Drainase

Konsep pengembangan jaringan drainase adalah sebagai berikut.

- Aliran air diarahkan ke Ngarai Sianok, Batang Agam dan Batang Tambuo.
- Melakukan normalisasi pada saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah, dengan memperlebar saluran (bila memungkinkan) ataupun dengan pendalaman dasar saluran.
- Karena daerah ini memiliki kontur pegunungan maka dimensi drainase semakin ke arah bawah seharusnya semakin melebar, agar dapat menampung debit air maksimum.

Sistem jaringan drainase primer memanfaatkan sungai. Kecenderungan kontur yang miring Kota Bukittinggi memberikan keuntungan terkait dalam proses pelimpasan air dari tempat yang lebih tinggi ke daratan yang lebih rendah yaitu Batang Sianok dan Batang Tambuo. Sedangkan sistem jaringan drainase sekunder cenderung mengikuti jaringan jalan. Sistem jaringan tersier cenderung berfungsi mengalirkan air dari rumah tangga ke sistem jaringan drainase sekunder. Sedangkan untuk membantu peresapan air hujan ke dalam tanah dimanfaatkan kolam retensi. Kolam Retensi diarahkan diKecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

3.4. Penentuan isu strategis

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan renstra sebagai tahapan dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan kedepannya.

Berdasarkan telaahaan terhadap permasalahan internal dinas, telaahaan terhadap visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih; kebijakan/renstra Disprasjaltarkim serta rensta kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan telaahaan terhadap RTRW maka beberapa rumusan isu strategis yang muncul yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM dan Peralatan serta sarana penunjang pekerjaan yang memadai yang dapat memacu pelaksanaan pekerjaan lebih kreatif dan inovatif.
2. Penurunan kondisi perkerasan jalan yang saat ini dominan dalam kondisi sedang dan akan menurun menjadi kondisi rusak ringan dan berat;
3. Revitalisasi dan penambahan lampu penerangan jalan umum sehingga menjadikan Bukittinggi Kota yang terang dan menunjang sebagai kota pendidikan, kesehatan serta perdagangan dan jasa.
4. Target 100-0-100 (100% akses air minum, dan 100% akses sanitasi layak) yang secara bersama-sama baik program dan kegiatan maupun pendanaannya menjadi prioritas baik dipusat maupun didaerah sebagai bentuk sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah;
5. Menjadikan RTRW Kota Bukittinggi sebagai matra spasial dalam pembangunan infrastruktur .
6. Pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti kesenjangan pembangunan antara kawasan pusat kota dengan kawasan pinggiran kota, dan mengatasi banjir/genangan di beberapa kawasan strategis Kota.
7. Tantangan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum kedepan juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Sehingga bagaimana pembangunan fisik, sosial dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan.
8. Perlu adanya perwujudan perkuatan perencanaan pembangunan pembangunan infrastruktur Ke PU an. Kelemahan-kelemahan yang terasa menggejala selama ini seperti keterbatasan ketersediaan data, statistic dan informasi secara bertahap melalui sasaran, tujuan, program dan kegiatan dalam Renstra diupayakan untuk ditiadakan.
9. Peningkatan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian permasalahan pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi;

▪ ***Tinjauan Visi dan Misi serta Rancangan Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021.***

Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu *“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata , Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya”*.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan ;
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ;
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat;

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah);
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
9. Pengembangan Pariwisata;

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu *“Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan ; dengan prioritas pembangunan “Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur”*.

▪ ***Rancangan Renstra DPUPR 2018-2021.***

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi telah merumuskan rancangan renstra dengan visi : *“Terwujudnya infrastruktur kota dalam rangka mendukung Bukittinggi sebagai kota tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya”*.

Visi tersebut didukung dengan misi:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik;
3. Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
4. Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi 2016-2021 dapat dilihat sebagai berikut:

- **Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an**
 Tujuan dari Misi 1 yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan sasaran:
 - ✓ Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP
 - ✓ Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

Tabel 4.1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 1)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR	B	B	B	B	B	B
	2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	5	5	5	5	5	5

- **Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik.**

Tujuan dari Misi 2 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan dengan sasaran:
 - ✓ Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan, dengan sasaran:
 - ✓ Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan / banjir.
3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian ; dengan sasaran:
 - ✓ Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.
 - ✓ Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah
 - ✓ Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi
5. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih), dengan sasaran :
 - ✓ Pemenuhan kebutuhan air bersih
 - ✓ Pemenuhan drainase layak

Tabel 4.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 2)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik	85,20%	87,30%	90%	92%	94%	95%
2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan/ banjir.	Persentase wilayah/titik yang terkena dampak genangan/ banjir	100%	85%	85%	70%	55%	40%
3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi	98%	98%	98%	98%	98%	97%
4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/Gedung pemerintah	persentase gedung /bangunan yang memenuhi standar layak fungsi	0%	0%	10%	20%	30%	40%
	2. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan	10%	10%	20%	40%	60%	75%
6. Pemenuhan target universal acces (sanitasi dan air bersih)	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih	90,64%	90,64%	95,45%	97%	100%	100%
	2. Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak	40%	40%	55%	60%	65%	70%

- **Misi 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.**

Tujuan Misi 3 yaitu : Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota; dengan sasaran:

- ✓ Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang;

Tabel 4.3
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 3)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota.	1. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	60%	65%	70%	75%	80%	85%
		pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	55%	60%	65%	70%	75%

- **Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, pengadaan, dan penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan umum dan pembangunan**

Tujuan Misi 4 yaitu : Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan, dengan sasaran :

- ✓ Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas
- ✓ Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah

Tabel 4.2
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2016-2021 (Misi – 4)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan.	1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP	-	50%	55%	60%	65%	70%
	2 Selesainya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan	-	35%	40%	45%	55%	60%

Sesuai dengan nomenklatur SKPD yang baru, Bidang Pertanahan baru bergabung pada tahun 2017, sehingga tidak dapat dibuatkan target kinerja untuk tahun 2016.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah metoda terpilih dan pola yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang sudah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Tabel sebelumnya. Strategi dan kebijakan jangka menengah ini harus mampu menunjukkan bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu, strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2016-2021.

4.3.3 Strategi

Dalam mewujudkan tujuan atas misi yang telah ditetapkan maka ditetapkan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan menyangkut jasa konstruksi;
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bina marga;
5. Mempertahankan, menambah serta meningkatkan kondisi, mutu dan fungsi jalan, jembatan dan irigasi;
6. Memelihara, merehabilitasi, membangun dan meningkatkan jaringan drainase untuk mengurangi titik genangan air ;
7. Meningkatkan mutu fasilitas fisik dasar dan prasarana umum;
8. Melakukan peningkatan cakupan pelayanan air bersih;
9. Melakukan penyediaan instalasi jaringan penerangan jalan umum (PJU) yang merata dan memadai;
10. Penyediaan Database ke-PU-an;
11. Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Menertibkan pelanggaran terhadap pemanfaatan tata ruang kota yang tidak sesuai dengan RTRW;
13. Menyediakan informasi pertanahan yang berkualitas;
14. Menyelesaikan konflik pertanahan pemerintah daerah;
15. Melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

1.3.3 Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengadakan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemajuan teknologi dan informasi;
3. Mengirimkan aparatur dan pelaksana jasa konstruksi untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi jasa konstruksi;
4. Mengadakan dan melakukan pemeliharaan alat-alat berat yang dibutuhkan;
5. Melakukan pengananan jalan, jembatan, dan irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab;

6. Menyiapkan perencanaan teknis serta mensosialisasikan rencana-rencana pembanguna jalan, jembatan dan irigasi ;
7. Melakukan pemetaan terhadap jaringan drainase yang yang perlu dipelihara, direhabilitasi, dibangun dan ditingkatkan;
8. Meningkatkan kapasitas produksi air baku air minum dengan dengan melakukan inovasi terhadap sumber air untuk air minum;
9. Melakukan pemetaan terhadap daerah yang membutuhkan PJU serta melakukan pembaharuan dan peremajaan terhadap PJU yang sudah tidak layak;
10. Menyiapkan database ke- PU an dalam bentuk data spasial (berbasis GIS);
11. Melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar memanfaatkan ruang kota sesuai dengan RTRW;
12. Melakukan pendataan terhadap bangunan dalam kota;
13. Melakukan pengembangan informasi pertanahan dengan membuat arsip elektronik;
14. Melakukan mediasi dan pendekatan dengan pihak-pihak yang memiliki konflik pertanahan dengan pemerintah daerah;
15. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi mengenai kebutuhan tanah dalam rangka pemenuhan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan. dimana kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa atau sebagai suatu pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam Renstra ini terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersifat pure program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti pembangunan infrastruktur ke PU an seperti Pengairan dan drainase, Jalan dan Jembatan, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan dengan mengacu kepada rancangan program dan pagu pendanaan dalam RPJMD. Disisi lain juga terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD dengan pertimbangan terbatasnya sumber daya aparatur teknis pada SKPD tersebut maka untuk penganggarannya masih ditampung dalam Rencana Program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan tahun perencanaan penganggarannya. Dalam Renstra ini juga terdapat kegiatan lintas wilayah seperti normalisasi batang/sungai yang melalui Kota Bukittinggi, dalam artian bahwa implementasi kegiatannya hanya pada bagian sungai yang melewati administrasi Bukittinggi.

Dalam renstra ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kewenangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan yang dilaksanakan adalah Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang dalam pelaksanaannya ada yang bersifat rutin SKPD dan penunjang pelaksanaan urusan dalam pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran dengan target indikator yang telah disusun sebagaimana tergambar dalam table 5.1.

Tabel 5.1

**Rencana Program dan Kegiatan dan Indikator Kinerja
Sesuai Rancangan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
1.	MISI 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan peralatan ke PU an					
	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SAKIP	Nilai SAKIP Dinas PUPR		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran tiap tahunnya
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang yang dibayar
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti/dihadiri
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan prasarana pendukung
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	
								Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	
								Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	
								Pemeliharaan berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas	
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
		Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas	
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
									Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	Jenis dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya
									Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
									Fasilitasi kegiatan DAK bidang ke PU an	Jumlah bidang DAK yang difasilitasi
									Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase pemenuhan alat berat Kebinamargaan
									Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang diadakan/ dibeli
									Pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat yang dipelihara
2.	MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kota untuk mendukung pelayanan publik									
	1. Meningkatkan kualitas infrastruktur Jalan dan jembatan	1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase tingkat jalan dan jembatan dengan kondisi baik					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	
								Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	
								Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	
								Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan	
								Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun	
								Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	
								Rehabilitasi Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pembangunan Box Culvert Pengecoran bahu/ badan jalan Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta Perencanaan DAK Jalan	Jumlah box culvert yang dibangun Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor Jumlah DED yang disusun Jalan 2 jalur yang dibangun Jumlah perencanaan Dak jalan yang dikerjalan
					Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan
					Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin
					Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Panjang Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan
					Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Panjang Jalan trotoar yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin
					Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap
					Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dipelihara
					Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah/ direvitalisasi
					Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar
					Program Sistim Informasi / Database Jalan Jembatan	Tingkat ketersediaan informasi/data base jalan
					Leger Jalan Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen leger Jalan Kota Bukittinggi
					Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan
					Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali
					Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat
					Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya	Persentase sungai yang terpelihara/ normalisasi
					Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi
	2. Memberikan rasa aman terhadap bahaya banjir dan genangan	1. Berkurangnya wilayah yang terkena dampak genangan /banjir	Persentase wilayah/ titik yang terkena dampak genangan/ banjir			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Panjang Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun
					Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Panjang Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan
					Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana
	3. Meningkatnya cakupan air irigasi untuk daerah pertanian	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana irigasi	Persentase wilayah cakupan irigasi yang terpenuhi		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase DI yang beririgasi teknis
					Pembangunan Saluran Irigasi	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun
					Rehab/ peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang di Rehab/ peningkatan
					Pemeliharaan Rutin Irigasi	Irigasi yang dipelihara
					Perencanaan DAK Irigasi	Jumlah perencanaan DAK irigasi yang dikerjakan
	4. Meningkatkan pengelolaan pembangunan gedung.	1. Meningkatnya mutu dan umur teknis bangunan publik/ gedung pemerintah	Persentase gedung/ bangunan yang memenuhi standar layak fungsi		Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	jumlah pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum
					Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun
					Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab
					Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun
					Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah rumah dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali
					Rehab Gedung Parkir Ex Gloria	Jumlah gedung parkir Ex Gloria yang direhab
					Rehab Balai Pemuda	Jumlah balai pemuda yang direhab
					Rehabilitasi/ Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/ pembangunan kembali Pasar Atas
					Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi
					Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	Persentase gedung negara dan swasta yang laik fungsi
					Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung
		2. Meningkatnya ketersediaan informasi dan perizinan jasa konstruksi	persentase masyarakat yang membangun sesuai advice planning yang dikeluarkan		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan informasi jasa konstruksi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
					Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan
					Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ di update
					Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket perencanaan pekerjaan fisik SKPD dengan nilai kecil dari 100.000.000 tersusun
					Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun
	6. Pemenuhan target universal access (sanitasi dan air bersih)	1. Pemenuhan kebutuhan air bersih	persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman
					Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibuat
					Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan direvitalisasi
					Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dipelihara
					Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun
					Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi
					Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi
					Pembangunan toilet umum	Jumlah toilet umum yang dibangun
					Pembangunan iPLT dan IPAL	Jumlah IPLT dan IPAL yang dibangun
					Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Jumlah Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat yang terlaksana
					Pemipaan (SR) Masyarakat	Jumlah Pemipaan (SR) Masyarakat
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Terlaksanannya Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)
					Pamsimas	Terlaksanannya Pamsimas
		2. Pemenuhan drainase layak	Persentase drainase perkotaan yang layak		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik
					Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE			URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
							Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara
							Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan
							Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)
3. MISI 3 : Meningkatkan penataan ruang kota serta mengendalikan dan mengarahkan perkembangan pembangunan kota yang berkualitas dan berkesinambungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota								
	1. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kota	1. Peningkatan penataan ruang dan ketaatan terhadap dokumen tata ruang	Kesesuain pemanfaatan ruang kota				Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah
							Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya Pembuatan Keterangan Rencana Kota
							Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Jumlah Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak
							Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun
							Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTR Kota Bukittinggi terlaksana
							Sosilaisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana
							Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi terlaksana
							Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi dilanjutkan
							Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang
							Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksanannya Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
							Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksanannya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang
							RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL kawasan strategis tersusun
							Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan
							Penyusunan dan Pendataan Arsip – Arsip Tata ruang serta Digitalisasi Data	Jumlah Arsip dan digitalisasi data tata ruang yang tersusun dan terdata
							Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Jumlah kawasan Ngarai Sianok yang diidentifikasi dan dipetakan
							Sistem Informasi Tata ruang	Tersedianya sitem informasi tata ruang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE				URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
			Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap tata ruang
								Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan pengawasan/ pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan
								Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah audit pemanfaatan ruang yang disusun
								Pembuatan Bilboard Tata Ruang	Jumlah bilboard yang dibuat
								Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan	Jumlah Verifikasi dan penyelesain pengaduan masyarakat masalah bangunan
4.	Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan dalam rangka penyediaan informasi, penyelesaian masalah pertanahan , dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan								
	1. Meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan	1. Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas	Persentase pelayanan pertanahan sesuai SOP					Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase ketersediaan informasi pertanahan
								Pembuatan Sistem Informasi Geografis Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS tanah dan bangunan
								Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanahan
								Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah
								Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan
								Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	tersedianya tanah untuk kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi
				Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya sosialisasi pengadaan tanah				
		2. Selesaiinya konflik-konflik pertanahan pemerintah daerah	Persentase konflik pertanahan pemerintah daerah diselesaikan					Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah
								Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan di Kota Bukittinggi yang sejalan dengan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan.

Penetapan indikator harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Revisi Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018–2021, indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

1. Jalan; dengan indicator Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang dengan kondisi awal 85,20% dan ditargetkan 95% pada akhir RPJMD/renstra.
2. Air minum; dengan persentase cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dengan kondisi awal 90,64% menjadi 100% pada akhir renstra.
3. Air limbah; dengan persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah (sanitasi) yang layak dengan target 100% diakhir perencanaan dengan kondisi awal 93,11%.
4. Regulasi dan informasi tata ruang; dengan Persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah; dengan kondisi awal 40% menjadi 90% pada akhir renstra.
5. Tertib pemanfaatan ruang dengan persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan dengan kondisi awal 40% menjadi 80% pada akhir renstra
6. Permasalahan tanah yang dapat diselesaikan kondisi awal 80% menjadi 85% pada akhir renstra

Untuk melihat indikator dan target kinerja renstra yang direncanakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2016-2021) yang berkaitan dengan RPJMD dapat dilihat dalam table 6.1 berikut.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD

INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA TAHUN						KONDISI AKHIR RENSTRA
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1. Persentase jalan dengan kondisi baik/ sedang	85,20%			90%	92%	94%	95%	95%
2. persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	90,64%			97%	100%	100%	100%	100%
3. persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah (sanitasi) yang layak	93,12%			98%	100%	100%	100%	100%
4. persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	40%			75%	80%	85%	90%	90%
5. persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	40%			60%	65%	70%	75%	80%
6. Persentase permasalahan tanah yang dapat diselesaikan	80%			82%	83%	84%	85%	85%

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018 - 2021 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara SOPD, masyarakat dan dunia usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur dan penataan ruang perlu dilandasi dengan aturan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif melalui tahapan musrenbang dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum. Dalam hal itu tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang makin kondusif dan kompetitif, menguarngi resiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta. Disisi lain optimalisasi manunggal sakato juga merupakan salah upaya yang perlu terus didorong untuk menciptakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan melaksanakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018 - 2021 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja pelayanan ke PU an dan penataan ruang serta pertanahan dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Dengan demikian koordinasi dan integrasi secara vertikal maupun hoizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran yang ada bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Bukittinggi : 2017

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI**

Ir. OKTAVIANUS, MT.
NIP.19631030 199202 1 002

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN						INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)						SAT.						DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN						TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																														TAHUN 2017				TAHUN 2018				TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				KONDISI AKHIR RENSTRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																														TA R G E T	Rp.			TA R G E T	Rp.			TA R G E T	Rp.			TA R G E T	Rp.			TA R G E T	Rp.			TA R G E T	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

					Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman kantor yang dibeli	paket	1	1	43.800.000	1	31.450.000	1	38.000.000	1	41.000.000	1	50.000.000	4	204.250.000
					Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Persentase rapat/koordinasi yang diikuti dan dihadiri	tahun	1	1	465.000.000	1	250.000.000	1	254.100.000	1	279.000.000	1	300.000.000	4	1.548.100.000
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar	orang	41	41	1.035.000.000	41	1.035.600.000	41	1.185.000.000	41	1.300.000.000	41	1.400.000.000	41	5.955.600.000
					Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Jasa pengamanan kantor yang dilaksanakan	Kantor (2 OPD)	1	1	197.000.000	1	197.000.000	1	238.370.000	1	262.207.000	1	285.000.000	1	1.179.577.000
					Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	paket	126	126	330.435.900	126	380.435.900	126	399.828.770	126	439.811.647	126	460.000.000	504	2.010.512.217
					Penunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	Jumlah paket yang ditunjang Operasional Pengelola Teknis Pelaksana Kegiatan Proyek	paket	126	150	120.000.000	126	150.000.000	126	160.000.000	126	170.000.000	126	180.000.000	504	780.000.000
					Penunjang Operasional Kegiatan Ke PU an	Jumlah kegiatan lapangan yang dibayarkan honor/lembur	paket			-		-	1	181.500.000	1	199.650.000	1	210.000.000	3	591.150.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung		70		1.335.753.000	85	198.000.000	90	498.700.000	95	583.570.000	100	480.000.000	100	3.096.023.000
					Pengadaan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1	920.000.000	1	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	4	1.520.000.000
					Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Pagar, Garase, Taman dan Landscape	paket		3	235.753.000		-		-		-		-		235.753.000
					Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor	paket	1	1	50.000.000	1	68.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	70.000.000	4	315.050.000
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	41		-	5	-	5	143.000.000	5	157.300.000			15	300.300.000
					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor dan Lanscape	gedung	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	160.000.000	1	724.920.000
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas	%	100		-	100	14.000.000	100	169.400.000	100	186.340.000	100	200.000.000	100	569.740.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	145		-	110	14.000.000	110	169.400.000	130	186.340.000	130	200.000.000	480	569.740.000

						Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dengan kondisi baik	Km	85		15.371.513.075	90	33.315.691.000	93	49.250.000.000	95	116.024.000.000	95	43.750.000.000	95	257.711.204.075
						Peningkatan Trotoar	Panjang Trotoar yang ditingkatkan	ruas		10	5.999.319.400	10	5.671.350.000	10	6.000.000.000	10	6.500.000.000	10	7.000.000.000	40	31.170.669.400
						Pembangunan Trotoar	Panjang Trotoar yang dibangun	ruas		6	1.910.698.000	5	1.952.458.000	5	2.500.000.000	5	3.000.000.000	5	3.500.000.000	20	12.863.156.000
						Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang ditingkatkan	Km		2,2	5.424.963.950	5	16.686.275.000	5	22.000.000.000	5	25.000.000.000	5	27.000.000.000	20	96.111.238.950
						Pembangunan Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang dibangun	Km				5	3.860.000.000	5	4.840.000.000	5	5.324.000.000	5		20	14.024.000.000
						Rehab Jalan Dalam Kota	Panjang jalan yang direhab	km				5	3.860.000.000	5	4.500.000.000	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	20	18.360.000.000
						Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	unit		1	849.971.725	1	74.458.000	1	6.050.000.000						6.974.429.725
						Pembangunan Box Culvert	Jumlah Box Culvert yang dibangun/ ditingkatkan	paket	3	1	699.060.000			2	1.210.000.000						1.909.060.000
						Pengecoran bahu/badan jalan	Jumlah bahu/ badan jalan yang dicor	paket				1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	4	3.000.000.000
						Pembangunan Jalan Konsolidasi By Pass Kelurahan Pulau Anak Aia	Jalan Yang Dibangun	paket		1	200.000.000										200.000.000
						Pengedaman dan Pengecoran Bahu Jalan Simpang Empat By Pass Jln. Teja Sukmana	Dam yang dibuat dan bahu jalan yang dicor	paket		1	200.000.000										200.000.000
						Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	Pemindahan Saluran dan Trotoar Simpang By Pass Surau Gadang	paket		1	87.500.000										87.500.000
						Penyusunan DED Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jumlah DED yang disusun	paket						2	1.000.000.000						1.000.000.000
						Pembangunan Jalan 2 Jalur Jl. Sudirman dan Jl. Soekarno Hatta	Jalan 2 jalur yang dibangun	paket								2	70.000.000.000				70.000.000.000
						Perencanaan DAK Jalan	Jumlah perencanaan DAK jalan yang dikerjakan	dolku men				1	461.150.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	4	1.811.150.000

						Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase drainase perkotaan dengan kondisi baik	%	72		7.758.835.905	85	5.484.945.000	90	8.750.000.000	95	10.400.000.000	95	10.765.000.000	95	43.158.780.905
						Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun	M'	3000	2000	5.524.976.795	1500	3.926.000.000	2000	5.000.000.000	2000	6.000.000.000	2000	7.000.000.000	7500	27.450.976.795
						Pemeliharaan Rutin Drainase Dalam Kota	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang dipelihara	M'	2850	5700	235.477.685	5700	454.671.000	5700	1.000.000.000	5700	1.150.000.000	5700	1.265.000.000	22800	4.105.148.685
						Peningkatan Drainase	Panjang Saluran Drainase / Gorong-Gorong yang ditingkatkan	M'	1000	1200	1.998.381.425	5000	1.104.274.000	5000	1.500.000.000	5000	2.000.000.000	5000	2.500.000.000	20000	9.102.655.425
						Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Terlaksanannya Pengembangan model dralingmas (Drainase lingkungan berbasis masyarakat)	Keg.						1	1.250.000.000	1	1.250.000.000			2	2.500.000.000
						Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Pengamanan titik bahaya longsor	%	45		2.458.199.650	60	9.500.000.000	70	7.181.250.000	80	8.959.375.000	80	3.250.000.000	80	31.348.824.650
						Pemasangan Batu Bronjong/Dam bangunan	Batu Bronjong/Dam bangunan dibangun	paket				1	8.000.000.000	1	3.306.250.000	1	4.959.375.000			3	16.265.625.000
						Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan	Pemasangan Batu Bronjong/Dam jalan yang dibangun	paket		5	2.458.199.650	1	1.500.000.000	6	2.875.000.000	6	3.000.000.000	6	3.250.000.000	19	13.083.199.650
						Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	Pembangunan Infrastruktur Kaw. Rawan Bencana	titik						1	1.000.000.000	1	1.000.000.000			2	2.000.000.000
						Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase peningkatan kualitas jalan dari pemeliharaan	%	85		1.376.636.690	90	1.958.436.305	93	2.662.000.000	95	2.928.200.000	95	3.000.000.000	95	11.925.272.995
						Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam Kota	Jalan Dalam Kota yang di rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin	bulan	12	12	532.812.320	12	937.200.130	12	907.500.000	12	998.250.000	12	1.000.000.000	48	4.375.762.450
						Pemeliharaan Rutin Jembatan Dalam Kota	Jumlah Jembatan Dalam Kota yang di rehabilitasi/dipelihara	unit	31	31	443.875.360	31	486.954.375	31	847.000.000	31	931.700.000	31	1.000.000.000	31	3.709.529.735
						Pemeliharaan Rutin Trotoar Dalam Kota	Trotoar dalam kota yang di rehabilitasi/ pemeliharaan Rutin	bulan	12	12	399.949.010	12	534.281.800	12	907.500.000	12	998.250.000	12	1.000.000.000	48	3.839.980.810

						persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%	40			70		85		100		100		100	-	
						Pembuatan Sumur Bor	Jumlah sumur bor yang dibangun	paket		1	200.000.000,00	1	30.000.000	1	550.000.000	1	605.000.000	1	700.000.000	4	2.085.000.000
						Pembuatan Sumur Bor dan Sambungan Rumah (SR)	Sumur Bor, Tower Air, dan Sambungan Rumah	paket		1	220.321.600,00		-		-		-		-		220.321.600
						Lanjutan Pembangunan Toilet Umum	Lanjutan Pembangunan Toilet UmumKawasan Wisata NgaraiMaaram dan Benteng Fort de Kock	paket		2	424.000.000,00		-		-		-		-		424.000.000
						Pembangunan dan Revitalisasi Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dibangun dan yang direvitalisasi	paket					-	1	1.500.000.000					1	1.500.000.000
						Pemeliharaan Sarana Air Minum	Jumlah Sarana Air Minum yang dipelihara	paket					-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000
						Pembangunan Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dibangun								1	2.600.000.000			1	2.600.000.000	
						Pemeliharaan dan Revitalisasi Sarana Sanitasi	Jumlah Sarana Sanitasi yang dipelihara di direvitalisasi	paket					-	1	1.100.000.000	1	1.210.000.000	1	1.300.000.000	3	3.610.000.000
						Pemberdayaan Sanitasi	Terlaksanannya Pemberdayaan Sanitasi	paket					-	1	275.000.000	1	302.500.000			2	577.500.000
						Pembangunan Toilet Umum	Toilet Umum yang terbangun	paket			3	1.358.046.500								3	1.358.046.500
						Pembangunan IPLT dan IPAL	IPLT dan IPAL terbangun	unit					1		2.889.000.000	1	2.789.000.000			2	5.678.000.000
						Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	Bantuan Pengujian Kualitas Air Baku Masyarakat	paket					1	66.150.000	1	69.457.500			2	135.607.500	
						Pemipaan (SR) Masyarakat	Pemipaan (SR) Masyarakat	SR		300	436.000.000			500	1.100.000.000	500	1.155.000.000			1000	2.691.000.000
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Panorama Baru	SPAM	1	1	63.000.000,00			1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	820.181.250
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kayu Kubu	paket					1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	757.181.250	
						Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Labuah Batu (Bukit Apit)	paket					1	236.250.000	1	248.062.500	1	272.868.750	3	757.181.250	
						Pamsimas	terlaksananya Pamsimas	paket					1	85.000.000					1	85.000.000	

						Program Pengendalian Banjir	Persentase Pengurangan titik genangan	titik	8		644.628.110	4	253.842.150	2	1.431.250.000	2	1.739.375.000	0	-	0	4.069.095.260
						Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	Panjang Pengerukan Sungai / Kali	M'		200 0	344.638.385	200 0	253.842.150	200 0	431.250.000	200 0	474.375.000			600 0	1.504.105.535
						Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah sumur resapan yang dibuat	unit		1	299.989.725			2	1.000.000.000	2	1.265.000.000			4	2.564.989.725
						Program Pembangunan Sarana Sosial Kemasyarakatan dan Peningkatan Fasilitas Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan gedung negara dan fasilitas umum	%	65%		17.044.979.660	75	75.522.479.130	80	52.722.365.000	85	22.046.318.500	85	450.000.000	85	167.786.142.290
						Event-Event Daerah dan Nasional	Jumlah event daerah yang dilaksanakan	event	5	5	99.964.400	5	100.000.000	5	110.000.000	5	125.000.000	5	150.000.000	20	584.964.400
						Pembangunan Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang dibangun	unit	3	7	5.221.254.740	1	19.400.000.000	1	1.150.000.000	1	1.265.000.000			3	27.036.254.740
						Rehab Kantor Lurah	Jumlah kantor lurah yang direhab	paket		3	841.496.000	1	70.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	10	1.811.496.000
						Pembangunan Kantor DPRD Kota Bukittinggi	Jumlah Kantor DPRD Kota Bukittinggi yang dibangun	unit		1	149.599.610	1	16.288.337.630	1	47.277.365.000	1	15.891.318.500			1	79.606.620.740
						Pembangunan Kembali Rumah Dinas Walikota Bukittinggi	Jumlah Rumah Dinas Walikota Bukittinggi yang dibangun kembali	unit		1	5.712.024.425	1	6.507.141.500							1	12.219.165.925
						Pengembangan Rumah Dinas Wakil Walikota Bukittinggi	Rumah Dinas yang dikembangkan	unit		1	2.583.521.535		-								2.583.521.535
						Rehab Gedung Parkir Eks Gloria	Jumlah Gedung Parkir Eks Gloria yang direhab	unit		1	2.227.118.950	1	2.000.000.000							1	4.227.118.950
						Lanjutan Pemasangan Pagar Lintasan Pacuan Kuda Bukit Ambacang	Panjang Pagar Lintasan Pacuan Kuda	M'		200	210.000.000		-								210.000.000
						Rehab Balai Pemuda	Jumlah Balai Pemuda yang direhab	unit			-		-	1	1.150.000.000	1	1.265.000.000			2	2.415.000.000
						Rehabilitasi/Pembangunan Kembali Pasar Atas	Tersedianya dokumen sebagai acuan rehabilitasi/ pembangunan kembali Pasar Atas	doku men			-	4	6.165.000.000	1	2.735.000.000	2	3.200.000.000				12.100.000.000
						Revitalisasi Kawasan Jam Gadang	Kawasan Jam Gadang yang direvitalisasi	kegiat an			-	1	24.992.000.000								24.992.000.000
																				-	-

						Program Pengelolaan Pembangunan Gedung	% Gedung negara dan swasta yang laik fungsi	%			293.417.165	20	143.323.500	30	172.500.000	40	189.750.000	40	200.000.000	40	849.466.735
						Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	Terlaksananya Operasionalisasi Perda Bangunan gedung	TABG/ SLF		18	143.893.235	18	143.323.500	18	172.500.000	18	189.750.000	18	200.000.000		849.466.735
						Penyusunan Ranperda	Jumlah RanPerda tersusun	ranper da		1	149.523.930										149.523.930
						Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase wilayah/ jalan dengan penerangan jalan lengkap	%			4.300.399.780	10 0	7.697.756.555	10 0	9.391.250.000	10 0	10.801.312.50 0	10 0	10.870.312.500	10 0	43.061.031.33 5
						Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	bulan	12	12	399.999.940	12	439.756.555	12	484.000.000	12	532.400.000	12	600.000.000	48	2.456.156.495
						Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang ditambah	paket	6	5	600.399.840	6	878.000.000	6	726.000.000	6	798.600.000	6	800.000.000	24	3.802.999.840
						Revitalisasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Jaringan Penerangan Jalan Umum yang direvitalisasi	paket			-	6	2.750.000.000	6	3.025.000.000	6	3.025.000.000	6	3.025.000.000	24	11.825.000.000
						Pembayaran Listrik Rekening PJU	Rekening Listrik PJU yang dibayar	rekeni ng	12	12	3.300.000.000	12	3.630.000.000	12	5.156.250.000	12	6.445.312.500	12	6.445.312.500	48	24.976.875.000
						Program Pengaturan Jasa Konstruksi	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi pada SIPJAKI	%	10		115.809.775	40	249.275.000	80	450.000.000	75	501.000.000	85	410.000.000	85	1.726.084.775
						Pembinaan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Keg.	1	1	115.809.775	1	144.829.500	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	4	740.639.275
						Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah SIM yang dibangun/ diupdate	SIM						1	100.000.000	1	121.000.000			2	221.000.000
						Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000 tersusun	paket	125			50	48.395.500	50	100.000.000	50	110.000.000	50	120.000.000	200	378.395.500
						Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun	doku men				5	56.050.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	120.000.000	20	386.050.000

						Program Perencanaan Pembangunan infrastruktur	tingkat ketersediaan dokumen pendukung perencanaan non DED	%	10		216.684.775		-		-		-		-	85	216.684.775
						Penyusunan Biaya Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000	Paket Perencanaan Pekerjaan Fisik SKPD dengan Nilai Kecil dari 100.000.000 tersusun	paket	125	44	24.838.250		-		-		-		-	0	24.838.250
						Penyusunan Harga Satuan Konstruksi Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung (HSBGN) Kota Bukittinggi yang tersusun	dokumen		4	55.927.995		-		-		-		-	0	55.927.995
						Fasilitasi Kegiatan DAK Bidang ke PU an	Jumlah paket kegiatan yang difasilitasi	bidang		4	135.918.530		-		-		-		-		135.918.530
																					-
MISI 3 : MENINGKATKAN PENATAAN RUANG KOTA SERTA MENGENDALIKAN DAN MENGARAHKAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKESINAMBUNGAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA											1.882.905.120		2.926.935.740		2.573.100.000		2.728.410.000		1.815.000.000		11.926.350.860
						Program Perencanaan Tata Ruang	persentase penyediaan informasi dan regulasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	%	40%		1.585.679.245	75	2.461.428.805	80	1.945.100.000	85	2.059.610.000	85	1.050.000.000	85	9.101.818.050
						Pendamping Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah Perda RDTR tersusun	dokumen	1	1	400.037.830	1	200.000.000							1	600.037.830
						Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RTRW Kota Bukittinggi terlaksana	paket				1	296.510.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	596.510.400
						Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda RDTRK Kota Bukittinggi terlaksana	paket					200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000
						Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Kota Bukittinggi	paket				1	146.609.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	446.609.400
						Lanjutan Penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi	Jumlah penyusunan Perda RDTR Kota Bukittinggi yang dilanjutkan	dokumen				1	299.111.180							1	299.111.180
						Pengadaan cetak peta tata ruang	Tersedianya peta tata ruang	peta	1	40	30.000.000	40	30.000.000							40	60.000.000
						Pendataan Bangunan	Terlaksananya Penataan Bangunan	dokumen		1	329.968.300		-		-		-		-		329.968.300
						Pendataan Bangunan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Terlaksananya Penataan Bangunan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	dokumen	1			1	368.894.625							1	368.894.625

						Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan kelengkapan Studio Tata Ruang	jenis		12	250.000.000	1	90.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000			3	740.000.000
						RTBL Kawasan Strategis	Jumlah RTBL Kawasan Strategis tersusun	dokumen		1	441.498.450	1	590.000.000	1	798.600.000	1	878.460.000			3	2.708.558.450
						Pembuatan Keterangan Rencana Kota	Terlaksananya pembuatan keterangan rencana kota	krk	350	350	49.158.610	350	70.519.625	350	71.500.000	350	78.650.000			1050	269.828.235
						Perubahan Sertifikasi Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	Terlaksananya Perubahan Sertifikat Tanah yang Terkena Pelepasan Hak	sertifikat	60	60	85.016.055	60	101.716.930	60	154.000.000	60	169.400.000	60	200.000.000	240	710.132.985
						Studi penataan ruang daerah	Studi komparasi penataan ruang daerah yang dilaksanakan	keg.					1	121.000.000	1	133.100.000	1	250.000.000	3	504.100.000	
						Penyusunan dan Pendataan Arsip - Arsip Tata Ruang Serta Digitalisasi Data	Terlaksananya data tata ruang yang lengkap dan tertata	paket				1	225.415.000							1	225.415.000
						Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	Terlaksananya Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Ngarai Sianok	kegiatan				1	42.651.645							1	42.651.645
						Sistem Informasi Tata Ruang	Tersedianya sistem informasi tata raung	paket					1		200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	persentase pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	40%		297.225.875	65	465.506.935	70	628.000.000	75	668.800.000	75	765.000.000	75	2.824.532.810
						Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan	Jumlah kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	tahun	1	1	146.681.575	1	199.927.810	1	198.000.000	1	217.800.000	1	250.000.000	4	1.012.409.385
						Audit Pemanfaatan Ruang	Jumlah Audit Pemanfaatan Ruang yang disusun	dokumen	1		75.544.300	1	65.579.125	1	110.000.000	1	121.000.000	1	125.000.000	4	497.123.425
						Pembuatan Billboard Peringatan Dilarang Membangun diatas Lereng/ Tebing	Jumlah billboard yang dibuat	buah		15	75.000.000		-		-		-		-		75.000.000
						Pembuatan Billboard Tata Ruang	Jumlah billboard yang dibuat	buah				40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	50	250.000.000	170	850.000.000
						Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah bangunan	Terlaksananya Verifikasi dan Penyelesaian pengaduan masyarakat masalah tanah	keg.					1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	3	390.000.000	

MISI 4 : MENINGKATKAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFORMASI, PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN DAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PEMBANGUNAN						4.167.747.288		23.053.874.950		6.975.000.000		8.100.000.000		9.225.000.000		51.495.801.208
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase optimalisasi penataan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah	%	90		3.754.639.868	92	22.246.311.150	93	6.250.000.000	94	7.300.000.000	94	8.350.000.000	94	47.900.951.018	
Kegiatan Sertifikasi Aset Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik pemerintah yang dapat diselesaikan/ diterbitkan	sertifi kat		5	221.710.950	5	156.333.925	5	250.000.000	5	300.000.000	5	350.000.000	20	1.278.044.875	
Pengadaan Tanah Untuk Jalan	Tersediannya tanah untuk jalan menuju kantor DPRD	paket		1	33.089.293										33.089.293	
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	Tersediannya tanah untuk Kepentingan Pemerintah Kota Bukittinggi	paket		1	3.499.839.625	1	22.016.313.175	1	6.000.000.000	1	7.000.000.000	1	8.000.000.000	4	46.516.152.800	
Sosialisasi Pengadaan Tanah	Terlaksananya Sosialisasi Pengadaan Tanah	paket				1	73.664.050								73.664.050	
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian	Persentase Kepastian hukum atas tanah aset daerah	%	80		387.286.390	82	532.787.790	83	600.000.000	84	650.000.000	84	700.000.000	84	2.870.074.180	
Kegiatan Penyelesaian Tanah Konsolidasi By Pass dan Masalah Tanah Masyarakat Lainnya	Masalah konsolidasi tanah by pass dan masalah tanah masyarakat lainnya yang dapat diselesaikan	tahun		1	387.286.390	1	532.787.790	1	600.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000	4	2.870.074.180	
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian	Persentase ketersediaan informasi pertanian				25.821.030	55	274.776.010	70	125.000.000	85	150.000.000	90	175.000.000	90	724.776.010	
Pembuatan Sistem informasi geografis tanah dan bangunan milik Pemerintah kota Bukittinggi	Terlaksananya pembuatan aplikasi dan GIS Tanah dan Bangunan	kegiat an				1	247.289.830							1	247.289.830	
Kegiatan Pembuatan Arsip Elektronik	Tersedianya arsip elektronik pertanian	arsip		100	25.821.030	100	27.486.180	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	400	477.486.180	

Bukittinggi, 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG
KOTA BUKITTINGGI

Ir. OKTAVIANUS, MT
NIP.19631030 199202 1 002

